



PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 22 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2006

BUPATI LAMONGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Rencana Strategis Daerah Kabupaten Lamongan 2002-2006 merupakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 6 Tahun 2002 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang harus dijabarkan kedalam Rencana Jangka Pendek Tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja Tahun 2006;
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 19 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
9. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 104);
10. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437);
11. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 06 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMONGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2006.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
2. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut RKPD, adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP, adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Pusat;
5. Rencana Strategis Daerah Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut RENSTRADA, adalah Rencana Strategis Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006 sebagai pedoman perencanaan taktis dan strategis.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten dalam jangka 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari RENSTRADA Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dukungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta dukungan Pemerintah Pusat maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) RKPD disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

- **VISI DAN MISI DAERAH**
- **GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH**
- **ISU DAN MASALAH MENDASAR**

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. PROSES DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN LAMONGAN

BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : RANCANGAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2006

BAB V : RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN

BAB VI : PENUTUP

- (3) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD Tahun 2006

Pasal 5

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Lamongan

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 29 Juni 2005


PJ. BUPATI LAMONGAN
Agus Syamsuddin
AGUS SYAMSUDDIN

Diundangkan di Lamongan

Pada tanggal 29 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,

Ttd

ENA S. SOEMARNA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2005 NOMOR 01 SERI G

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	I. 1
A. Latar Belakang	I. 2
⇒ Visi dan Misi Daerah	I. 2
⇒ Gambaran Kondisi Umum Daerah	I. 2
⇒ Isu dan Masalah Mendasar	I. 11
B. Maksud dan Tujuan	I. 14
C. Proses dan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	I. 14
BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN LAMONGAN	II. 1
A. Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2004	II. 1
B. Lingkungan Eksternal dan Internal	II. 3
C. Tantangan Pokok	II. 3
D. Prospek Ekonomi 2005-2006	II. 4
BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006	III. 1
BAB IV : RANCANGAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2006	IV. 1
BAB V : RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN	V. 1
BAB VI : PENUTUP	VI. 1

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2006.

RKPD merupakan penjabaran tahun ke lima (tahun terakhir) dari Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006 yang merupakan rencana jangka menengah, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai kebijaksanaan nasional, dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, meletakkan RKPD sebagai acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2006 yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi makro dan secara rinci dijabarkan dalam bidang-bidang pembangunan disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Lamongan. Bagi Dinas/Badan/Kantor dan Satuan Kerja dijabarkan pemerintah Kabupaten Lamongan berkewajiban untuk memedomani sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing kewenangan yang diberikan. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas/Badan/Kantor dan Satuan Kerja dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber, khususnya pada Dinas-dinas sektoral sebagai kepanjangan tangan dari Dinas-dinas sektoral Propinsi Jawa Timur dalam mengemban pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

A. LATAR BELAKANG

VISI DAN MISI DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 06 Tahun 2002, tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006 tertuang Visi Daerah sebagai berikut :

*** Terwujudnya masyarakat Kabupaten Lamongan yang sejahtera, maju, rukun, damai, adil dan berakhlak mulia *.**

Untuk mendukung tercapainya Visi Daerah tersebut telah ditetapkan Misi Daerah sebagai berikut :

1. Perwujudan keharmonisan masyarakat yang didukung dengan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari;
2. Perwujudan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan hasil pertanian, kelautan, industri dan perdagangan;
4. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi utamanya bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpuh pada mekanisme pasar;
5. Peningkatan keseimbangan kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkepribadian dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh negatif globalisasi;
6. Peningkatan kualitas keseimbangan pelayanan masyarakat melalui penyiapan jasa publik yang transparan, responsive dan bertanggungjawab serta profesional;
7. Penjaminan terhadap masyarakat atas keamanan ketertiban dan ketentraman;

GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

Politik

Pembangunan politik di Kabupaten Lamongan secara umum sudah semakin baik, hal ini ditandai dari proses demokratisasi telah berjalan pada jalur dan arah yang benar. Demikian pula antusiasme masyarakat berpolitik melalui organisasi partai politik cukup tinggi, walaupun masih terlihat adanya ancaman kebebasan berekspresi, masih kuatnya budaya kekerasan dan politik uang.

Seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kritis, maka adanya tuntutan keterbukaan dalam wadah partisipasi politik rakyat yang ditandai dengan berlakunya sistem multi partai yang mengikuti Pemilu, serta munculnya berbagai bentuk asosiasi masyarakat sipil baik dalam bentuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun forum-forum lainnya, menjadi modal yang sangat penting dalam mewujudkan proses demokratisasi kedepan. Demikian pula, dengan suksesnya pelaksanaan Pemilu tahun 2004 yang berlangsung secara aman dan tertib diharapkan dapat terbentuk Pemerintahan yang demokratis.

Dalam rangka pemberdayaan politik untuk mewujudkan tatanan kehidupan politik yang semakin konstitusional, demokratis, langkah-langkah yang diambil adalah meningkatkan frekwensi, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Propinsi dan Pusat, Ormas, Orpol, LSM, Perguruan Tinggi, Media Massa untuk ikut membantu memantapkan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dan disamping itu mengadakan forum koordinasi dan konsultasi secara berkala dalam pertemuan Muspida.

Hukum

Kondisi penegakan hukum di Lamongan sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditegaskan. Produk hukum seperti Peraturan Pemerintah Daerah yang merupakan implementasi dari Otonomi Daerah agar dapat mencerminkan aspirasi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan kepastian hukum dan ketentraman dalam kehidupan kurun waktu 5 tahun 2000-2004 yaitu dengan Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang hukum serta penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran serta budaya hukum dan tertib hukum; Menerbitkan Peraturan Daerah sebanyak 102 buah telah disahkan; Keputusan Bupati sebanyak 6.239 buah; Instruksi Bupati sebanyak 16 buah; Perjanjian Kerjasama sebanyak 62 buah; Buku Lembaran Daerah sebanyak 790 buah; Sosialisasi Perda sebanyak 8 buah; Penegakkan Perda (PPNS) sebanyak 3 buah dan Bintek PPAT sebanyak 1 buah;

Keamanan dan Ketertiban

Kondisi sosial politik, infra struktur dan supra struktur politik di Kabupaten Lamongan cukup mantap, sehingga tercipta stabilitas politik yang dinamis dan

terkendali. Meskipun selama 5 (lima) tahun perkembangan suhu politik di berbagai daerah agak sedikit memanas sebagai akibat dari krisis multi dimensi. Suhu politik di Kabupaten Lamongan sampai saat ini masih tetap terkendali dan masih dalam batas wajar serta tidak mengganggu stabilitas politik daerah yang dapat menggoyahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan.

Dalam pelaksanaan pembinaan umum selama kurun waktu 2000-2004 telah mampu mewujudkan kondisi daerah yang cukup mantap dan stabil berkat kerjasama dan koordinasi yang baik dengan aparat yang membidangi keamanan, ketertiban dan ketentraman serta yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan masyarakat yang semakin sadar dalam menciptakan suasana tertib dan aman di lingkungan masing-masing.

Sosial dan Budaya

Kebudayaan merupakan modal dasar yang sangat penting sebagai salah satu sumberdaya utama pembangunan. Bangsa Indonesia pernah dikenal sebagai suatu bangsa yang memiliki peradaban terbuka dengan tingkat solidaritas dan kebersamaan yang tinggi. Selain itu budaya bangsa yang sangat beragam juga mencerminkan kekayaan budaya nasional dalam bentuk-bentuk kearifan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi serta keahlian.

Upaya membangun ketahanan budaya bangsa belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ketahanan budaya bangsa masih rentan karena adanya disorientasi tata nilai, krisis identitas dan rendahnya daya saing. Disamping itu dirasakan pula lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman dan menegaskan peran kebudayaan untuk meningkatkan kemampuan bangsa secara bersama-sama.

Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir (1999 s/d 2003) struktur perekonomian Kabupaten Lamongan masih belum banyak mengalami perubahan yaitu masih ditopang utama oleh sektor primer (khususnya oleh sektor pertanian). Meski demikian peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan semakin menurun, sedangkan sektor tersier (khususnya sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor jasa-jasa) menunjukkan kecenderungan meningkat. Rata-rata selama 5 (lima) tahun (1999 s/d 2003), sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 45,79 % terhadap total PDRB Kabupaten Lamongan, kemudian berturut-turut setelah sektor pertanian diikuti sektor perdagangan, hotel & restoran (16,95 %) dan sektor jasa-jasa (16,59 %).

Kontribusi sektor pertanian Kabupaten Lamongan tersebut terhadap total nilai PDRB ini lebih tinggi dibandingkan kontribusi sektor pertanian terhadap total nilai PDRB Propinsi Jawa Timur yang hanya sebesar 21,95 %.

Selama 5 (lima) tahun terakhir peranan sektor primer khususnya pertanian menunjukkan kecenderungan menurun, yakni dari 46,38 % pada tahun 1999 menjadi 44,43% pada tahun 2003 terhadap total nilai PDRB. Pada periode yang sama sektor tersier (perdagangan, hotel & restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa) menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari 41,31 % pada tahun 1999 menjadi 42,90 % pada tahun 2003.

Nilai total PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Lamongan pada tahun 2003 sebesar Rp. 1,232 triliun atau naik sebesar 3,68 % dibandingkan tahun 2002, dimana sebesar Rp. 547,43 milyar disumbangkan oleh sektor pertanian.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Lamongan dapat ditinjau juga melalui total nilai produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi yang lebih dikenal sebagai nilai PDRB. Perkembangan nilai total PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Kecenderungan yang semakin meningkat juga ditunjukkan pada nilai PDRB perkapita, yang bisa digunakan sebagai indikasi terjadinya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat produktifitas masyarakat Lamongan. Pada tahun 2003 PDRB per kapita ADHK Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 1.032.526,96 atau naik sebesar 3,38 % dibandingkan tahun 2002 yang hanya sebesar Rp. 998.763,76

Perkembangan pencapaian kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai pertumbuhan perekonomian yang dicapai tiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003 mencapai 3,68%. Pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir (1999 s/d 2003) menunjukkan pola kecenderungan yang semakin meningkat. Namun demikian pencapaian tersebut masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur kecuali pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999.

Struktur perekonomian Kabupaten Lamongan yang masih besar ditopang oleh sektor pertanian mengakibatkan laju pertumbuhan ekonominya masih dibawah rata-rata Jawa Timur. Persoalan struktural yang dialami oleh sektor pertanian selama ini mengakibatkan rendahnya kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi yang disumbangkan oleh sektor pertanian pada tahun 2003 yaitu hanya sebesar 1,12 % paling rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya yang memberikan nilai

pertumbuhan rata-rata diatas 5 % kecuali industri pengolahan yang hanya sebesar 2,27%.

Tenaga kerja

Memperoleh kesempatan kerja merupakan dambaan bagi setiap keluarga, oleh karena itu dalam setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran diantaranya melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja, sehingga setiap warga negara memperoleh hak dan kesempatan yang sama secara kompetitive di dalam memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.

Problematika penyediaan lapangan pekerjaan adalah suatu hal yang sangat kompleks dan sulit untuk teratasi dalam kurun waktu yang cepat. Ada banyak faktor yang sangat mempengaruhi terhadap tersedianya lowongan kerja, disamping Sumber Daya Manusia yang kurang memenuhi standart yang dibutuhkan, juga sangat terbatasnya lowongan kerja, bila dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang ada.

Memang dalam penyediaan lapangan kerja tidak saja menjadi tanggungjawab Pemerintah, tapi juga masyarakat dan dunia swasta. Namun demikian kita patut prihatin bila hal ini terus berlangsung dan tidak kunjung teratasi. Berdasarkan angka pencari kerja data statistik Kabupaten Lamongan Tahun 2004 ada 4.028 orang yang dalam kategori pencari kerja dan pengangguran tidak ketara (mumi) ada sebanyak 21.866 orang. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2004 yang mencapai 3,87 % diharapkan berimplikasikan terhadap peningkatan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Berbagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) telah menunjukkan kemajuan, tercermin dari membaiknya beberapa indikator seperti kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2003 jumlah penduduk Lamongan sebesar 1.224.812 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,62 % dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh terhadap kepadatan penduduk, namun yang harus diwaspadai adalah dampak dari jumlah penduduk yang terus berkembang akan dihadapkan pada permasalahan kepadatan penduduk serta daya dukung wilayah yang terbatas. Bila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk Lamongan pada tahun 2003 sebesar 675,6 orang per km².

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin ternyata jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 598.572 jiwa dan perempuan berjumlah 626.240 jiwa.

Adapun pengendalian dan mobilitas penduduk dilakukan berkaitan dengan penetapan jumlah, struktur dan komposisi serta pertumbuhan dan persebaran penduduk yang serasi, upaya yang telah dilakukan yaitu melalui Program Keluarga Berencana dan Transmigrasi. Perolehan peserta KB baru dan aktif berdasarkan mix kontrasepsi dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 peserta KB baru mencapai 20.504 orang dan terus bertambah dan pada tahun 2004 sampai dengan kondisi akhir bulan Agustus telah terdaftar sebanyak 22.022 orang, sedangkan jumlah peserta tertinggi ada di tahun 2001 mencapai angka 25.930 orang dan terbanyak pada jenis kontrasepsi suntik.

Perkembangan peserta KB aktif secara kumulatif dapat disampaikan bahwa tahun 2004 ini telah mencapai 215.158 orang dari angka sebelumnya tahun 2000 yang hanya mencapai 204.529 orang. Sedangkan untuk perkembangan usia kawin pertama perempuan dari tahun ke tahun masih dominan pada kelompok usia sampai dengan 20 tahun. Berdasarkan hasil pendataan keluarga versi BKKBN pada tahun 2003 sebanyak 345.443 KK untuk keluarga prasejahtera ada 171.124 KK, keluarga sejahtera tahap I 42.200 KK, Keluarga Sejahtera tahap I sebanyak 32.888 KK, keluarga Sejahtera tahap II 71.473 KK dan Keluarga Sejahtera tahap III plus ada sebanyak 27.758 KK.

Sementara itu kualitas pendidikan masih diprioritaskan pada penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun atau pendidikan masyarakat minimal setara dengan pendidikan di tingkat SLTP. Untuk mencapai hal tersebut masih dijumpai beberapa kendala/hambatan yang ditandai dengan tingkat putus sekolah atau DO masih tinggi walaupun sudah ada penurunan, Angka Buta Huruf (ABH) untuk penduduk usia 10 tahun ke atas masih tinggi, walaupun persentasenya menurun yaitu tahun 2004 sebesar 15.077 orang atau masih ada 1.23 % dari jumlah penduduk Lamongan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia SD (7-12 tahun) pada tahun 2004 sebesar 99,84 %, Angka Partisipasi SLTP (13-15 tahun) pada tahun 2004 menjadi 78,8 %, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMU/MA pada tahun 2004 54,27 %.

Kualitas Angkatan Kerja masih didominasi oleh Angkatan Kerja lulusan Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Pada saat yang sama meningkatnya jumlah angkatan kerja lulusan SLTA dan Perguruan Tinggi tidak diimbangi oleh meningkatnya ketersediaan kesempatan kerja yang sesuai yang pada gilirannya meningkatnya jumlah pengangguran terdidik.

Pembangunan kesehatan memiliki arti yang sangat strategis mengingat berkaitan langsung dengan penyiapan kualitas sumber daya manusia. Sasaran pembangunan dibidang kesehatan adalah terciptanya hidup sehat bagi setiap

penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dan tujuan pembangunan nasional.

Kemajuan dibidang kesehatan, jangkauan pelayanan kesehatan melalui kunjungan rawat jalan maupun rawat inap di puskesmas tahun 2003 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2002, jumlah kunjungan rawat jalan meningkat dari 647.670 orang pada tahun 2002 menjadi 650.765 orang pada tahun 2003, sedangkan untuk tahun 2004 telah mencapai 604.556 orang jumlah kunjungan rawat inap di Puskesmas meningkat dari 8.386 penderita tahun 2002 menjadi 8.393 penderita tahun 2003 sedangkan tahun 2004 mencapai 17.652 orang, pelayanan UGD tahun 2003 meningkat dari 3.490 kasus menjadi 3.568 kasus, sedangkan tahun 2004 ada 10.132 kasus. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dari tahun ketahun meningkat seiring dengan upaya Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik mutu maupun jangkauan, walaupun diikuti pula bermunculannya balai pengobatan klinik swasta sebagai mitra kerja.

Pada tahun 2003 jumlah persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan meningkat 1,72 % dibanding tahun 2002. dimana tahun 2002 jumlah persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan sebanyak 18.273 persalinan (88,70 %) dari sasaran persalinan sebanyak 20.601 persalinan, sedangkan pada tahun 2003 jumlah persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan sebanyak 18.080 persalinan (90,42 %) dari sasaran persalinan sebanyak 19.996 persalinan, sedangkan untuk tahun 2004 telah mencapai 17.204 persalinan (84,46 %).

Kematian perinatal (0-7 hari) pada tahun 2002 sebanyak 95 bayi (4,86 permil) dari 19.547 kelahiran hidup dan pada tahun 2003 menurun menjadi 91 bayi (4,60 permil) dari 19.793 kelahiran hidup, sedangkan untuk tahun 2004 kematian perinatal sebanyak 52 bayi dari 17.671 kelahiran hidup.

Jangkauan pelayanan melalui RSUD, rawat jalan meningkat dari 44.820 orang tahun 2002 menjadi 53.078 tahun 2003, sedangkan untuk tahun 2004 rawat jalan mencapai 65.529 orang, Rawat Inap tahun 2003 sebanyak 4.877 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2002 yang mencapai 4.900 orang, sedangkan untuk tahun 2004 rawat inap mencapai 5.274 orang, pelayanan rujukan dari bawah mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2002. pada tahun 2002 ada 12.787 kasus meningkat menjadi 16.954 kasus di tahun 2003 dan kondisi tahun 2004 telah mencapai 22.321 rujukan. Hal ini disebabkan disamping adanya peningkatan koordinasi antara puskesmas dan RSUD, juga adanya perbaikan manajemen serta perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana.

Dari kondisi tersebut, derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lamongan mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut diindikasikan oleh adanya peningkatan usia harapan hidup masyarakat. Dalam periode 1996-2002 dimana usia harapan hidup sebesar 66,43 tahun menjadi 67,33 tahun pada tahun 2003 dan 70,55 tahun pada tahun 2004.

Kesenjangan Antar Wilayah

Hasil analisa disparitas ekonomi antar wilayah kecamatan di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun (1999 s/d 2003) terjadi peningkatan kesenjangan kondisi perekonomian antar wilayah kecamatan. Peningkatan kesenjangan ekonomi ini ditandai dengan nilai indeks wiliamson. Pada tahun 1999 indeks wiliamson sebesar 0,275 meningkat menjadi 0,309 pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan terjadinya pemusatan aktivitas ekonomi secara spesial pada wilayah kecamatan-kecamatan tertentu.

Sedangkan hasil analisa disparitas pada masing-masing Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa kesenjangan kondisi perekonomian antar wilayah kecamatan dalam SSWP I memberikan nilai tertinggi berturut-turut diikuti kecamatan dalam SSWP II, SSWP III dan kesenjangan terendah pada SSWP IV.

Adapun hasil analisa tipologi daerah memberikan klasifikasi pencapaian pembangunan daerah pada masing-masing wilayah kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. **Daerah Cepat Maju Cepat Tumbuh** dicapai oleh 4 (empat) kecamatan yaitu Lamongan, Babat, Deket dan Brondong. Ke-empat wilayah kecamatan tersebut merupakan wilayah kecamatan yang mempunyai pencapaian pembangunan daerah paling maju di Kabupaten Lamongan;
2. **Daerah Berkembang Cepat** dicapai oleh 4 (empat) kecamatan yaitu Sukorame, Sarirejo, Sekaran dan Maduran. Kecamatan-kecamatan tersebut selama lima tahun terakhir (1999 s/d 2003) memberikan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kabupaten;
3. **Daerah Maju Tertekan**, dicapai oleh 6 (enam) kecamatan yaitu Pucuk, Sukodadi, Kedungpring, Tikung, Glagah dan Paciran. Kecamatan-kecamatan tersebut tergolong maju tetapi selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan perekonomian yang lambat, lebih rendah dibandingkan rata-rata Kabupaten. Hal ini mungkin disebabkan oleh terhambatnya perkembangan sektor-sektor basis yang menopang perekonomian masing-masing wilayah tersebut;

4. **Daerah Relatif Tertinggal**, dicapai oleh 13 (tiga belas) kecamatan yang sebagian besar di wilayah selatan dan wilayah Bengawan Jero, yaitu antara lain Bluluk, Modo, Ngimbang, Sambeng, Mantup, Kembangbahu, Sugio, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng, Laren dan Solokuro;

Secara umum berdasarkan hasil analisa potensi wilayah menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah sebagian besar wilayah di Kabupaten masih besar ditopang oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan/penggalan) selanjutnya diikuti oleh sektor tersier.

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam rangka meningkatkan kapasitas bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, program rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan bagi sumber daya alam yang mengalami kerusakan terus dikembangkan, walaupun hasilnya masih sangat terbatas, program rehabilitasi hutan dan lahan kritis telah dikembangkan sebagai suatu gerakan nasional. Demikian pula gerakan nasional pembangunan kelautan dan perikanan yang secara terpadu dilakukan pada wilayah pesisir, laut dan perairan tawar potensial. Disamping itu upaya pencarian cadangan-cadangan tambang baru terus dilanjutkan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan antar lain melalui peningkatan teknologi proses pengolahan hasil tambang dan perbaikan kerusakan lingkungan diareal bekas penambangan. Membaihnya tingkat kesadaran masyarakat tentang arti penting lingkungan hidup meningkatkan keserasian hubungan antara kebutuhan manusia dan kemampuan ekosistem dalam mendukung kehidupan guna menghindari kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan yang lebih besar.

Agama

Kehidupan beragama berkembang dengan baik terutama pada pelaksanaan ritual keagamaan, yang didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan, sehingga umat beragama lebih mudah melaksanakan ibadahnya. Hal tersebut ditandai dengan semakin tumbuh suburnya kegiatan keagamaan di masjid, surau, gereja, pura dan vihara, semakin giat dan bergairahnya umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing-masing, serta semakin intensifnya pengkajian dan pendalaman agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Langkah kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain menjalin kerukunan antar umat beragama dengan pembentukan forum komunikasi antar umat beragama, kerukunan antar etnis melalui pembentukan forum-forum hubungan dan kerukunan antar etnis, pemantapan hubungan sosial melalui forum silaturahmi antar tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Meskipun kehidupan beragama berkembang lebih baik, pembangunan agama masih dihadapkan pada gejala negatif di tengah-tengah masyarakat yang sangat memprihatinkan seperti praktik perjudian, perilaku asusila, pengedaran dan pemakaian narkoba yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Demikian pula ada kecenderungan makin rapuhnya etika dan nilai-nilai agama, yang ditandai oleh perilaku permisif yang tak lagi mengindahkan adab kesopanan dan kesantunan. Gejala tersebut menunjukkan bahwa akhlak mulia menurun dan sendi moral agama melemah. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas agama itu menggambarkan adanya kesenjangan yang mencolok antara pemahaman atas ajaran-ajaran agama dengan tingkah laku sosial.

ISU DAN MASALAH MENDASAR

Berbagai Kebijakan Pembangunan telah di tempuh oleh Pemerintah Daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberhasilan Pembangunan di berbagai bidang telah kelihatan hasilnya. Terlepas dari keberhasilan tersebut, masih tersisa banyak hal yang harus segera ditangani mengingat begitu banyaknya permasalahan dan kompleksnya segala urusan yang ada di tengah-tengah masyarakat seiring pula dengan meningkatnya tuntutan masyarakat itu sendiri.

Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat belum secara optimal tercukupi dan diperhatikan, kebutuhan tersebut antara lain adalah kebutuhan akan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman yang layak huni, Air Bersih, Pertanahan dan kebutuhan akan hak menyuarakan pendapat.

Apabila kita cermati ada permasalahan mendasar yang perlu diangkat sebagai isu daerah sehingga kedepan daerah dapat mengantisipasi tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, permasalahan mendasar tersebut antara lain :

Kemiskinan

Berbagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan, namun angka kemiskinan tidak kunjung turun, berdasarkan data yang ada pada tahun 2003 Lamongan masih memiliki 73.788 Rumah Tangga Miskin dari 293.944 Rumah Tangga yang ada, sedangkan penyebarannya sebagian besar banyak berada di tingkat pedesaan.

Pengangguran

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka seiring pula bertambahnya kompleksitas permasalahan Kependudukan. Permasalahan pengangguran adalah menjadi masalah Nasional yang cukup berat. Disamping bertambahnya peningkatan Angkatan kerja baru pada setiap tahunnya, pemulangan TKI ilegal, PHK yang selalu membengkak akibat multi krisis, serta SDM yang sangat rendah, menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. Pada tahun 2004 di Lamongan masih ada tercatat sebanyak ± 21.000 orang pengangguran.

Kesenjangan Antar Wilayah

Pelaksanaan pembangunan telah dijalankan sesuai program dan kebijakan Daerah, potensi dan Sumber Daya Manusia setiap wilayah sangat dominan dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan di setiap wilayah yang ada. Akibat dari itu pulalah yang berdampak pada perkembangan wilayah menjadi kurang balance bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, walaupun prinsip azas pemerataan juga telah dikembangkan. Untuk membedah perekonomian di wilayah diantaranya adalah adanya suatu upaya daerah secara sungguh-sungguh untuk menuntaskan jalan poros desa dan meneruskan pembangunan pasar desa potensial sebagai embrio tumbuhnya pusat-pusat perekonomian.

Pertumbuhan Ekonomi

Dari tahun ke tahun memang pertumbuhan ekonomi daerah meningkat, namun perlu kita sadari bersama bahwa pertumbuhan tersebut masih didominasi dari sumbangan sektor pertanian. Lamongan memang sebagai daerah agraris dan sebagian masyarakatnya adalah petani, sektor pertanian adalah sektor andalan daerah, tapi perlu disadari bahwa sektor ini pertumbuhan ekonominya sangat lambat, karena sudah pada fase kulminasi dan sangat kecil kemungkinannya untuk diharapkan dapat berkembang, sehingga perlu peningkatan sistem pertanian agribisnis dan teknologi pasca panen. Untuk itu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita perlu menggali dan mengembangkan potensi-potensi lain di luar Pertanian antara lain Industri, Perdagangan, Pariwisata, Permukiman dan lain sebagainya.

Investasi Rendah

Pembangunan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Seiring dengan krisis multi dimensi yang berujung pada tingkat krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi rendah, sangat berdampak pada ketersediaan dana swadaya masyarakat sebagai penopang dana-dana pembangunan khususnya yang bersifat stimulan di tingkat wilayah dan desa.

Sedangkan investasi dari swasta khususnya pemilik modal terhadap proyek-proyek pembangunan yang harus melibatkan unsur swasta dan pengusaha sampai saat ini masih sangat rendah atau stagnan walaupun ada peningkatan bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat Lamongan dalam hal pengembangan industri masih tergolong sebagai daerah industri pemula.

Rendahnya investasi ini banyak disebabkan dari ketersediaan infrastruktur yang belum memadai, jaminan kepastian hukum, dan pelayanan birokrasi yang masih lemah.

Sumber Daya Alam Atau Lingkungan Hidup

Sebagai akibat dari berbagai aktivitas baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun aktivitas lain yang dilakukan oleh masyarakat selaku pelaksana dari dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan itu sendiri, sangat berpengaruh pada ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) dan keberadaan Lingkungan Hidup yang memadai. Akibat itu semua sangat berdampak pada ketersediaan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang rendah. Untuk itu suatu kerjaan yang berat bagi Daerah, khususnya pengelolaan di lingkungan hutan yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh Perum Perhutani, karena dampak yang ditimbulkan secara otomatis daerah ikut menanggung akibatnya, sementara hasil produk hutan Lamongan tidak ikut merasakan. Sedangkan untuk sumber-sumber lain, seperti Galian batu kapur, Dolomit, Air bawah tanah, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lain-lain secara rutin telah dilakukan koordinasi lintas sektoral terkait dengan pembinaan dan pengawasan.

Stabilitas Politik dan Kesejahteraan Masyarakat

Perubahan mendasar di era reformasi adalah adanya tuntutan akan keterbukaan disemua lini dan level khususnya mengenai informasi, keterlibatan masyarakat menjadi hal utama dalam setiap aktivitas. Tuntutan akan kesejahteraan masyarakat menjadi isu penting yang dimunculkan pada setiap event, yang akan berdampak pada kerawanan sosial dan pada ujungnya akan berpegaruh pada tingkat keamanan dan ketertiban apabila kita tidak pandai-pandai memenejnya.

Akibat dari kemajuan di bidang Ekonomi yang berdampak pada peningkatan sosial ekonomi masyarakat, sangat berdampak pula pada perubahan perilaku dan budaya masyarakat yang selalu minta dilayani. Pergeseran paradigma ini perlu disikapi oleh Birokrasi, agar kita siap dengan segala konsekuensinya.

Sumber Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah pada Tahun Anggaran 2004 yang ada di APBD sebanyak Rp. 413.414.598.007,84, dibelanjakan sebanyak Rp. 415.059.538.274,00, sehingga terjadi devisa anggaran. Dari dana tersebut untuk

belanja publik baik rutin maupun pembangunan sebanyak Rp.305.852.534.848,00, merupakan dana yang sangat terbatas bila harus dialokasikan untuk kebutuhan 1.224.812 jiwa penduduk Lamongan Tahun 2003. Untuk itu kedepan tidak ada lagi yang harus diharapkan kecuali menggali potensi Daerah sendiri melalui berbagai terobosan serta adanya upaya kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pinjaman pada pihak ketiga agar dapat mencukupi seluruh kebutuhan yang ada.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah untuk memberikan landasan bagi para penyelenggara pemerintahan dan para pelaku/pelaksana pembangunan di Kabupaten Lamongan dalam menyusun rencana, program dan kegiatan/ proyek pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mempertajam skala prioritas pembangunan di Kabupaten Lamongan yang dibiayai dari sumber dana APBD Kabupaten Lamongan, Dunia Usaha dan Masyarakat. Adapun tujuan konkritnya adalah :

1. Mengetahui hasil dan manfaat terhadap pelaksanaan pembangunan .
2. Agar seluruh program/kegiatan/proyek disusun terfokus dan tepat sasaran.
3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun RAPBD tahun anggaran 2006.

C. PROSES DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan adalah merupakan bagian dari Sistem Manajemen Perencanaan Pembangunan partisipatif (SMPP) yang dalam tataran di era reformasi dan otonomi daerah ini pendekatan yang dipakai adalah lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan termasuk diantaranya keterlibatan dalam proses Penyusunan Kebijakan maupun dalam proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Daerah.

RKPD yang dalam penyusunannya didasari oleh Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah suatu wujud dari sebuah konsep perencanaan yang terintegreted mulai perencanaan yang dilakukan di tingkat pusat, propinsi sampai pada tingkat kabupaten dengan melibatkan multi stake holder yang ada di daerah. Untuk itu dalam proses penyusunan RKPD sudah barang tentu diawali dari Penjaringan Aspirasi

Masyarakat, yang dipadukan dengan Rencana kerja (Renja-renja) Unit Satuan kerja Perangkat Daerah serta mempertimbangkan hasil-hasil yang diperoleh dalam Forum Musrenbang di Tingkat Desa dan Musrenbang Kecamatan. Masukan dari beberapa narasumber tersebut merupakan referensi dalam penyusunan draft awal Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan di tingkat tim penyusun baru dilakukan pembahasan melalui Forum Musrenbang Kabupaten Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Sinkronisasi Perencanaan Usulan Proyek Tahun Anggaran 2006.

Untuk memudahkan pemahaman dari konsep Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tersebut telah kami susun dalam format dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang

- ⇒ Visi Dan Misi Daerah
- ⇒ Gambaran Kondisi Umum Daerah
- ⇒ Isu Dan Masalah Mendasar

B. Maksud Dan Tujuan

C. Proses Dan Sistematika Penyusunan RKPD

Bab II : Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Lamongan

Bab III : Prioritas Pembangunan Daerah

Bab IV : Rancangan Penerimaan Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2006

Bab V : Rancangan Kerja Dan Pendanaan

Bab VI : Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN LAMONGAN

A. KONDISI EKONOMI MAKRO TAHUN 2004

Memasuki tahun 2005, perekonomian Kabupaten Lamongan dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan. Sebagai bagian integral dari perekonomian regional Jawa Timur dan perekonomian nasional Indonesia dari sisi eksternal, masih lemahnya pertumbuhan volume perdagangan/ distribusi terkait dengan tingkat persaingan global. Sementara itu disisi internal, tantangan yang ada juga tak kalah beratnya. Hal ini tercermin pada kondisi makro ekonomi yang belum sepenuhnya stabil sebagaimana tergambarkan dari masih tingginya inflasi dan fluktuatifnya nilai tukar rupiah. Kondisi ini sudah barang tentu memungkinkan juga mempengaruhi perekonomian regional Jawa Timur, termasuk Lamongan. Namun demikian kondisi tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan secara umum ditentukan pula oleh faktor-faktor lokal seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, permodalan dan kewirausahaan.

Sejalan adanya berbagai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal oleh pemerintah pusat, dan seiring itu pula dengan berbagai kebijakan pembangunan daerah serta didukung oleh kondisi politik dan keamanan yang cukup terkendali membawa dampak yang positif bagi perkembangan makro ekonomi Kabupaten Lamongan di tahun 2004. Kondisi makro ekonomi Kabupaten Lamongan yang relatif stabil meskipun fluktuatif, dengan inflasi yang cenderung menurun. Pada tahun 1999 inflasi mencapai 9,42 % dan selanjutnya pada tahun 2004 turun menjadi 6,13 %. Dengan menurunnya inflasi diharapkan perekonomian Kabupaten Lamongan tumbuh lebih cepat.

Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku mengalami pertumbuhan sebesar 10,44 % dimana pada tahun 2003 sebesar Rp. 3.913.125.940.000,- meningkat menjadi sebesar Rp. 4.321.843.630.000,- di tahun 2004. Sedangkan berdasarkan harga konstan PDRB mengalami peningkatan dimana pada tahun 2003 sebesar Rp. 1.232.194.950.000,- meningkat menjadi Rp. 1.282.242.320.000,- pada tahun 2004, dengan demikian diperoleh pertumbuhan ekonomi sebesar 4,06%, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3,68%.

Berdasarkan tingkat struktur ekonomi yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan besar yakni sektor primer (sektor pertanian dan pertambangan galian), sektor

sekunder (sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih serta konstruksi) dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa). Kondisi struktur ekonomi Kabupaten Lamongan belum terjadi pergeseran yang signifikan, meskipun peranan sektor primer cenderung menurun dan sektor sekunder maupun tersier cenderung meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa peranan sektor primer selama 5 (lima) tahun terakhir semakin menurun yakni dari 53,42% pada tahun 2000 menjadi 47,92 % pada tahun 2004 terhadap total PDRB. Pada periode yang sama sektor sekunder meningkat dari 9,63% pada tahun 2000 menjadi 9,87 % pada tahun 2004, demikian pula sektor tersier meningkat dari 36,95 % pada tahun 2000 menjadi 42,21 % pada tahun 2004.

Secara sektoral pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang meningkat dari tahun ke tahun dipicu oleh meningkatnya pertumbuhan 3 (tiga) sektor utama yang membentuk PDRB Kabupaten Lamongan yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh sebesar 22,76% meningkat dibanding tahun 2003 yang mencapai sebesar 20,08%. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 7,58% meningkat dibanding tahun 2003 yang sebesar 5,94%. Serta sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 5,8% meningkat bila dibandingkan tahun 2003 yang mencapai sebesar 5,04%.

Apabila dilihat dari sumbangan terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Lamongan sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan sumbangan yang cukup besar dalam membentuk PDRB-ADHK Kabupaten Lamongan tahun 2004 masing-masing sebesar 0,7 %, 17,93% dan 6,14%.

Perkembangan 3 (tiga) sektor tersebut, yang semakin membaik dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun sejak krisis ekonomi tahun 1997 akan mendorong kembali gairah ekonomi Kabupaten Lamongan. Struktur perekonomian Kabupaten Lamongan juga bergantung pada ketiga sektor tersebut disamping sektor utama sektor pertanian. Sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan yang secara total pangsanya pada tahun 2004 kontribusinya mencapai sebesar 66,52 % dari total PDRB Lamongan.

Indikator lain untuk mengetahui kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB perkapita maupun income perkapita. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir PDRB perkapita Kabupaten Lamongan terus membaik. Pada tahun 2004 PDRB perkapita ADHB sebesar Rp. 3.550.325,-

meningkat 8,27 % dibanding tahun 2003 yang mencapai Rp. 3.279.033,-. Sedangkan income perkapita Kabupaten Lamongan berdasarkan atas dasar harga berlaku pada tahun 2004 mencapai Rp. 3.368.549,- atau meningkat 8,27 % dibanding tahun 2003 yang mencapai Rp. 3.111.146,-.

B. LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

Akselerasi perekonomian Kabupaten Lamongan tahun 2005 s/d 2006 akan banyak dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal, meliputi : (1) Meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang menciptakan peluang usaha lebih besar dan menuntut daya saing perekonomian yang lebih tinggi; (2) Dampak krisis ekonomi nasional meskipun dirasakan berangsur membaik, namun demikian potensi ketidakpastian eksternal tetap ada yang antara lain berasal dari fluktuasinya nilai tukar rupiah.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Lamongan dalam dua tahun mendatang, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang diharapkan berlangsung secara aman, tertib dan kondusif, dengan diikuti kapasitas politik yang mantap; (2) Kepala Daerah terpilih secara langsung oleh rakyat, memiliki dorongan yang kuat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang kuat dan kapabel, yang pada gilirannya akan menciptakan tatanan perekonomian yang lebih mantap; (3) Tumbuh dan berkembangnya pengelolaan serta pemanfaatan potensi sumberdaya alam melalui introduksi teknologi dan pemberdayaan sumberdaya manusia.

C. TANTANGAN POKOK

Dari hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2004, kondisi ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2005-2006. Tantangan-tantangan pokok tersebut antara lain :

- ⇒ Mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan harapan agar pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- ⇒ Mengoptimalkan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan.

D. PROSPEK EKONOMI 2005-2006

Pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Badan Pusat Statistik memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan masing-masing mencapai 4,04% dan realisasinya sedikit di atas angka kisaran tersebut yakni 4,06 %. Lebih tingginya angka realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan tersebut antara lain disumbangkan oleh semua sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5 %, kecuali sektor pertanian dan industri pengolahan masing-masing tumbuh sebesar 1,08 % dan 2,23 %. Oleh karena sektor pertanian memiliki kontribusi sangat besar dalam struktur perekonomian daerah, sedangkan pertumbuhannya kecil, maka secara keseluruhan akan mempengaruhi tingkat pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan tahun 2004 sebesar 4,06 %.

Sumber pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2005 dan 2006, jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar dibandingkan dengan tahun 2004. Sektor listrik, gas dan air bersih, sektor industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaaan dan jasa perusahaan akan tetap memberikan sumbangan positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan. Sedangkan sektor-sektor yang melambat pertumbuhannya (sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan jasa-jasa) diharapkan dapat segera dilakukan pembenahan-pembenahan internal dan eksternal serta terobosan kebijakan baik dari tingkat nasional, provinsi terlebih oleh tingkat daerah agar dapat segera menemukan solusi untuk mengatasi menurunnya pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut.

Sementara itu, pemilihan Kepala Daerah secara langsung (PILKADA) yang akan dilaksanakan 30 Juni 2005 diharapkan menjadikan stimulus bagi perekonomian Kabupaten Lamongan terutama pada sektor perdagangan dan pertanian mengingat tingginya aktivitas ekonomi dan perdagangan masyarakat dalam dinamika kehidupan dewasa ini.

Khusus sektor pertanian, selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami trend pertumbuhan yang terus menurun. Pada tahun 2000 dicapai pertumbuhan 2,38 %, sedangkan pada tahun 2004 menurun mencapai angka pertumbuhan 1,08 %. Kondisi ini ditinjau dari aspek tujuan pembangunan telah sejalan dimana salah satu tujuan pembangunan di bidang ekonomi adalah adanya pergeseran struktur ekonomi yakni dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

BAB III

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006

Penentuan skala prioritas pembangunan di daerah berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 serta Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar dan acuan pokok penyusunan perencanaan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat mencakup Agenda, Sasaran dan Skala Prioritas Pemerintah Pusat serta Kebijakan dan Program Pemerintah Propinsi Jawa Timur, disamping tetap melihat potensi daerah dan akar masalah di daerah serta berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun-tahun yang lalu, dengan tetap memperhatikan masukan dari aspirasi masyarakat multi Stake Holder yang ada di daerah sebagai wujud dari pola pengembangan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif.

Mendasari terhadap beberapa aturan dan kebijakan yang harus dipedomani tersebut sebagai frame di dalam kerangka penetapan Skala Prioritas Daerah, maka untuk membangun Lamongan kedepan khususnya jangka pendek pembangunan 1 (satu) tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2006 dapat disampaikan sebagai berikut :

A. Meningkatnya rasa aman dan damai melalui :

1. Peningkatan rasa aman dan harmonisasi antar kelompok
2. Pengembangan kebudayaan yang bernilai luhur
3. Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas

B. Meningkatnya keadilan dan penegakan hukum melalui :

1. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk
2. Penghormatan, pemenuhan dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia
3. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak

C. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui :

1. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah
2. Menciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur yang profesional melalui pembinaan karier yang bersih dari intervensi politik
- D. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :**
1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas
 2. Ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan pajak-pajak dan retribusi daerah dari berbagai sektor
 3. Optimalisasi pengelolaan badan-badan usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku
- E. Menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah melalui :**
1. Melanjutkan pembangunan dermaga penyeberangan antar pulau (ASDP)
 2. Melanjutkan pengembangan Lamongan Integrated Sorbase (LIS)
 3. Melanjutkan pembangunan Zona Kawasan Wisata WBL – Goa Maharani
 4. Merealisasikan pembangunan DOK Perkapalan
- F. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan melalui :**
1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas
 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
 3. Peningkatan perlindungan sosial
 4. Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga
 5. Peningkatan kualitas kehidupan beragama
- G. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi melalui :**
1. Pembangunan Pusat Agribis Hasil Bumi di Babat
 2. Merealisasikan Intake Kanan Bengawan Jero, Ring Dike Rawa Jabung, pengendalian banjir dan introsi air laut Kuro Barage
 3. Mewujudkan ketersediaan air baku dari potensi Kali Lamong
 4. Pengembangan Agribis Bidang Pertanian di Wilayah Selatan
 5. Pengembangan Kawasan Industri dan Permukiman Wilayah Lamongan Timur Selatan, antisipasi melubernya pengembangan Surabaya Barat Selatan (Surabaya Metropolitan Area)
 6. Merealisasikan Peluang Infestasi di Kabupaten Lamongan (Hotel, Kawasan Perdagangan, One Stop Service, dll)

7. Peningkatan kualitas produk unggulan daerah, bantuan pendanaan dan pemasarannya
8. Membedah perekonomian desa melalui akses jalan poros desa dan pasar desa

H. Meningkatkan kualitas infra struktur melalui :

1. Memperbaiki kondisi kualitas sarana dan prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten
2. Merealisasikan pembangunan Gerdu Induk PLN dan Instalasi Air Bersih di Pantura
3. Mewujudkan Jalur Lingkar Selatan Pantura untuk mengatasi kemacetan
4. Mewujudkan Jalur Lingkar Utara Lamongan (Ring Road Utara)
5. Mewujudkan Jalur Lingkar Selatan Babat (Ring Road Lintas Wilayah Lamongan - Bojonegoro) dan Pembangunan terminal baru Babat
6. Memfasilitasi masuknya sarana Kereta Api Komuter
7. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
8. Perluasan kapasitas infrastruktur
9. Meningkatkan partisipasi swasta
10. Peningkatan akses kapital penduduk dalam pembangunan dan perbaikan rumah
11. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum pada masyarakat
12. Meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi

I. Menurunnya jumlah penduduk miskin melalui beberapa program yang terintegrasi melalui :

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Revitalisasi pertanian
3. Pemberdayaan Koperasi dan PKM
4. Peningkatan kemampuan IPTEK
5. Perbaikan iklim ketenagakerjaan
6. Pemantapan stabilitas ekonomi makro

J. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah melalui :

1. Pembangunan perdesaan
2. Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah

K. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam melalui :

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam secara efisien, adil dan berkelanjutan.
2. Mencegah kerusakan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
3. Memulihkan kondisi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup

BAB IV

RANCANGAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. ESTIMASI PENDAPATAN DAERAH

Perkembangan Pendapatan Daerah sangat ditentukan kondisi ekonomi, dan perkembangan fiskal pemerintah, serta kebijakan Pemerintah Daerah. Namun demikian kebijakan Pemerintah Pusat sangat mewarnai terhadap perkembangan Pendapatan Daerah, hal ini disebabkan adanya ketergantungan terhadap alokasi Pemerintah Pusat.

Rata-rata Pemerintah Daerah hanya memiliki proporsi 7 persen kapasitas fiskalnya terhadap seluruh pendapatan daerah, hal ini bisa ditunjukkan adanya proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah total Pendapatan Daerah DI Kabupaten Lamongan.

Untuk itu dalam mengurangi ketergantungan fiskal tersebut, Pemerintah Daerah perlu mendorong untuk melakukan kebijakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Melihat kondisi diatas, estmasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2006 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 9,09 persen. Adapun tingkat estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 dapat disajikan dalam Tabel 1 dibawah ini :

TABEL 1
PROSENTASI ESTIMASI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2006

APBD	2004	2005	2006*)
Pendapatan Asli Daerah	12,10%	3,71%	14,00%
Dana perimbangan	4,13%	5,21%	9,00%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-29,77%	-21,74%	0,00%
Pendapatan Daerah	2,29%	3,73%	9,09%

Proyeksi kenaikan 9,09 persen Pendapatan Daerah tersebut, berasal dari beberapa komponen, yakni :

1. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006 diproyeksikan mengalami kenaikan 14 persen apabila dibandingkan dengan kondisi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2005. Kenaikan tersebut karena memperhitungkan kondisi pada Perubahan Pendapatan Asli Daerah yang diestimasikan mengalami kenaikan kurang lebih 2 milyar, atau mengalami kenaikan sebesar 7 %, sehingga apabila dibandingkan dengan kondisi APBD Tahun 2005, estimasi tahun 2006 didapat 14 persen.
2. Dana Perimbangan diperkirakan mengalami kenaikan 9 persen, dengan memperhatikan tingkat kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Perimbangan Pemerintah Propinsi.
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah diproyeksikan tidak mengalami kenaikan karena komponen ini terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat esensial.

Adapun besaran kuantitatif estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 dapat dikemukakan sebagai berikut :

TABEL 2
ESTIMASI KUANTITATIF
PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

APBD	2004	2005	2006
Pendapatan Asli Daerah	34.864.317.550,00	36.156.457.550,00	41.218.361.607,00
Dana perimbangan	346.711.247.000,00	364.791.247.000,00	397.622.459.230,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	20.150.948.000,00	15.770.000.000,00	15.770.000.000,00
Pendapatan Daerah	401.726.512.550,00	416.717.704.550,00	454.610.820.837,00

B. ESTIMASI BELANJA DAERAH

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan pembangunan pada Pemerintah. Sebagai suatu kebijakan maka besaran belanja sangat dipengaruhi oleh besaran kapasitas fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dengan didasarkan pada estimasi Pendapatan Daerah diatas, prosentase kenaikan pada Belanja Daerah dapat disajikan sebagai berikut :

TABEL 3
PROSENTASI ESTIMASI BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2006

APBD	2004	2005	2006*)
Belanja	5,72%	-1,75%	7,22%
Aparatur Daerah	0,02%	-9,89%	5,81%
Belanja AU	6,85%	4,93%	7,00%
Belanja O dan P	8,94%	-11,37%	-5,00%
Belanja Modal	-23,37%	-71,26%	3,00%
Pelayanan Publik	7,92%	1,16%	7,67%
Belanja AU	2,84%	1,00%	7,00%
Belanja O dan P	19,37%	-28,55%	-5,00%
Belanja Modal	-19,89%	-20,22%	2,00%
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	52,18%	25,04%	20,00%
Belanja Tidak Tersangka	-18,01%	110,71%	-50,00%

Sedangkan estimasi kuantitatifnya dapat disajikan pada Tabel 4, dibawah ini :

TABEL 4
ESTIMASI KUANTITATIF
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

APBD	2004	2005	2006
Belanja	436.288.089.500,00	428.663.173.665,00	459.609.546.943,55
Aparatur Daerah	114.948.407.800,00	103.581.190.765,00	109.599.870.590,55
Belanja AU	85.214.857.800,00	89.415.847.765,00	95.674.957.108,55
Belanja O dan P	9.384.498.310,00	8.317.372.600,00	7.901.503.970,00
Belanja Modal	20.349.051.690,00	5.847.970.400,00	6.023.409.512,00
Pelayanan Publik	321.339.681.700,00	325.081.982.900,00	350.009.676.353,00
Belanja AU	191.676.092.700,00	193.595.097.900,00	207.146.754.753,00
Belanja O dan P	35.754.832.000,00	25.545.932.000,00	24.268.635.400,00
Belanja Modal	30.671.912.000,00	24.471.430.000,00	24.960.858.600,00
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	60.436.845.000,00	75.569.523.000,00	90.683.427.600,00
Belanja Tidak Tersangka	2.800.000.000,00	5.900.000.000,00	2.950.000.000,00

BAB V

RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN

Komplesitas Permasalahan yang dihadapi oleh daerah, menuntut adanya kreativitas dari Penyelenggara Pemerintahan di Daerah untuk lebih jeli dalam mengembangkan daya kreatif dan inovatif untuk menjawab segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah.

Permasalahan mendasar yang perlu dan tetap harus diwaspadai dan diperhatikan adalah adanya pergeseran budaya dan perilaku masyarakat yang lebih cenderung hanya menuntut hak-haknya selaku warga masyarakat, dibandingkan dengan pemenuhan terhadap kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat.

Kemajuan pembangunan dibidang teknologi informasi yang cukup pesat, melalui transparansi di berbagai bidang dapat mendorong masyarakat melakukan berbagai upaya yang bermuara untuk selalu mengkritisi terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

Untuk menghindari terhadap berbagai hal yang menyangkut segala permasalahan tersebut, upaya yang harus dilakukan adalah perlunya sebuah konsep perencanaan yang komprehensif dan menyentuh pada semua lapisan masyarakat, khususnya terhadap permasalahan kebutuhan akan hak-hak dasar masyarakat.

Agar sebuah perencanaan memenuhi azas pemerataan, keadilan dan transparansi, pertimbangan utama yang harus dilakukan dalam penentuan skala prioritas pembangunan adalah memperhatikan potensi dan kondisi daerah serta akar permasalahan yang dihadapi daerah, untuk itu agar memudahkan pemahaman terhadap rancangan kerja serta besaran pendanaan yang dibutuhkan, dikelompokkan pada 21 Bidang Pembangunan sebagaimana kewenangan yang diberikan pada daerah sesuai Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 sebagai berikut :

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah yang mendasari pelaksanaan otonomi di daerah merupakan sebuah harapan dan tantangan bagi daerah. Perubahan yang mendasar, adalah daerah telah memiliki keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di daerah, termasuk mengatur dan mengelola Administrasi Umum Pemerintah yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta disesuaikan dengan kondisi setempat. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut jeli didalam memanfaatkan potensi yang ada, untuk digali dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Sebagai Implementasi dari bentuk kewenangan tersebut, maka dibutuhkan adanya kreativitas bagi daerah untuk dapat, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya agar pengelolaannya dapat memberikan hasil guna yang diharapkan. Untuk itu tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan Administrasi Umum Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan kehendak dokumen Perencanaan Umum Daerah, baik Poldas, Propeda, Renstra serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Khusus Kewenangan Pembangunan Bidang Administrasi Umum, maka beberapa sub bidang tercakup didalamnya dan dioperasikan oleh Unit-unit Satuan Kerja meliputi : Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah, DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengawas Daerah, Badan Keuangan dan Barang Daerah, Kantor Perijinan, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Infokom dan Kantor PDE, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Kesbang dan Linmas, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pasar Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan.

B. KONDISI UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah selalu diarahkan untuk lebih meningkatkan suatu pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kemampuan dan profesional aparatur serta dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang sangat mutlak diperlukan.

Perkembangan terakhir sejak era reformasi bergulir sistem, mekanisme dan kelembagaan pemerintah berkali-kali mengalami perubahan utk menuju pd sistem konsep tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang ramping struktur kaya fungsi.

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perkembangan terakhir jumlah kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Lamongan ada 12 Dinas, 15 lembaga terkait daerah (Badan/Kantor), Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan, dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur dari unsur PNS sebanyak 11.125 personil atau dengan dibantu tenaga kontrak sebanyak 840 personil.

Akibat dari berbagai perubahan kelembagaan yang berdampak pada terjadinya merger antar lembaga, maka ada beberapa kelembagaan yang secara proposional kurang memperoleh dukungan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana perkantoran maupun sarana-sarana lain yang menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran maupun tugas lapangan.

Dalam ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hubungan kerja (koordinasi) antar lembaga unit kerja Pemerintah Daerah berjalan mantap, hubungan Kepala Daerah dengan DPRD berjalan dengan baik, serasi dan harmonis, keterlibatan dan pelayanan administrasi telah disusun baik meliputi : Tata Naskah Dinas, Waskat, Lakip, Program Kerja, Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja, Tata Ruang, Standart Pelayanan Minimal dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan program pengawasan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dengan mendorong adanya sinergi pengecekan dan pengujian silang dari pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat yang bermuara terhadap pengawasan melekat.

Kabupaten Lamongan yang memiliki 27 kecamatan dengan 474 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk Tahun 2004 sebanyak 1.224.817 jiwa dengan luas wilayah 1.812,80 km, masih memiliki penduduk miskin sebanyak 73.708 rumah tangga miskin dari 293.944 rumah tangga yang ada, untuk itu ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era mendatang.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan terwujudnya sistem kepegawaian yang mantap dengan pengembangan karier berdasarkan prestasi kerja, kemampuan dan profesional.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja terhadap pencapaian pelaksanaan tugas;
- b. Menekan hingga sekecil mungkin penyalagunaan wewenang dan kebocoran serta pemborosan keuangan negara dari segala bentuk penyimpangan;
- c. meningkatkan kemampuan aparatur dalam merangsang peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang ditunjang oleh peningkatan efisiensi dan pendayagunaan apartur pemerintah dan peningkatan serta penyempumaan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama aparatur pemerintah di daerah baik aparatur pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan pembangunan apartur pemerintah yang mantap;
- e. Meningkatkan pendayagunaan sistem pengawasan dan efektifitas pelaksanaan melalui pembimbingan, pengarahan, pengendalian dan penertiban yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur pemerintah;
- f. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan profesional tidak menyalahgunakan wewenang, bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme;
- g. Tertatanya manajemen aparatur pemerintah di daerah yang mampu berperan dalam meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan masyarakat.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Administrasi Umum Pemerintahan memiliki Arah dan kebijakan Umum antara lain meliputi : **1. Pemantapan pelaksanaan Otonomi Daerah** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan kemampuan keuangan daerah, b) Tersedianya kelembagaan organisasi sesuai dengan kebutuhan, c) Tersedianya sisdur metode kerja d) Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah. **2. Pemantapan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kabupaten** dengan strategi dan prioritas a) Terwujudnya penataan kelembagaan perangkat Daerah dan pengidentifikasian tugas jabatan, b) Terlaksananya sistem dan prosedur pelayanan publik serta ketatalaksanaan sistem perkantoran, c) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pendayagunaan aparatur. **3. Peningkatan peran DPRD dan pemantapan tata kerja DPRD** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan produk-produk DPRD, b) Peningkatan kapasitas SDM DPRD, c)

Administrasi Umum dan Kualitas Pelayanan dengan strategi dan prioritas a) Tersedianya SDM Aparatur yang profesional, b) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional, c) Peningkatan kesejahteraan aparatur.

5. Terwujudnya pemantapan kooordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah dengan strategi dan prioritas a) Terjalannya kemitraan kerja eksekutif – legislatif – NGO'S, b) Terjalannya keharmonisan hubungan antara sesama anggota Muspida, c) Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, d) Memfasilitasi keberadaan NGO'S.

6. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dengan strategi dan prioritas a) Meningkatnya pemahaman dan kualitas dalam pelaksanaan budaya politik yang baik dan demokratis, b) Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional, c) Terbangunnya komunikasi politik yang harmonis di daerah, d) Peningkatan pemahaman tentang HAM, e) Melakukan kajian strategis dibidang politik, sosial ekonomi dan sosial budaya, f) Menjalin hubungan kemitraan dengan multi stake holder di daerah, g) Peningkatan Pendidikan Politik.

7. Peningkatan pembinaan kehidupan beragama dengan strategi dan prioritas a) Optimalisasi pembinaan dan bimbingan kerukunan hidup umat beragama, b) Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan (Pendidikan dan tempat ibadah), c) Temu akrab para pemuka agama.

8. Peningkatan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana informasi masyarakat, b) Terjalannya hubungan kemitraan dengan pers, c) Pemberdayaan kelompok komunitas masyarakat melalui pelaksanaan seminar/lokakarya/sarasean dan diskusi serta pelatihan, d) Peningkatan penyebaran informasi dalam bentuk penerbitan, pemutaran film, siaran radio, siaran keliling, pameran foto pembangunan dan pembinaan pertunjukan rakyat, e) Peningkatan pengelolaan dokumentasi dan arsip daerah, f) Peningkatan operasional perpustakaan umum dan perpustakaan keliling milik daerah, g) Peningkatan sistem jaringan informasi perpustakaan dan kearsipan daerah.

9. Peningkatan sistem jaringan dokumentasi, informasi hukum, bantuan hukum dan produk-produk hukum dengan strategi dan prioritas a) Pengembangan sistem jaringan dokumentasi hukum dan sarana hukum, b) Pembentukan transparansi produk hukum daerah, c) Peningkatan sosialisasi, penyuluhan hukum dan pembinaan KADARKUM, d) Pemberian bantuan hukum kepada penyelenggara pemerintahan di Daerah.

10. Pemantapan pelaksanaan pembangunan daerah dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi) dalam pelaksanaan pembangunan daerah, b) Peningkatan pelaksanaan Penyusunan Program Administrasi Pembangunan Daerah, c) Peningkatan pengendalian pembangunan daerah, d) Intensifikasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah,

e) Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerah. **11. Peningkatan perekonomian daerah** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pelayanan dalam permodalan usaha masyarakat, b) Penataan dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian, c) Mengembangkan usaha-usaha ekonomi masyarakat, d) Ketersediaan sarana informasi dibidang bisnis, e) Terciptanya produk hukum sebagai regulasi bagi dunia usaha, f) Terbangunnya sentra-sentra industri kecil, g) Terbangunnya sarana dan prasarana terminal agro bisnis pada tempat-tempat strategis sesuai dengan potensi, h) Menggali dan memanfaatkan potensi daerah sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

12. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan diklat yang memiliki kompetensi dan mekanisme yang jelas, b) Peningkatan pengolahan data dan pelayanan informasi kepegawaian, c) Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian yang cepat dan tepat, d) Pemenuhan jumlah pegawai sesuai kebutuhan nyata dan profesionalisme, e) Peningkatan manajemen dan ketatausahaan kepegawaian, f) Peningkatan pengembangan karier PNS secara profesional dan berkesinambungan, g) Peningkatan kedisiplinan pegawai, h) Peningkatan kesejahteraan pegawai, i) Pembinaan dan pengawasan kepegawaian melalui sistem pembinaan karier dan prestasi kerja.

13. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dengan strategi dan prioritas a) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja, b) Terbangunnya analisa kebutuhan barang, c) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, d) Inventarisasi dan pengendalian aset-aset daerah, e) Pembangunan sistem informasi manajemen barang-barang daerah yang secara maksimal dapat merekam aset-aset daerah.

14. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sek-retaris Daerah sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pelaksanaan operasional penyelenggaraan rumah-tangga pejabat daerah, b) Peningkatan sarana gedung tempat tinggal/tempat kerja beserta fasilitas pendukung lainnya yang representatif, c) Optimalisasi sistem pemeliharaan gedung/tempat tinggal/kantor dan pelayanan sarana transportasi dinas.

15. Pemantapan perencanaan pembangunan daerah dengan strategi dan prioritas a) Terbangunnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang kredible, b) Peningkatan kualitas produk kebijakan publik, c) Peningkatan kualitas produk perencanaan yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat, d) Keterlibatan multi stake holder dalam proses perencanaan pembangunan, e) Terbangunnya KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi) lintas sektor dan instansi, f) Peningkatan hasil kajian dan penelitian Pembangunan daerah, g) Keterlibatan perguruan tinggi setempat dalam berbagai kerjasama penelitian dalam rangka pemberdayaan perguruan tinggi lokal, h) Peningkatan SDM Aparatur Perencanaan yang profesional.

16. Peningkatan

kualitas pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan pengelolaan barang daerah secara efisien dan efektif dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis standar akuntansi keuangan daerah, b) Pemantapan pelaksanaan penyusunan APBD yang berbasis anggaran kinerja, c) Pemantapan pelaksanaan pencatatan keuangan daerah yang berbasis sistem akuntansi double entry, akuntabilitas dan acceptable, d) Melaksanakan keterpaduan sistem informasi keuangan Daerah, e) Peningkatan kualitas pelayanan di bidang keuangan yang cepat dan tepat, f) Peningkatkan SDM pengelola keuangan daerah secara profesional, g) Peningkatan pengembangan usaha perusahaan daerah, h) Pendataan secara akurat barang-barang inventaris milik Pemerintah Daerah sebagai aset daerah, i) Peningkatan pemanfaatan aset-aset daerah, j) Membangun sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA), k) Terbangunnya sistem analisa kebutuhan barang, l) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja, m) Pengendalian dan pengawasan aset-aset daerah.

17. Peningkatan pendapatan daerah dengan strategi dan prioritas a) Pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi daerah, dan PBB, b) Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah meliputi PAD, PBB dan Dana Perimbangan, c) Penyusunan dan penerapan sistem dan prosedur (Sisdur) Administrasi penerimaan dan penyeteroran pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain, d) Pembinaan teknik melalui pelatihan, kursus dan diklat tentang manajemen pengelolaan pendapatan daerah, e) Membangun jaringan system informasi pendapatan daerah (Revenue Information System Network) f) Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak, retribusi daerah terhadap obyek/subyek pungutan baru, g) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

18. Peningkatan kualitas pengawasan daerah dengan strategi dan prioritas a) Optimalisasi pendayagunaan sistem pengawasan fungsional melalui pengawasan reguler, insidentil maupun khusus, b) Optimalisasi pemantauan pada instansi perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik, c) Klarifikasi kasus-kasus pengaduan masyarakat, d) Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

19. Membangun jaringan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika) antara pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis dengan strategi dan prioritas a) Tersedianya sarana dan prasarana perangkat Telematika, b) Tersedianya sarana jaringan komunikasi data, c) Tersedianya aplikasi secara bertahap yang mencakup semua bidang, d) Tersedianya sarana dan prasarana sandi dan radiogram.

20. Peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa/Kelurahan dengan strategi dan prioritas a) Pembinaan aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan, b) Pembinaan administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, c) Ketersediaan dukungan fasilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan, d) Monitoring

dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, e) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa/Kel, f) Peningkatan kualitas forum musyawarah pembangunan desa, g) Peningkatan kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan, h) Peningkatan SDM Perangkat Desa/Kelurahan, i) Peningkatan pemberian bantuan tanah kas desa pada desa-desa miskin, j) Peningkatan pemberian bantuan dana dan managerial pada desa-desa miskin. **21. Peningkatan ketentraman, ketertiban masyarakat dan penegakan peraturan daerah** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan SDM lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, b) Mendorong terwujudnya swadaya mumi masyarakat dalam menunjang Program Pembangunan Desa, c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, d) Mempersiapkan masyarakat untuk dapat menyerap Alih Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan SDA, e) Penataan perumahan, pemukiman dan kawasan (terpadu dan pesisir/pantai), f) Peningkatan program pengentasan kemiskinan di Desa/Kelurahan, g) Peningkatan peran masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa, h) Peningkatan bantuan dana pembangunan Desa/Kelurahan secara langsung, i) Peningkatan bantuan dana bagi Pemerintah Desa, BPD dan LPM, j) Peningkatan program pembinaan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja, k) Pendayagunaan pendataan profil Desa/Kelurahan dalam peningkatan pembangunan Desa, l) Pelaksanaan evaluasi pembangunan Desa/Kelurahan, m) Menfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pedesaan guna menunjang Bina Usaha Lingkungan dan Manusia. **22) Peningkatan ketentraman, ketertiban, Keamanan masyarakat dan penegakan peraturan daerah** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan SDM Pol PP melalui pendidikan dan latihan, b) Meningkatkan pembinaan ketentraman, Ketertiban masyarakat dan kesamaptaan, c) Meningkatkan perlindungan masyarakat akan keamanan, d) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana operasional Pol PP, e) Kemandirian personil dalam tugas operasional, f) Peningkatan kesejahteraan personil Pol PP, g) Meningkatkan penegakan peraturan daerah

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Administrasi Umum sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

Bidang : UMUM PEMERINTAHAN

NO	PROJEK/KELOMPOK DAERAH	KODE PROGRAM	KELASIFIKASI	LOKASI	KUANTITAS	UNIT	PERHITUNGAN BIAYA	REKAPITULASI (Rp.)	USULAN BELANJA
1	Pengadaan kendaraan bermotor daerah	A.1.a	1. Pembelian kendaraan bermotor daerah	Kab. Lamongan	40 orang	Rp	40.000.000,00	Lampiran	Pengadaan
			2. Sewa/menyewa kendaraan bermotor bagi pegawai BPD dan LPN	27 Kecamatan	1.031 orang	Rp	42.500.000,00	Lampiran	Pengadaan
			3. Pembelian Buku Pengantar Pengantar	Kab. Lamongan	3 buku	Rp	40.000.000,00	Lampiran	Pengadaan
			4. Pembelian alat transportasi pengantar, tarif pengantar dan waktu perjalanan pengantar	Kab. Lamongan	2.500 waktu	Rp	25.000.000,00	Satu	Pengadaan
2	Terselenggaranya kegiatan organisasi sesuai dengan kebutuhan	A.1.b	1. Pengadaan mobil dinas untuk ke Survei	Kab. Lamongan	1 unit	Rp	175.000.000,00	Satu	Pengadaan
			2. Pengadaan sepeda motor dinas Honda 150 cc untuk kegiatan pelayanan masyarakat	27 Kecamatan	27 unit	Rp	283.500.000,00	Satu	Pengadaan
			3. Pengadaan sepeda motor dinas Honda 150 cc untuk kantor Pengantar	Kab. Lamongan	2 unit	Rp	22.000.000,00	Satu	Pengadaan
			4. Pengeluaran kantor pengantar	Kab. Lamongan	1 unit lengkap	LS		Satu	Pengadaan
			5. Peng. lain-lain yang	Kab. Lamongan	1 unit	Rp	5.000.000,00	Satu	Pengadaan
3	Terselenggaranya pelayanan administrasi Pengantar dan pengantarkeluarga ke desa	A.2.a	1. Pembelian dan pengadaan alat tulis kantor	Kabupaten Lamongan	10 unit lengkap	Rp	50.000.000,00	Lampiran	Budget Organisasi
			2. Suku cadang servis servis mesin	Kabupaten Lamongan	40 orang	Rp	50.000.000,00	Lampiran	Budget Organisasi
			3. Pengadaan sistem informasi pengantar	Kabupaten Lamongan	5 unit lengkap	Rp	50.000.000,00	Lampiran	Budget Organisasi
			4. Pengadaan pemrosesan dokumen PNS berdasarkan hasil A/LUB	Kabupaten Lamongan	20 unit lengkap	Rp	100.000.000,00	Lampiran	Budget Organisasi
4	Pengeluaran produksi produk DPRD	A.3.a	1. Pengeluaran untuk cetak DPRD	Kabupaten Lamongan	-	Rp	50.000.000,00	Satu	Kebijakan
5	Terselenggaranya SCM April 2006, ang. profesional	A.4.a	1. Pembelian Angk. Karyawan, ke Kab. Lamongan	Kabupaten Lamongan	27 Pns	Rp	50.000.000,00	Satu	Budget Pns
5	Terselenggaranya servis dan pemrosesan pelayanan administrasi	A.4.b	1. Kebutuhan dan kebutuhan B/C 2001-2005 untuk Sekretariat Daerah Kab. Lamongan	Kabupaten Lamongan	1 unit lengkap	Rp	175.000.000,00	Lampiran	Budget Organisasi
			2. Kebutuhan B/C 2001-2005 untuk BPASD Di Sragen	Kabupaten Lamongan	1 unit lengkap	Rp	40.000.000,00	Lampiran	Budget Organisasi

NO	PROJEKSI DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN BIAYA	KETERANGAN (M)	URUTAN SETIAP
18	Peningkatan pengelompokan dokumen dan arsip daerah	A.11	8. Peningkatan : Terdapat Surat Lamsang Buku Amdas Data Kecamatan Peningkatan Lamsang Kumpulan Kumpulan Jurnal Sedang Urutan MPN	Kecamatan Lamsang Kecamatan Lamsang Kecamatan Lamsang Kecamatan Lamsang Kecamatan Lamsang Kecamatan Lamsang	72.000 Eksp 1.500 Eksp 2.000 Eksp 2.000 Eksp 2.000 Eksp 1.000 Eksp	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	Kantor Induk Kantor Induk Kantor Induk Kantor Induk Kantor Induk Kantor Induk	
19	Peningkatan operasional Pengumpulan Urutan dan Pengumpulan buku	A.12	1. Peningkatan buku dan barang keluar dan dokumen, Peningkatan kearsifan 2. Peningkatan arsip n-asi	Kab. Lamsang Kab. Lamsang	- 37 m3	Rp Rp	Bag. Humas Asy/Pengut	
20	Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah	A.13	1. Peningkatan sistem pengelompokan Urutan 2. Peningkatan sistem pengelompokan Lamsang	Kab. Lamsang Kab. Lamsang	27.000 orang 27.000 orang	Rp Rp	Asy/Pengut Asy/Pengut	
21	Peningkatan transparansi produk hukum daerah	A.14	1. Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah 2. Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah	Kecamatan Lamsang Kecamatan Lamsang	170 LD 170.000	Rp Rp	Bag. Humas Bag. Humas	
22	Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah	A.15	1. Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah 2. Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah	Kecamatan Lamsang Kecamatan Lamsang	75 orang 40 orang	Rp Rp	Bag. Humas Bag. Humas	
23	Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah	A.16	1. Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah 2. Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah	Kecamatan Lamsang Kecamatan Lamsang	1.200 orang -	Rp Rp	Bag. Humas Bag. Humas	
24	Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah	A.17	1. Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah 2. Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah	Kab. Lamsang Kab. Lamsang	22 Unit Kapsul 22 Unit Kapsul	Rp Rp	Bag. Humas Bag. Humas	
25	Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah	A.18	1. Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah 2. Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah	Kab. Lamsang Kab. Lamsang	22 Unit Kapsul 22 Unit Kapsul	Rp Rp	Bag. Humas Bag. Humas	
26	Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah	A.19	1. Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah 2. Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah	Kab. Lamsang Kab. Lamsang	22 Unit Kapsul 22 Unit Kapsul	Rp Rp	Bag. Humas Bag. Humas	
27	Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah	A.20	1. Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah 2. Peningkatan sistem pengelompokan dokumen dan arsip daerah	Kab. Lamsang Kab. Lamsang	22 Unit Kapsul 22 Unit Kapsul	Rp Rp	Bag. Humas Bag. Humas	

NO.	PERIKLASS DARI	KODE PROSES	KESIMPULAN	LOKASI	VOLUME	PENGHARGAAN (Rp)	KETERANGAN (M)	BIAYA (Rp)
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	2. Pengembangan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	Dit. Kelengkapan Kec. Kelengkapan Dit. Kelengkapan Kec. Kelengkapan Dit. Kelengkapan Kec. Kelengkapan	2 orang	450.000.000,00	Batu	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	4. Pengembangan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	Buku, Teks, Lainnya	6 x 12	150.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	5. Pengembangan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	Pelaku, jukla, Monev, Tindak	- Tindak lanjut - Monev - Tindak lanjut - Tindak lanjut	45.750.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00	Batu	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	1. Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap	Kec. Kelengkapan	52 unit	20.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	1. Desain Struktur, Diagram, B. M	Kec. Kelengkapan	54 orang	437.300.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	2. Desain Teknik Fungsional	Kec. Kelengkapan	20 orang	700.000.000,00	Batu	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	3. Desain Perencanaan dan Laporan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	4. Perencanaan dan pelaksanaan penelitian	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	5. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	6. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	7. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	8. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	9. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	10. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	11. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	12. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	13. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	14. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	15. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	16. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	17. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	18. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	19. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00
20	Mengembangkan sistem yang memiliki laporan dan informasi yang lengkap	A.11 c	20. Pelaksanaan kegiatan	Kec. Kelengkapan	20 orang	250.000.000,00	Lampiran	100.000.000,00

NO	REPERTRAS DASAR	KODE PRODUK	LOKASI/LOKASI	LOKASI	VOLUME	PERIODAS BAYAR	AS TRIMASAR (MS)	UNITAS BAYAR
32	Perbaikan jaring pagar selud industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaring pagar selud industri jenis der profesional	Kubupaten Lamongan	150 orang	Rp	75.000.000.00	Bayar Organisasi
33	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	Kubupaten Lamongan	200 orang	Rp	100.000.000.00	Bayar Organisasi
34	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	Kubupaten Lamongan	1 tahun	Rp	50.000.000.00	Bayar Organisasi
35	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	BKD	4 unit komputer, 5 unit meja dan 2 unit kursi belajar	Rp	30.000.000.00	BKD
36	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	BKD	200 orang	Rp	265.000.000.00	BKD
37	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	Kubupaten Lamongan	100 orang/100 unit kerja	Rp	100.000.000.00	BKD
38	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	BKD	150 orang	Rp	25.000.000.00	BKD
39	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	BKD	2.500 orang	Rp	30.000.000.00	BKD
40	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	Kubupaten Lamongan	-	Rp	40.000.000.00	BKD
41	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	Kubupaten Lamongan	200 orang	Rp	1.700.000.000.00	BKD
42	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	Kubupaten Lamongan	2.800 orang	Rp	36.000.000.00	BKD
43	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	Kubupaten Lamongan	1 unit (112 m2)	Rp	586.000.000.00	Dalam Rangka
44	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	Brondong, Dalem, Sukun, Lurah, Tirt, Pusk	6 unit	Rp	600.000.000.00	Dalam Rangka
45	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	Melaku, Ngimbang, Kibungreng, Salsabell, Pucun	6 unit	Rp	180.000.000.00	Dalam Rangka
46	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Lamongan	12 unit	Rp	180.000.000.00	Dalam Rangka
47	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	Sukun, Sukun	21 unit	Rp	465.000.000.00	Dalam Rangka
48	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	A.12.1	Perbaikan jaringan der industri jenis der profesional	Karangreng, Sukun, Sukun	3 unit	Rp	30.000.000.00	Dalam Rangka

NO.	PROSES DASAR	KODE PRODUK	KELOMPOK PRODUK	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN BIAYA	KELOMPOK (BL)	DESKRIPSI INSTANSI
7	Pemasangan titik dan beton, PDAM Kantor KCD			Sekeloa	1 unit	Rp 5.000.000,00	Baru	Dasar
8	Revisi dan pengisian Sub Dinas Pengembangan SDU dan Pengisian / KCD Lembang			Kabupaten Lembang	1 unit	Rp 50.000.000,00	Baru	Dasar
9	Pengisian kendaraan dinas roda empat			Kabupaten Lembang	1 unit	Rp 200.000.000,00	Baru	Dasar
10	Pembangunan gedung Dinas Pendidikan Kab. Lembang			Kab. Lembang	2 lantai	Rp 2.500.000.000,00	Baru	Indagap
11	Pengisian variabel dan kantor UPT Dinas KB dan Kueso			Kecamatan Solikua Kecamatan Bluk	8 x 15m 10 x 20 m	Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00	Baru Baru	KB dan Kueso KB dan Kueso
12	Pengisian kantor UPT Dinas KB dan Kueso			Kecamatan Medura Kecamatan Bad Kecamatan Samping Kecamatan Pican	8 x 8 m 1 unit 10 x 8 m 6 x 8 m	Rp 75.000.000,00 Rp 90.000.000,00 Rp 90.000.000,00 Rp 50.000.000,00	Baru Baru Baru Baru	KB dan Kueso KB dan Kueso KB dan Kueso KB dan Kueso
13	Pembangunan jembatan kantor UPT Dinas KB dan Kueso			Kecamatan Dusat	4 x 3 m	Rp 20.000.000,00	Baru	KB dan Kueso
14	Rehabilitasi kantor UPT Dinas KB dan Kueso			Kecamatan Mado Kecamatan Tungg Kecamatan Gajah Kecamatan Lari Kecamatan Sugo Kecamatan Kijang Kecamatan Lembang Kecamatan Lembang	6 x 12 m 1 unit 6,5 x 14,5 m 28,5 m 5 x 8 m 1 unit 200 m UPT KB & Peralat	Rp 30.000.000,00 Rp 7.500.000,00 Rp 90.000.000,00 Rp 90.000.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 25.000.000,00	Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru	KB dan Kueso KB dan Kueso KB dan Kueso KB dan Kueso KB dan Kueso KB dan Kueso KB dan Kueso KB dan Kueso
15	Pengisian komputer			Dinas KB dan Kueso, Kueso, Pican, Solikua, Bluk, Sugo, Lari	7 unit	Rp 90.000.000,00	Baru	KB dan Kueso
16	Pengisian kendaraan roda 2			Dinas KB dan Kueso, Kueso, Pican, Solikua, Bluk, Sugo, Lari	10 unit	Rp 100.000.000,00	Baru	KB dan Kueso
17	Pengisian meja, kursi dan lain-lain			Dinas KB dan Kueso, UPT Kueso, Solikua, Medura	5 unit / 17 Set / 2 Unit	Rp 30.000.000,00	Baru	KB dan Kueso
18	Pembangunan / Rehabilitasi pendopo, kantor dan rumah dinas umum			14 kecamatan di Kabupaten	14 lot x Rp 75.000.000,-	Rp 1.050.000.000,00	Baru	Bangun Puan
19	Pembangunan lokal bers. untuk SAKUBA kecamatan			5 kecamatan	5 lot x Rp 50.000.000,-	Rp 250.000.000,00	Baru	Bangun Puan

NO	REKAM JEKAL BAKU	NOPEK JEKAL BAKU	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BAKU	KETERANGAN	REKAM JEKAL BAKU
20	Berkas pembangunan perumahan SAMUDRA	13 hektar	13 hektar	13 ha x Rp 8.000.000,-	86.000.000.000	Baru	Berkas Baru
21	Pembangunan UPT Kantor Kecamatan (Berkas)	1 hektar	1 hektar	1 ha x Rp 75.000.000,-	375.000.000.000	Baru	Berkas Baru
22	Pembangunan gedung dan pengkondisian lingkungan kantor	4.000 m2	Kategori Lahan	4.000 m2	43.000.000.000.000	Baru	CIPRO
23	Kompensasi tanah masyarakat	-	Kategori Lahan	-	40.000.000.000	Lanjutan	Berkas Umum
24	Pengadaan Misi Baru	1 unit	Kategori Lahan	1 unit	250.000.000.000	Baru	Berkas Umum
25	Berkas bangunan KUPROPO	-	Kategori Lahan	-	75.000.000.000	Lanjutan	Berkas Umum
26	Pembangunan gedung dan rumah pengantar jalan	1 hektar	RSD Di Sungsai	1 hektar	150.000.000.000	Baru	RSD Sungsai
27	Pengadaan jasa jasa otomatis	1 hektar	RSD Di Sungsai	1 hektar	40.000.000.000	Baru	RSD Sungsai
28	Pembangunan gedung parkir di bagian timur 2	155,5 m2	RSD Di Sungsai	155,5 m2	544.250.000.000	Baru	RSD Sungsai
29	Pembangunan gedung RSD timur 2	225 m2	RSD Di Sungsai	225 m2	822.500.000.000	Baru	RSD Sungsai
30	Pembangunan gedung RS dan Sungsai	100 m2	RSD Di Sungsai	100 m2	280.000.000.000	Baru	RSD Sungsai
31	Pembangunan ruang parkir	420 m2	RSD Di Sungsai	420 m2	735.000.000.000	Baru	RSD Sungsai
32	Pembangunan gedung Ruang Kiri	420 m2	RSD Di Sungsai	420 m2	735.000.000.000	Baru	RSD Sungsai
33	Pembangunan gedung Garam	70 m2	RSD Di Sungsai	70 m2	122.500.000.000	Baru	RSD Sungsai
34	Pembangunan pagar beton - beton	300 m2	RSD Di Sungsai	300 m2	175.000.000.000	Baru	RSD Sungsai
35	Pembangunan Saluran Air	227,5 m2	RSD Di Sungsai	227,5 m2	227.500.000.000	Baru	RSD Sungsai
36	Pembangunan alat angkut Ambulans	1 unit	RSD Di Sungsai	1 unit	360.000.000.000	Baru	RSD Sungsai
37	Pembangunan alat angkut Opti Carry	1 unit	RSD Di Sungsai	1 unit	360.000.000.000	Baru	RSD Sungsai
38	Pembangunan alat angkut Opti Neng	2 unit	RSD Di Sungsai	2 unit	360.000.000.000	Baru	RSD Sungsai
39	Pembangunan alat angkut Sepeda Motor	3 unit	RSD Di Sungsai	3 unit	360.000.000.000	Baru	RSD Sungsai
40	Pembangunan alat komputer	-	RSD Di Sungsai	-	100.000.000.000	Lanjutan	Kategori Lahan
41	Pengadaan sarana dan prasarana Aparatur Umum	-	Kategori Lahan	-	100.000.000.000	Lanjutan	Kategori Lahan

NO.	PROFIT AB DASAR	KODE PRODUK	KESATUAN PRODUK	LOKASI	VOLUME	PURUSAN BAYU	KEPERAWAN (BL)	UTILISASI INSTANSI
47	Pengadaan SCD pengisian tenaga listrik secara profesional	A.16.1	1. Pengadaan tenaga pemangkas bus	Kab. Lamongan		110.000.000,00	Lampiran	SKSD
48	Pengadaan obyek dan subyek pajak, rekayasa daerah dan PMS	A.17.a	1. Pengadaan subyek obyek pajak daerah dan elektifikasi rekayasa daerah a. Pengadaan subyek obyek pajak daerah bering b. Pengadaan subyek obyek rekayasa pelayanan pemerintahan, rekayasa pemangkas	Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan	120 paket kerja sesuai dengan Survei di 10 kecamatan Jasa rekayasa + 7.500 lembar dan Ruang Tangga Pembinaan Kantor RS, dan PPL	100.000.000,00	Baru	Dependa
49	Identifikasi dan analisis sistem informasi pelayanan publik PMS dan Data Pembiayaan	A.17.b	2. Pengadaan Jasa PMS dengan sistem manajemen informasi obyek pajak (Gedung) 1. Studi awal sistem pelayanan daerah ke daerah lain 2. Identifikasi / Estimasi biaya berdasarkan	Kab. Lamongan, Sekeloa Makassar Jawa Tengah dan Jawa Timur Kab. Sukoharjo, Blora, dan Sukoharjo	30.000 obyek pengalihan Jaga 10 Kabupaten	47.000.000,00	Lampiran	Dependa
50	Pengadaan bank, modal, pelatihan, kursus, dan dokumentasi manajemen pelayanan publik daerah	A.17.d	1. Berikan tenaga pelayanan publik dan pelayanan administrasi pelayanan daerah 2. Mendukung dan penerapan sistem informasi manajemen pelayanan daerah (SIMPA-TDA) aplikasi SIMPA-TDA	Kab. Lamongan	40 orang	50.000.000,00	Lampiran	Dependa
51	Pengadaan jasa, modal, pelatihan, kursus, dan dokumentasi manajemen pelayanan publik daerah (Revisi)	A.17.a	1. Mendukung dan penerapan sistem informasi manajemen pelayanan daerah (SIMPA-TDA) aplikasi SIMPA-TDA	Kab. Lamongan	1 unit	450.000.000,00	Baru	Dependa
52	Optimasi pelayanan sistem pelayanan publik pelayanan publik, rekayasa manajemen	A.18.a	1. Melakukan pemantauan dan evaluasi program kerja pelayanan publik (PUP) 2. Pengawasan dan evaluasi dengan metode : Observasi Diskusi Penelitian Observasi dan diskusi dengan TLC SMP Negeri SMP Negeri 3. Pengawasan dan evaluasi pelayanan publik 4. Pengawasan dan evaluasi pelayanan publik	Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan	36 Orang 70 Orang terdiri : 13 Orang 14 Orang 13 Orang 1 Orang 26 Orang 12 Orang	80.000.000,00 70.000.000,00	Baru Baru	Sewa Sewa
			3. Pengawasan dan evaluasi pelayanan publik daerah	Kabupaten Lamongan	Yang dibayar APBN 2008	400.000.000,00	Baru	Sewa
			4. Pengawasan dan evaluasi pelayanan publik	Kabupaten Lamongan	27 Orang	80.000.000,00	Baru	Sewa

NO	PROPOSAL DAFTAR	KODE PROGRAM	KATEGORI	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BIAYA	KETERANGAN (M)	URAIAN KEGIATAN
53	Optimalisasi pemantauan pada sistem pengalihan daerah yang memuat data pemantauan publik	A.18.b	1	Kategori Lain-lain	65 Dik	Rp 100.000.000,00	Baru	Batas
54	Kerjasama pemantauan sistem pemantauan pemantauan nasional	A.18.c	1	Kategori Lain-lain	-	Rp 40.000.000,00	Baru	Batas
55	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDA pemantauan dengan dukungan sistem dan pemantauan yang memadai	A.18.d	1	Kategori Lain-lain	36 orang	Rp 100.000.000,00	Baru	Batas
56	Terdapatnya sarana dan prasarana pemantauan hidrologi	A.18.e	1	Kategori Lain-lain	1 unit	Rp 170.000.000,00	Lanjutan	KPDE
57	Terdapatnya sarana penghubung komunikasi data	A.18.f	1	Kategori Lain-lain	11 unit	Rp 200.000.000,00	Lanjutan	KPDE
58	Terdapatnya sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.g	1	Kategori Lain-lain	10 unit	Rp 300.000.000,00	Lanjutan	KPDE
59	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.h	1	Kategori Lain-lain	102 Dik	Rp 100.000.000,00	Baru	RSD Sogah
60	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.i	1	Kategori Lain-lain	2 unit	Rp 300.000.000,00	Lanjutan	KPDE
61	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.j	1	Kategori Lain-lain	1 unit	Rp 400.000.000,00	Baru	KPDE
62	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.k	1	Kategori Lain-lain	1 unit	Rp 70.000.000,00	Baru	KPDE
63	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.l	1	Kategori Lain-lain	27 unit	Rp 50.000.000,00	Baru	Batas Pem
64	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.m	1	Kategori Lain-lain	301 RT x Rp 5.000.000	Rp 1.500.000.000,00	Baru	Batas Pem
65	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.n	1	Kategori Lain-lain	12 LPM x Rp 3.000.000	Rp 36.000.000,00	Baru	Batas Pem
66	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.o	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
67	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.p	1	Kategori Lain-lain	474 Dik	Rp 65.000.000,00	Lanjutan	Batas Pem
68	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.q	1	Kategori Lain-lain	402 Dik x Rp 40.000.000	Rp 16.080.000.000,00	Baru	Batas Pem
69	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.r	1	Kategori Lain-lain	1461 unit x Rp 30.000.000	Rp 43.830.000.000,00	Baru	Batas Pem
70	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.s	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
71	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.t	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
72	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.u	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
73	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.v	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
74	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.w	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
75	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.x	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
76	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.y	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
77	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.z	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
78	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.aa	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
79	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.ab	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
80	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.ac	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
81	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.ad	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
82	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.ae	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
83	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.af	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
84	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.ag	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
85	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.ah	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
86	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.ai	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
87	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.aj	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
88	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.ak	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
89	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.al	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
90	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.am	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
91	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.an	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
92	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.ao	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
93	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.ap	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
94	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.aq	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
95	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.ar	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
96	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.as	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
97	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.at	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
98	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.au	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
99	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.av	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem
100	Peningkatan sarana penghubung yang memadai untuk bidang	A.18.aw	1	Kategori Lain-lain	10 unit x Rp 40.000.000	Rp 400.000.000,00	Baru	Batas Pem

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/KELOMPOK	LOKASI	VOLUME	PENGHASILAN BAKA	KETERANGAN (RS.)	URAIAN BAKA
77	Peningkatan kemampuan personal Pjd Pjd	A.22.1	1. Lada Pukul 2. Hutan/latihan Ager	Kab. Lingseng Kab. Lingseng	200 orang x 12 bln 200 orang x 12 bln	Rp 204.000.000,00 Rp 144.000.000,00	Lampiran Lampiran	Pjd Pjd Pjd Pjd
78	Meningkatkan kemampuan Peningkatan Daerah	A.22.2	1. Operasi jukdis dan pengujian jukdis	Kab. Lingseng	27 Kecamatan	Rp 150.000.000,00	Lampiran	Pjd Pjd
Jumlah Total						Rp 111.824.000.000,00		

BIDANG PERTANIAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian di Indonesia masih dianggap sebagai bagian terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi. Hal ini semakin disadari ketika bidang pertanian telah mampu menjadi penyelamat perekonomian nasional pada saat terjadi krisis ekonomi dimana pertumbuhannya meningkat sementara pada bidang / sektor lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya bidang pertanian di Indonesia antara lain (1) potensi sumber dayanya yang besar dan beragam; (2) pangsa pasar pendapatan nasional cukup besar; (3) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada bidang ini dan (4) merupakan basis pertumbuhan di wilayah pedesaan. Kondisi demikian juga nampak terjadi di Kabupaten Lamongan dimana sebagian besar penduduknya bergerak pada bidang pertanian.

Dalam arti luas pembangunan di bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang diarahkan pada terwujudnya perekonomian yang tangguh dan berdaya saing sehingga mampu mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, melalui pengembangan sumber daya lokal, peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian serta pengembangan agribisnis.

Bidang pertanian, utamanya pertanian tanaman pangan dan peternakan merupakan sub sektor yang cukup berpengaruh dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan. Bidang pertanian pada tahun 2004 memberikan kontribusi terhadap total PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Lamongan mencapai 43,16 % yang diantaranya ditopang dari sub sektor tanaman pangan sebesar 32,01 % dan dari sub sektor peternakan serta hasil-hasilnya sebesar 1,29 %. Secara umum kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB (ADHK) selama 5 (tahun) terakhir (2000 s/d 2004) menunjukkan trend yang semakin menurun. Penurunan ini merupakan suatu hal yang alamiah dan wajar terjadi ketika suatu daerah mengalami akselerasi pertumbuhan perekonomian dan sosial ekonomi masyarakat. Alih guna lahan dan rendahnya nilai jual komoditi pertanian menjadi salah satu penyebab penurunan kontribusinya terhadap PDRB suatu daerah, sedangkan secara umum sektor perdagangan dan jasa akan semakin meningkat kontribusinya terhadap total PDRB.

Dalam berusaha tani maupun ternak terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan petani/ peternak dalam mengusahakan komoditi pada lahan yang dimilikinya. Diantaranya faktor teknis meliputi kualitas dan luas lahan, ketersediaan air, potensi produksi, umur tanaman dan tingkat kesesuaian terhadap

iklim. Faktor ekonomi menyangkut penguasaan modal, keuntungan yang diperoleh, kestabilan harga hasil produksi dan mudah tidaknya pemasaran. Faktor sosial meliputi tradisi dan kebiasaan yang telah berlangsung cukup lama, ketersediaan tenaga kerja dan tingkat pendidikan petani. Sejalan dengan kondisi tersebut, pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Kabupaten Lamongan pelaksanaannya diupayakan dengan pendekatan agribisnis berbasis pedesaan yang ditujukan untuk mengubah dari usaha tani berorientasi subsisten menjadi usaha tani komersial yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang mempunyai nilai tambah didasarkan atas permintaan pasar dan mempunyai keunggulan kompetitif.

B. KONDISI UMUM

Secara geografis Kabupaten Lamongan dilalui oleh aliran Bengawan Solo yang memanjang dari barat ke timur sepanjang ± 47 Km. Bengawan Solo ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha pertanian di Kabupaten Lamongan, khususnya di wilayah bagian utara pada musim kemarau dengan menggunakan pompa air dimanfaatkan untuk menanam padi dan budidaya ikan / udang windu. Secara administratif Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan dan 474 desa / kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.224.812 orang, dimana sekitar 63,71 % nya bergerak di sektor pertanian secara luas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan). Proporsi penduduk Kabupaten Lamongan yang bergerak pada sektor ini melebihi rata-rata nasional yang pada tahun 2003 hanya mencapai sekitar 46,3 %.

Dari luas wilayah Kabupaten Lamongan 1.812,8 km² yang potensial dimanfaatkan untuk lahan pertanian sekitar seluas 127.783 Ha (70,48 %), terdiri dari lahan sawah seluas 86.691 ha, lahan tegalan 28.270 ha dan lahan pekarangan 12.822 ha. Dari luas lahan tersebut sudah termasuk lahan sawah tambak seluas sekitar 20.000 Ha. Potensi sumberdaya lahan pertanian di Kabupaten Lamongan juga didukung dengan potensi sumberdaya air irigasi. Data perairan umum Kabupaten Lamongan memiliki sungai sepanjang $\pm 885,5$ Km, waduk sebanyak 34 seluas ± 3.082 Ha dan rawa sebanyak 11 seluas ± 7.087 Ha.

Adapun potensi temak di Kabupaten Lamongan tahun 2004 meliputi temak besar 43.319 ekor, temak kecil 70.289 ekor dan unggas sebanyak 1.368.621 ekor. Sedangkan tenaga kerja yang bergerak di sektor peternakan di Kabupaten Lamongan tahun 2004 sebanyak 247.613 jiwa.

Bidang pertanian memiliki peran penting di dalam memberikan peningkatan dan mempertahankan kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan

masyarakat di dalam menghadapi berbagai perubahan sebagai akibat dari globalisasi, antara lain :

- (a) Semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan;
- (b) Meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar (market oriented policy);
- (c) Semakin berperannya selera konsumen (demand driven) dalam menentukan aktivitas sektor pertanian;

Secara umum terdapat 8 (delapan) kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bidang pertanian di Kabupaten Lamongan antara lain :

- (a) Masih rendahnya kesejahteraan dan relatif tingginya kemiskinan petani/peternak;
- (b) Lahan pertanian yang semakin menyempit sebagai akibat alih fungsi lahan khususnya pada lahan-lahan produktif;
- (c) Lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani / peternak khususnya dalam sistem pemasaran produk-produk pertanian
- (d) Terbatasnya akses petani dalam memperoleh sumberdaya produktif terutama permodalan dan layanan usaha;
- (e) Masih relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) sektor pertanian;
- (f) Masih rendahnya sistem alih teknologi, penguasaan teknologi dan diseminasi teknologi pertanian (pra dan pasca panen);
- (g) Lemahnya infrastruktur (fisik dan non fisik) sektor pertanian pada khususnya dan perdesaan pada umumnya;
- (h) Makin berkurangnya tenaga penyuluh pertanian dan peternakan;

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Meningkatkan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura, dan populasi ternak guna memantapkan ketahanan pangan serta untuk mencukupi pasar lokal dan domestik.
- b. Mengembangkan model pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan dengan pola Pengendalian Hama Terpadu dan pengembangan Agens Hayati.

- c. Terwujudnya pengendalian penyakit potensial pada ternak;
- d. Meningkatkan pola-pola pengembangan agribisnis di tingkat kelembagaan petani / peternak;
- e. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana pertanian.
- f. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemberdayaan kelembagaan petani/peternak, pertemuan rutin dan pelatihan baik di tingkat petani / peternak maupun petugas.
- g. Meningkatkan kemandirian petani / peternak melalui pola kemitraan dan pembinaan jaringan pemasaran untuk mendukung peningkatan pendapatan petani.

2. Sasaran

Dengan memperhatikan potensi, peluang, prospek pengembangan dan teknologi yang tersedia serta besarnya permintaan masyarakat untuk memenuhi berbagai permintaan, maka sasaran umum pembangunan pertanian tahun 2006 di Kabupaten Lamongan adalah tercapainya peningkatan pertumbuhan sektor pertanian serta meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dan peternak.

Sedangkan sasaran khusus yang ingin dicapai antara lain :

- a. Meningkatnya kemampuan petani/peternak untuk dapat menghasilkan komoditas yang bermutu dan berdaya saing;
- b. Terjaganya tingkat produksi bahan makanan, populasi ternak (ternak besar, ternak kecil dan unggas) dalam rangka terjaganya kemandirian ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan;
- c. Terwujudnya diversifikasi produk-produk komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. Meningkatnya kemampuan petani / peternak dan kelembagaan-kelembagaan pertanian di tingkat masyarakat dalam optimalisasi potensi sumberdaya dan peluang di bidang pertanian;
- e. Terwujudnya pengembangan agribisnis didasarkan pada potensi sumberdaya dan peluang pasar.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Pertanian memiliki Arah dan Kebijakan Umum antara lain meliputi : **1. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura menuju terwujudnya pemantapan ketahanan pangan** dengan strategi dan prioritas a) Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, b) Peningkatan mutu intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura, c) Pengembangan varietas komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang berpotensi produktivitas tinggi, d) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), e) Penangkaran benih padi dan palawija, f) Diversifikasi usaha pertanian melalui pengembangan komoditi pertanian sesuai potensi daerah, g) Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian yang dapat akses petani. **2. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana pertanian** dengan strategi dan prioritas a) Penyediaan alat mesin pertanian, b) Pengumpulan, akurasi dan validasi data per-statistikan pertanian, c) Pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya air, d) Penyediaan permodalan usaha tani melalui program bantuan pinjaman penguatan modal dengan bunga rendah, e) Peningkatan aksesibilitas petani terhadap kecil terhadap bantuan pinjaman permodalan. **3. Pemberdayaan dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia dan kelembagaan sektor pertanian** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan mutu pengetahuan dan ketrampilan SDM Penyuluh Pertanian, Petugas Tehnis, KTNA dan petani, b) Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, c) Peningkatan dan pemantapan peran KTNA melalui temu KTNA, d) Pemberdayaan lembaga ketahanan pangan di pedesaan. **4. Mendorong terwujudnya pola kemitraan antara petani / Kelompok Tani dengan Pengusaha** dengan strategi dan prioritas a) Pengembangan kemitraan produsen dengan pengusaha, b) Pengembangan jaringan pemasaran komoditas pertanian, c) Temu usaha antara produsen dan pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian, d) Peningkatan kegiatan kelompok tani agribisnis. **5. Peningkatan nilai tambah komoditas produk pertanian untuk meningkatkan nilai jual** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan kualitas komoditas produk pertanian melalui pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, b) Stabilisasi harga komoditas pertanian strategis, c) Pengembangan diversifikasi usaha pertanian. **6. Peningkatan kualitas pengembangan usaha budidaya ternak** dengan strategi dan prioritas a) Pengembangan teknologi budidaya ternak kecil, ternak besar dan unggas, b) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para petani peternak, c) Pengembangan agribisnis ternak dengan sumberdaya ternak lokal, d) Peningkatan diversifikasi usaha di bidang peternakan, e) Peningkatan mutu bibit ternak. **7. Peningkatan penanggulangan dan pengobatan penyakit ternak** dengan strategi dan prioritas a) Pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak, b) Peningkatan

sarana peralatan-peralatan laboratorium penyakit ternak dan ikan, c) Ketersediaan obat yang memadai. **8. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis peternakan dan pertanian:** dengan strategi dan prioritas a) Meningkatkan kerja sama kemitraan bidang peternakan dan pertanian, b) Memantapkan pemberdayaan kelompok, c) Mendorong usaha peternakan dan pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok. **9. Peningkatan nilai tambah produk peternakan dan pertanian** dengan strategi dan prioritas a) Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan RPH, b) Introduksi teknologi pengolahan hasil peternakan dan pertanian

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Pertanian sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

Bidang : PERTANIAN

NO	PROYEK/AS DAERAH	KODE PROGRAM	KEMASUKAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BIAYA	KEPERLUAN (SK)	DESKRIPSI JENJANG
1	Peningkatan mutu inovasi tanaman dengan dan hortikultura	B 1 a	1. Swadaya dan pemuliaan buku inovasi tanaman tahun 2008 2. Pembinaan, evaluasi dan monitoring pengabdian dengan tahun 2008 3. Peningkatan Mutu Inovasi Tanaman Padi	Kec. Lamongan Kec. Lamongan Kec. Delat, Geger, Lahan Kerteng, Karanggeneng Sukod, Medun Solahan, Sugo Karanggeneng	60 buku Swadaya 100 orang Pembinaan pada masa kerja Dong 75 orang 1.500 Ha	Rp Rp Rp	Lanjutan Baru MK 2008	Bag. Perencanaan Bag. Perencanaan DISTANAHUT
2	Pengembangan Organisasi Pengabdian Masyarakat (OPM)	B 1 d	4. Peningkatan Mutu Inovasi Tanaman Kacang MP 2008/2007 1. Pengabdian Petasida 2. SPMIT Padi dan Petas Pemasukan	Kec. Sugo, Lahan Thung Karanggeneng, Solahan 27 Kecamatan Agung, Lamongan Solahan, Karanggeneng, Karanggeneng	500 Ha 700 Kg/L 5 unit	Rp Rp Rp	Lanjutan Lanjutan Lanjutan	DISTANAHUT DISTANAHUT DISTANAHUT
3	Peningkatan hasil padi dan petas	B 1 e	1. Peningkatan hasil padi	Kudung, Karanggeneng, Lamongan	50 Ha	Rp	Lanjutan	DISTANAHUT
4	Peningkatan keterampilan tenaga produksi pertanian yang dapat bekerja sendiri	B 1 g	1. Peningkatan Pula Beras di Kabupaten Lamongan	Kabupaten Lamongan	1 Petak	Rp	Lanjutan	Distanul
5	Peningkatan nilai hasil pertanian	B 2 a	1. Beras Aji Peningkat Gabet	Kudung, Karanggeneng	2 unit	Rp	Baru	DISTANAHUT
6	Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya air	B 2 c	1. Beras petanian subur petas ke Rp. Tani	Karanggeneng, Solahan, Karanggeneng, Solahan, Karanggeneng, Solahan	30 unit	Rp	Lanjutan	Distanul
7	Peningkatan, ekspor dan nilai hasil produksi pertanian	B 2 b	1. Peningkatan dan produksi pertanian dan pengabdian dengan padi, petas	Kabupaten Lamongan	200 unit	Rp	Baru	Distanul
8	Peningkatan mutu produksi dan pemasaran hasil pertanian	B 2 a	1. Peningkatan Pemasaran Pertanian	Kabupaten Lamongan	1 petak	Rp	Lanjutan	DISTANAHUT

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PRODUK	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN BIAYA	METERANGAN (BL)	URUTAN BERTAMBAH
			Madura, Turi	1.000 ekor	Rp 200.000.000,00	Biru	Dusut PUP
			Ko baru, Nongkang, Solok, Olang, Dikel, Modo	500 ekor	Rp 487.500.000,00	Biru	Dusut PUP
					Rp 11.737.500.000,00		
			Jumlah Total				

BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang wilayahnya terdiri dari kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang ± 47 km, sehingga memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar, khususnya perikanan budidaya dan perikanan tangkap laut. Produksi hasil perikanan di Kabupaten Lamongan sebagian besar merupakan hasil budidaya tambak dengan komoditi udang dan bandeng, juga komoditi tangkap dengan komoditi yang dominan antara lain jenis ikan layang, kuningan, tongkol dan tengiri.

Bidang perikanan kelautan telah memberikan kontribusinya yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Lamongan, adapun kontribusi sektor perikanan sebesar Rp. 115.231.490.000,- atau 8,99% yang ditunjukkan pada PDRB atas harga konstan pada tahun 2004.

Pembangunan bidang perikanan dan kelautan dilaksanakan melalui diversifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan dengan memanfaatkan introduksi teknologi yang berbasis sumberdaya lokal dengan tujuan (1) peningkatan produksi, (2) mengembangkan agroindustri, (3) mengembangkan sarana dan prasarana usaha perikanan, serta (4) mengembangkan inovasi teknologi yang ramah lingkungan.

Disamping pengembangan perikanan tangkap laut Pemerintah Kabupaten Lamongan juga mengembangkan perikanan budidaya yang dilaksanakan melalui (1) pembinaan terhadap pembangunan ikan dalam rangka penerapan teknologi tepat guna, (2) pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan (3) pengembangan budidaya udang windu ramah lingkungan dan (4) program peningkatan mutu intensifikasi budidaya serta sarana dan prasarana budidaya. Sedangkan untuk perairan umum dilakukan restocking/ penebaran benih diperairan umum.

B. KONDISI UMUM

Potensi perikanan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2004 untuk budidaya meliputi tambak seluas 1.380,024 ha, sawah tambak seluas 23.602,63 ha, kolam seluas 340,1 ha. Sedangkan untuk penangkapan di perairan umum meliputi rawa seluas 7.087 ha, waduk seluas 3.082 ha dan dengan panjang sungai 855,3 km. Sementara untuk penangkapan di laut mempunyai panjang pantai 47 km. Hasil pembangunan bidang perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari hasil produksi ikan yang meliputi komponen hasil penangkapan di laut, perairan umum dan budidaya. Pada tahun 2004 hasil produksi ikan di Kabupaten Lamongan

mencapai 71.578 ton yang terdiri dari hasil tangkap laut sebesar 39.934 ton, penangkapan ikan diperairan umum sebesar 2.054 ton, dan budidaya sebesar 29.950 ton. Dari pencapaian diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan masih terus mengupayakan pengembangan di bidang perikanan dengan cara intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi.

Dari sisi tingkat pendapatan petani/nelayan yang merupakan bagian yang tak tidak terpisahkan dari output produksi, tingkat pendapatan petani ikan mencapai Rp. 7.482.260 / RTP/ tahun, sedangkan tingkat pendapatan nelayan mencapai Rp. 2.437.289 / RTP/ tahun. Pencapaian pendapatan petani ini disebabkan adanya indikasi kenaikan kapasitas nilai tukar petani terutama nilai hasil produksi. Sedangkan dari aspek tenaga kerja di bidang perikanan meliputi petani ikan sebesar 31.887 orang, nelayan sebesar 23,186 orang dan pengolah 435 orang.

Berdasarkan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Lamongan mencapai 19,80 kg/ kapita/ tahun atau sebesar 66 % dari target nasional sebesar 30 kg/ kapita/ tahun. Pencapaian tingkat konsumsi ikan tersebut tidak lepas dari dampak penyuluhan tentang makan ikan secara intensif, sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat akan pemenuhan gizi.

Dengan pencapaian-pencapaian dibidang perikanan dan kelautan, pemerintah Kabupaten Lamongan masih menghadapi permasalahan-permasalahan dibidang perikanan antara lain potensi sumber daya perikanan yang ada belum terkelola secara optimal khususnya perairan umum (waduk, rawa, sungai), kurang tersedianya benih bandeng dan udang untuk mencukupi kebutuhan budidaya sepanjang tahun serta fluktuasi harga benih bandeng pada saat-saat tertentu, panjangnya rantai pemasaran yang mengakibatkan tingginya margin tata niaga dan tingkat kesadaran pengetahuan masyarakat akan fungsi ikan sebagai sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan / pembentukan tubuh masih rendah.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Pembangunan perikanan yang ditujukan pada pengembangan teknologi perikanan yang berorientasi pada intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi budidaya perikanan, peningkatan populasi ikan, peningkatan pendapatan nelayan/ petani, peningkatan produksi dan produktifitas lahan, peningkatan konsumsi ikan menuju swasembada pangan dan ekspor non migas.

2. Sasaran

Peningkatan produksi sumberdaya perikanan pada tahun 2006 untuk perikanan tangkap di laut sebesar 41.000 ton, budidaya ikan tambak sebesar 2.500 ton, sawah tambak sebesar 28.000 ton, kolam sebesar 850 ton dan perairan umum sebesar 2.500 ton. Sedangkan konsumsi ikan pada tahun 2006 diharapkan mencapai 20 kg/kapita/ tahun.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Perikanan dan Kelautan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan pada wilayah perairan laut** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pembinaan nelayan dan pengawasan sumberdaya kelautan, b) Peningkatan sarana penangkapan ikan, c) Peningkatan sarana dan prasarana pendaratan ikan, d) Peningkatan jangkauan daerah operasi penangkapan, e) Peningkatan pengkajian mutu hasil perikanan laut, f) Peningkatan pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir. **2. Terwujudnya pengembangan usaha budidaya perikanan** dengan strategi dan prioritas a) Pengembangan budidaya laut dan air payau, b) Peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan, c) Pengembangan agribisnis komoditi perikanan, d) Peningkatan aspek permodalan usaha tani budidaya, e) Peningkatan mutu intensifikasi budidaya ikan. f) Pemberdayaan penangkaran benih ikan air tawar dan ikan laut. **3. Peningkatan nilai tambah hasil perikanan dan pengembangan produk** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan diversifikasi produk perikanan, b) Introduksi teknologi pengolahan ikan, c) Pengembangan kemitraan produsen dan pengusaha. **4. Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya perikanan perairan umum** dengan strategi dan prioritas a) Pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan perairan umum, b) Introduksi teknologi pemanfaatan sumber daya perikanan.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Perikanan dan Kelautan sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : PERIKANAN DAN KELAUTAN

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN BIAYA	KETERANGAN (SAL.)	USULAN INSTANSI
1	Peningkatan pemantauan nelayan dan pengawasan sumberdaya kelautan	C.1.a	1 Pembuatan terumbu karang buatan	Paciran (3 desa)	15 unit	Rp 105,000,000.00	Baru	Dinas PKP
2	Peningkatan sarana prasarana pendaratan ikan	C.1.c	1 Pembuatan tangki laut	Paciran (4 desa)	75 x 1,5 m 400 x 3 m 600 x 3 m 120 x 3 m	Rp 15,000,000.00 Rp 300,000,000.00 Rp 250,000,000.00 Rp 200,000,000.00	Baru	Dinas PKP
			2 Pembangunan peringgihan jety TPI Kiangi	Kiangi Kec. Paciran	300 x 5 m	Rp 300,000,000.00	Baru	Dinas PKP
			3 Pembuatan tanggul gelombang dan tembok beton panti	Brondong (Lubuhan)	4,500 m2	Rp 80,000,000.00	Baru	Dinas PKP
3	Peningkatan pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir	C.1.f	1 Dana penyangga pelatihan	Paciran (Kiangi)	50 org	Rp 50,000,000.00	Baru	Dinas PKP
4	Peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan	C.2.b	1 Restocking weduk / perairan umum	Weduk Gondang, Prjatan, Jotosanur, Mojowento, Rencenglamono	5 weduk	Rp 50,000,000.00	Baru	Dinas PKP
			2 Dempul lele dumbo	Kab. bahu, Turi	2 x 0,1 Ha	Rp 10,000,000.00	Baru	Dinas PKP
5	Peningkatan mut. intensifikasi budidaya ikan	C.2.a	1 Bantuan modal bagi untuk intensifikasi sawah tambak	Turi, Kembangan, Kembangan, Glegah, Pucuk, Deket, Lamongan, Modo, Laren, Medurem, Sekaman, Pucuk	1,033 Ha	Rp 3,277,000,000.00	Lama	Dinas PKP
6	Pemberdayaan penangkaran benih ikan air tawar	C.2.f	1 Baysi operasional BBI	BBI Kalen	2 Ha	Rp 7,500,000.00	Baru	Dinas PKP
7	Introduksi teknologi pengkayaan ikan	C.3.b	1 Pengolahan Gendang Tandu (Tampi Duri)	Karangbeningun	2 kelompok	Rp 50,000,000.00	Baru	Dinas PKP
Jumlah Total						Rp 4,544,500,000.00		

BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

A. PENDAHULUAN

Guna memacu perkembangan dan perekonomian daerah maupun masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka salah satu potensi sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan dan ditingkatkan pemanfaatannya di Kabupaten Lamongan adalah sektor Pertambangan dan Air Bawah Tanah (ABT). Adapun potensi pertambangan yang sudah di eksploitasi di kabupaten Lamongan meliputi Dolomit, Batu Kapur, Fosfat, Tanah Urug dan Truss.

Sebagai sumberdaya alam yang tidak dapat pulih, pengelolaan dan eksploitasi komoditi hasil tambang harus senantiasa memperhatikan dampak kelestarian lingkungan maupun tingkat kemanfaatan yang efisien, sehingga fungsi pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan eksploitasi perlu dukungan secara intensif oleh semua pihak.

Sumber air bawah tanah mempunyai peranan penting sebagai salah satu alternatif sumber air baku untuk berbagai kebutuhan air. Selaras dengan proyeksi akan kebutuhan air yang kecenderungan terus meningkat maka perlu diimbangi dengan upaya pengendalian terhadap potensi air bawah tanah yang ada disuatu wilayah untuk mendukung kegiatan pembangunan.

Pembangunan sumber energi alternatif yang selama ini dilaksanakan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi kepentingan masyarakat terutama untuk pemukiman atau dusun yang belum terjangkau oleh pelayanan PLN.

B. KONDISI UMUM

Potensi pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lamongan banyak ragamnya seperti batu gamping, dolomit, fosfat, kalsit, bentonit, pasir dan tanah liat. Adapun potensi pertambangan yang sudah dieksploitasi meliputi batu gamping, dolomit, fosfat, tanah urug dan truss. Secara umum kegiatan usaha pertambangan dilakukan secara tradisional dengan menggunakan peralatan dan teknik penambangan yang sangat sederhana, dan pada umumnya tanpa memperhatikan faktor keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.

Adapun untuk pembinaan dan penyuluhan pengelolaan pertambangan dilaksanakan di lokasi pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan, yang dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi serta penerbitan kegiatan penambangan bersama

pihak Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur).

Pada tahun 2004 ini, kegiatan tersebut lebih dititik beratkan pada pelaksanaan reklamasi lahan bekas galian dan pembinaan serta evaluasi dan monitoring ke 8 (delapan) Kecamatan dalam upaya meningkatkan kesadaran penambang untuk mengajukan ijin, hal ini digambarkan perkembangan pemilik SIPD (Surat Ijin Penambangan Daerah) sampai tahun 2004 sebanyak 24 SIPD dengan jenis bahan galian antara lain dolomit, batu gamping, tanah urug dan fosfat.

Disampaikan pula bahwa dengan diberlakukannya UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka seharusnya penerbitan Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) menjadi kewenangan daerah. Namun sampai dengan saat ini kewenangan tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga proses penerbitan SIPD masih dilangani Pemerintah Propinsi Jatim. Untuk menyikapi hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu melakukan langkah tindak lanjut sebagai upaya melaksanakan kewenangan di bidang pertambangan, juga perlu segera disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Perkembangan produksi tambang golongan C di Kabupaten Lamongan untuk produksi batu gamping dan batu kapur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dipengaruhi pergeseran penggalian dolomit, tanah urug/pedel dan fosfat pada tahun 2002, pada tahun 2003 beralih ke batu kapur dan batu gamping sedangkan Tanah urug dan Batu kapur pada tahun 2004 terjadi penurunan. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh kualitas bahan galian golongan C dan pajak galian serta pemasarannya. Adapun produksi tambang golongan C pada tahun 2004 adalah sebagai berikut : Dolomit sebesar 2.145 ton, Batu gamping sebesar 40.702 ton, tanah urug/pedel sebesar 3.260,25 ton, batu kapur sebesar 96.294 ton, tanah liat sebesar 5.026 ton.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Tertatanya infrastruktur dan mekanisme penggalian bahan galian golongan C yang ada di wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem.
- b. Mewujudkan tersedianya sumber tenaga energi listrik yang memadai untuk kebutuhan masyarakat secara merata.

2. Sasaran :

- a. Meningkatkan luas areal dan produksi bahan galian golongan C.
- b. Meningkatkan jumlah pengusaha tambang galian golongan C yang memiliki SIPD.
- c. Meningkatkan upaya pengelolaan air bawah tanah melalui pemilikan Surat Ijin Pengambilan Air bawah Tanah.
- d. Peningkatan pengendalian dan pembinaan penambangan galian golongan C.
- e. Tersedianya sumber tenaga energi listrik yang memadai untuk kebutuhan masyarakat.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang pertambangan dan energi memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Pembangunan Pertambangan Rakyat** dengan strategi dan prioritas a) Pemetaan survey potensi dan pemetaan sumberdaya mineral/pertambangan, b) Peningkatan pembinaan penambang tradisional, c) Peningkatan pengendalian dan pemantauan serta perijinan kegiatan penambangan. **2. Pendayagunaan potensi air bawah tanah** dengan strategi dan prioritas a) Pemetaan dan survey potensi air bawah tanah lanjutan, b) Peningkatan pengendalian dan pelayanan perijinan penggunaan air bawah tanah, c) Penyusunan kebijakan penggunaan air bawah tanah. **3. Pengembangan Usaha Ketenaga listrikan** dengan strategi dan prioritas a) Penyusunan kebijakan di bidang usaha ketenagalistrikan diluar PLN, b) Pengendalian dan pelayanan perijinan usaha ketenagalistrikan, c) Terciptanya sistem monitoring, pamantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, d) Memfasilitasi kebutuhan kelistrikan masyarakat pedesaan

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Pertambangan dan Energi sebagaimana terlampir.

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PEROGRAH BIAYA	KETERANGAN (S/L)	USULAN INSTANSI
1	Peningkatan pengendalian dan pemantauan kegiatan penambangan	D.1.2	1. Monitoring, penelitian, pembinaan dan pelestarian kegiatan penambangan galian C di Kab. Lamongan	Kec. Proton, Sobikuro, Brondong, Babat, Sembang, Ngimbang, Marup	12 kali pembinaan Pelestarian	Rp. 15,000,000.00	Lanjutan	Bag. Perak
2	Peningkatan pengendalian dan pelaksanaan program pengendalian air bawah tanah	D.2.1	1. Pengawasan alat pemungut penguadahan penggunaan air bawah tanah	Kabupaten Lamongan	5 jenis	Rp. 30,000,000.00	Baru	Bag. Perak
			2. Penelitian teknis tim pesisir, monitoring dan administrasi blokto jin untuk pelaksanaan Perda No. 5 th. 2004 tentang pengendalian air bawah tanah	Kabupaten Lamongan	Tim Pesisir	Rp. 15,000,000.00	Baru	Bag. Perak
Jumlah Total						Rp. 60,000,000.00		

BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah, pembangunan kehutanan dan perkebunan yang berkelanjutan diperlukan pengelolaan lahan dan hutan yang komprehensif dan berorientasi pada aspek ekologis, ekonomi dan sosial sehingga mampu berperan mewujudkan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari (ultimate beneficiaries).

Pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Lamongan, khususnya sub bidang perkebunan pada umumnya dalam bentuk usaha perkebunan rakyat dengan komoditi kelapa, cabe jamu, siwalan jambu mete dan tembakau. Sedangkan untuk komoditi kapas, kenaf dan tebu pengembangannya melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta yang bertindak sebagai mitra kerja sekaligus berperan sebagai pembina khususnya dalam alih teknologi, penyedia paket kredit dan penampung hasil (pemasaran).

Sejalan dengan Arah Pembangunan Ekonomi di daerah yang ditujukan untuk mengembangkan potensi sumber daya lokal (pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan) dan industri yang berbasis pada potensi daerah. Maka bidang kehutanan dan perkebunan juga merupakan bidang yang memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan. Kontribusi terhadap PDRB atas harga dasar konstan (ADHK) tahun 2004 sub bidang kehutanan mencapai 0,08 % atau senilai Rp. 1.025.700.000,00 dan sub bidang perkebunan sebesar 0,79 % atau senilai Rp. 10.107.080.000,00.

Sebagaimana paradigma baru dalam pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan yang berbasis masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat menjadi penting dan strategis, sehingga perlu lebih diwadahi dan difasilitasi sesuai kemampuan dan kewenangan daerah melalui sistem pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan bersama masyarakat. Hal ini telah menjadi suatu arah dalam pengembangan usaha pengelolaan hutan di Kabupaten Lamongan.

B. KONDISI UMUM

Kabupaten Lamongan mempunyai potensi sumber daya Bidang Perkebunan dan Kehutanan yang cukup besar. Kabupaten Lamongan merupakan penyumbang terbesar produksi kapas dan kenaf di Tingkat Propinsi Jawa Timur yang mampu memberikan kontribusi rata-rata sekitar 78,55 % terhadap total produksi di Jawa Timur. Sedangkan produksi kenaf mampu memberikan kontribusi rata-rata sekitar 80 % dari total produksi Jawa Timur. Demikian juga luas areal pengembangan

kedua komoditi tersebut merupakan yang terluas di Jawa Timur. Potensi sumber daya kehutanan juga cukup besar yaitu sekitar 33.429 hektar merupakan hutan negara yang sebagian besar merupakan hutan produksi yang dikelola oleh PT. PERHUTANI dan sekitar 1500 hektar hutan rakyat.

Luas lahan hutan negara di Kabupaten Lamongan yang menjadi kewenangan pengelolaannya oleh PT. PERHUTANI adalah seluas 33.429 hektar yang terdiri dari hutan produksi seluas 33.184 ha, dan hutan lindung 244,60 ha.

Sedangkan tegakan hutan rakyat pada tahun 2004 seluas 1575 ha dan lahan kritis yang perlu dikonservasi seluas 14.060,71 ha. Adapun sumberdaya lahan di Kabupaten Lamongan yang mempunyai potensi untuk pengembangan bidang perkebunan seluas sekitar 27.206 ha yang tersebar di 27 wilayah kecamatan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan ditujukan pada terwujudnya peningkatan produksi komoditi perkebunan dan kehutanan yang bermutu dan berdaya saing serta untuk mencukupi pasar lokal dan domestik, optimalisasi sumberdaya (SDA, SDM) perkebunan dan kehutanan, semakin berkembangnya pola-pola pengembangan agribisnis, sarana prasarana perkebunan dan kelembagaan masyarakat pedesaan;
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemberdayaan kelembagaan petani/masyarakat desa sekitar hutan, pertemuan rutin, pelatihan dan pembinaan baik di tingkat petani maupun petugas;
- c. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya lahan (tanah) dan air.

2. Sasaran

Dengan memperhatikan potensi, peluang, prospek pengembangan dan teknologi yang tersedia serta besarnya permintaan masyarakat untuk memenuhi berbagai permintaan, maka sasaran umum pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan tahun 2006 di Kabupaten Lamongan adalah tercapainya tingkat pertumbuhan sektor kehutanan dan perkebunan yang semakin membaik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2004 menunjukkan pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -14,99 % untuk sektor perkebunan

dan sebesar -28,49 % untuk sektor kehutanan. Pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan juga mempunyai sasaran terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat desa sekitar kawasan hutan (MDH).

Sedangkan sasaran khusus yang ingin dicapai antara lain :

- a. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas-komoditas perkebunan dan kehutanan yang bermutu dan berdaya saing;
- b. Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan domestik dan regional;
- c. Terwujudnya diversifikasi produk-produk komoditas perkebunan dan kehutanan;
- d. Meningkatnya kemampuan petani dan masyarakat desa sekitar kawasan hutan (MDH) dan kelembagaan-kelembagaan di tingkat masyarakat pedesaan dalam optimalisasi potensi sumberdaya dan peluang di bidang kehutanan dan perkebunan;
- e. Terwujudnya pengembangan agribisnis komoditas perkebunan didasarkan pada potensi sumberdaya dan peluang pasar;
- f. Terwujudnya pengembangan hutan rakyat seluas 1250 ha, pembinaan masyarakat desa sekitar kawasan hutan (MDH) dan pengelolaan sumberdaya lahan yang memperhatikan aspek konservasi sumberdaya tanah dan air;
- g. Terwujudnya penurunan lahan kritis seluas 1250 ha;
- h. Terwujudnya pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara LMDH dengan PERHUTANI.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Kehutanan dan Perkebunan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Pengembangan agribisnis dalam rangka pemberdayaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan** dengan strategi dan prioritas a) Optimalisasi pemanfaatan lahan dengan komoditi perkebunan sesuai potensi daerah dan prospektif ekonomis, b) Peningkatan dan pengembangan komoditas perkebunan sesuai potensi daerah yang prospektif ekonomis, c) Pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya air. **2. Kelestarian sumberdaya hutan dan lahan melalui pengembangan hutan dan lahan yang**

memperhatikan aspek konservasi dan sosial ekonomi masyarakat dengan strategi dan prioritas a) Rehabilitasi lahan kritis melalui kegiatan penghijauan dengan jenis tanaman produktif prospektif ekonomis, b) Pembuatan dan pemeliharaan bangunan sipil teknis konservasi pada lahan kritis, c) Pengembangan hutan hak/rakyat, d) Tersedianya bibit tanaman untuk pengembangan hutan rakyat dan kebun rakyat, e) Terlaksananya program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terlampir :

BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

A. PENDAHULUAN

Dalam konstelasi pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di era Otonomi Daerah menjadi berkah sekaligus tantangan tersendiri bagi perekonomian Daerah untuk semakin tumbuh dan berkembang secara mandiri sekaligus melebur dalam era globalisasi yang menekankan adanya peluang dan kompetisi dalam memenangkan pasar. Kondisi pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lamongan masih dominan diarahkan pada pengembangan industrialisasi pedesaan, meskipun tidak menutup kemungkinan akan tumbuh industri-industri besar seiring makin diminatnya wilayah Kabupaten Lamongan sebagai penanaman industri.

Mengingat arti penting dari Industri dan Perdagangan tersebut, maka akan sangat berarti jika dilakukan upaya-upaya pengembangan industri melalui usaha kecil dan menengah. Usaha industri kecil yang jumlahnya sangat besar dapat menjadi wahana pemanfaatan produk-produk primer maupun sebagai alternatif dari kejenuhan bidang pertanian. Demikian pula pada Bidang Perdagangan masih bersifat perdagangan domestik dimana sistem perdagangan tersebut masih mengandalkan komoditi hasil pertanian, sehingga peranan Pemerintah Daerah masih menjadi dorongan utama dalam memfasilitasi pengembangan jaringan usaha baik dalam skala regional maupun nasional.

B. KONDISI UMUM

Perkembangan bidang industri secara umum dapat ditunjukkan melalui 3 (tiga) indikator, yakni berdasarkan unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi. Pada tahun 2004 secara umum kondisi bidang industri cukup menunjukkan perkembangan yang positif. Untuk perkembangan unit usaha terjadi peningkatan baik di tingkat usaha formal maupun non formal, dimana usaha formal berkembang 330 unit atau meningkat 15,79% dan usaha non formal berkembang 23.595 unit atau meningkat 0,19%.

Dari aspek penyerapan tenaga kerja terjadi pula peningkatan baik di tingkat usaha formal maupun non formal, dimana masing-masing pada tahun 2004 mencapai penyerapan tenaga kerja 6.690 orang dan 57.140 orang atau masing-masing mengalami kenaikan sebesar 10,98% dan 0,049% dibanding tahun 2003.

Perkembangan kondisi nilai investasi terjadi pula pergeseran positif dari nilai investasi baik dari jenis usaha formal maupun non formal. Dari masing-masing jenis usaha pada tahun 2004 menunjukkan kemajuan nilai investasi yang cukup berarti

yakni Rp. 40.430.000.000,- dan Rp. 1.619.800.000,- atau masing-masing mengalami peningkatan 25,38% dan 0,344% dibandingkan dengan tahun 2003.

Sedangkan untuk menggerakkan perdagangan di tingkat pedesaan Pemda Kabupaten Lamongan mulai tahun 2001 sampai dengan 2004 memprogramkan kredit lunak dengan sasaran pasar-pasar desa sebanyak 28 unit atau total dana sebesar 5 (lima) milyar. Dari konstelasi perkembangan pasar desa di Kabupaten Lamongan dapat lebih mendorong akselerasi pertumbuhan perekonomian desa, disamping menciptakan pengembangan distribusi perdagangan produk-produk pedesaan utamanya hasil-hasil pertanian dan kebutuhan bahan pokok masyarakat.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Mempercepat proses industrialisasi dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang seimbang dan guna mendukung industri penggerak utama untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
- b. Mempercepat perluasan lapangan kerja dan mendorong kesempatan berusaha di daerah dengan mendayagunakan sumber daya manusia yang tersedia secara terarah dan konsepsional.
- c. Meningkatkan produksi dan jasa industri dengan harga bersaing dengan memanfaatkan sumber daya alam, energi daya teknologi serta memperhatikan kelestarian dan kemampuan daya dukung wilayah.

2. Sasaran

- a. Tersedianya barang dan jasa di pasar dengan harga yang layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- b. Sistem distribusi yang efektif dan efisien.
- c. Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa.
- d. Kesiambungan proses produksi terutama produksi barang-barang pokok.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)** dengan strategi dan prioritas a) Pembinaan usaha Golongan Ekonomi Lemah, b) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil, c) Memfasilitasi

akses permodalan, d) Penyediaan permodalan melalui program kredit bunga rendah. **2. Pengembangan perdagangan dan sistem distribusi** dengan strategi dan prioritas a) Terbangunnya sistem informasi perdagangan, b) Tercapainya iklim usaha yang sehat, c) Peningkatan mutu hasil produksi yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas, d) Pelaksanaan promosi terprogram regional, nasional dan internasional, e) Tercapainya perlindungan masyarakat akan hak sebagai konsumen. **3. Peningkatan ekspor jasa dan perdagangan** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pelayanan pelaksanaan ekspor, b) Peningkatan mutu produk-produk ekspor, c) Diversifikasi produk ekspor. **4. Peningkatan sarana prasarana pembangunan ekonomi** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan penyediaan sarana pasar, b) Peningkatan infrastruktur ekonomi, c) Pembinaan terhadap pelaku-pelaku ekonomi. **5. Pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan manajemen industri, b) Peningkatan bantuan modal kerja sarana dan prasarana, c) Peningkatan diversifikasi produk dan desain, d) Peningkatan SDM tenaga kerja yang profesional dan terampil melalui pelatihan, e) Membuka peluang terbangunnya industri substitusi bahan baku lokal, f) Peningkatan kualitas/mutu produksi.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana terlampir:

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

BIDANG : PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.	PRIORITAS DAERAH	KC-JE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERSORAJAN BIAYA	KETERANGAN (BIL.)	USULAN MUTASI
1.	Pembinaan dan pengembangan usaha kecil	F.1.b	1. Pembinaan UKM/Perdagangan di Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	4 kali	Rp. 50,000,000.00	Baru	Indagkop
			2. Pembinaan sentra industri beras, koneksi dan jaringan di Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	8 kali	Rp. 50,000,000.00	Baru	Sag. Perekonomian
2.	Penyediaan pendanaan melalui program kredit bunga rendah	F.1.d	1. Bantuan pinjaman modal kerja industri kecil, menengah dan rumah tangga	Kab. Lamongan	31 Unit Usaha	Rp. 1,000,000,000.00	Lanjutan	Indagkop
3.	Tertbangunnya sistem informasi perdagangan	F.2.a	1. Pelayanan Informasi Pasar	Pasar Kec. Lamongan, Bebat dan Pecinan	52 kali	Rp. 25,000,000.00	Lanjutan	Indagkop
4.	Pelaksanaan promosi terprogram regional, nasional dan internasional	F.2.d	1. Gebyar Promosi dan Perdagangan Produk Unggulan Daerah	Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bel dan WBL	5 kali	Rp. 250,000,000.00	Lanjutan/Baru	Indagkop
			2. Promosi Potensi dan Produk Daerah	Kec. Pecinan, Bebat, Maduran dan Lamongan	3 billboard dan pameran produk potensi daerah sesuai kebutuhan	Rp. 350,000,000.00	Lanjutan	Sag. Perekonomian
5.	Terapainya perlindungan masyarakat akan hak sebagai konsumen	F.2.e	1. Pengawasan dan Monitoring BOKT, SHS dan Pengg. UTTP	Toko, Super market, Swalayan, Pasar dan lain-lain se-Kab. Lng	4 kali	Rp. 60,000,000.00	Baru	Indagkop
			2. Handelen Pasar UTTP	Desa-Desa se-Kab. Lng	1 kali	Rp. 50,000,000.00	Baru	Indagkop
6.	Peningkatan pelayanan sarana pasar	F.4.a	1. Pembangunan balok pasar ikan	Kec. Lamongan	75 m	Rp. 750,000,000.00	Lanjutan (Memindahkan pdgng ikan 20 org yg blm terbagi tempat)	Kart. Pasar Pengalihan
			2. Pembangunan jalan masuk pasar ikan	Kec. Lamongan	250 m	Rp. 350,000,000.00	Lanjutan	Kart. Pasar Pengalihan
			3. Renovasi dan pembuatan pagar pasar sepeda	Kec. Lamongan	30 m	Rp. 100,000,000.00	Baru	Kart. Pasar Pengalihan
			4. Pengadaan Dan truk dan kontener sampah	Pasar Blimbing/Grondong	2 unit	Rp. 200,000,000.00	Baru	Kart. Pasar Pengalihan
7.	Peningkatan infrastruktur ekonomi	F.4.b	1. Bantuan pengembangan IK, Borda Batik dan Pakaian	Des. Sendangdwar dan Sendangagung Kec. Pecinan	2 Unit	Rp. 185,000,000.00	Baru	Indagkop
8.	Pembinaan terhadap pelaku pelaku ekonomi	F.4.c	1. Pembelian Alat Pengalihan Garasi berwujud dan Pembinaan Petani Garasi	Kab. Lamongan	1 paket	Rp. 150,000,000.00	Baru	Indagkop

NO	IDENTITAS BAGIAN	KODE PROJEK	REKAM JEJAK	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BAYU	KETERANGAN (ML)	USULAN PERHITUNGAN	
B.	Peningkatan efisiensi produk dan desain	F 5.0	2. Penelitian pelat, pelat dan perantara tributuri dari berwujud	Kawasan Brondong	1 tial	Rp 50.000.000,00	Baru	Indagap	
			3. Penelitian P.C. 5	Terminal Darat Beneran Kec. Beneran	54 unit	Rp 251.180.000,00	Baru	Indagap	
			4. Penelitian K. 1000	Kec. T. 1, P. 1000	2 x	Rp 25.000.000,00	Baru	Indagap	
			1. Penelitian efisiensi dan desain produk induksi pengaliran dari bahan	Kec. Solok	20 Org	Rp 25.000.000,00	Lanjutan	Indagap	
			2. Penelitian peningkatan mutu dari K. 1000	Kec. Ngimbang	20 Org	Rp 20.000.000,00	Baru	Indagap	
			3. Penelitian peningkatan desain efisiensi produk dan berwujud, penelitian produk K. 1000	D. Gendang dan Mekure	30 Org	Rp 50.000.000,00	Baru	Indagap	
			4. Penelitian teknik produksi dan desain kemungkinan industri dari K. 1000	Kec. Kumpang Kec. Beneran	30 Org 5 pelat	Rp 25.000.000,00	Baru	Indagap	
			5. Penelitian transportasi K. 1000 dan K. 1000	Beneran, P. 1000 dan K. 1000	10 pelat	Rp 70.000.000,00	Baru	Indagap	
			6. Penelitian peningkatan efisiensi produk	D. 1000	40 org	Rp 25.000.000,00	Baru	Indagap	
			7. Penelitian peningkatan efisiensi pelat	L. 1000	1 pelat	Rp 15.000.000,00	Baru	Indagap	
C.	Peningkatan efisiensi produk dan desain	F 5.0	8. Penelitian peningkatan mutu industri dari K. 1000	Brondong	20 org	Rp 25.000.000,00	Baru	Indagap	
			9. Penelitian dan efisiensi penelitian kemungkinan industri dari K. 1000	L. 1000	30 org	Rp 50.000.000,00	Baru	Indagap	
Jumlah			10. Penelitian peningkatan efisiensi dari K. 1000	L. 1000	20 org	Rp 15.000.000,00	Baru	Indagap	
						Rp 4.134.180.000,00			

BIDANG KOPERASI

A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu unsur lembaga ekonomi masyarakat yang memiliki spektrum luas dan akses pemberdayaan terhadap masyarakat pedesaan, maka bidang koperasi di daerah dituntut re-strukturisasi, revitalisasi dalam upaya partisipasinya dalam pembangunan ekonomi daerah dengan menggali dan memanfaatkan potensi daerah sebagai kontribusi bidang koperasi menuju kemandirian ekonomi daerah.

Mencermati perubahan paradigma koperasi, tentunya koperasi sebagai salah satu badan yang bersifat otonom di tingkat daerah diberi kebebasan untuk mengakses segala sumberdaya yang dapat menjadikan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat sesuai dengan kemampuan dan keputusan anggota koperasi. Sedangkan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator harus memberikan perlindungan, kemudahan, pencerdasan dan fasilitas pada masyarakat koperasi, agar koperasi menjadi lembaga ekonomi yang otonom dan mandiri.

Perubahan dalam pengelolaan koperasi merupakan bagian tanggungjawab masyarakat dan pemerintah, maka perlu adanya langkah-langkah strategis untuk merespon perubahan tersebut agar koperasi menjadi salah satu pelaku ekonomi yang berperan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun sasaran utama Program Pengembangan Koperasi adalah terwujudnya peningkatan struktur permodalan koperasi yang kokoh dan sehat sehingga mampu meningkatkan akses kepada sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan guna menunjang perkembangan koperasi dalam mengakses pangsa pasar.

B. KONDISI UMUM

Jumlah perkembangan koperasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cenderung ke trend positif, hal ini dapat ditunjukkan pada tahun 2000 jumlah koperasi mencapai sebesar 331 dan pada tahun 2004 berkembang sebesar 363 atau mengalami kenaikan sebesar 9,6 %. Dari jumlah koperasi 363 pada tahun 2004 koperasi yang melaksanakan RAT sebesar 161 koperasi, dan koperasi yang berpredikat berprestasi berjumlah 6 koperasi.

Dari kenaikan jumlah koperasi belum diikuti secara signifikan, hal ini ditunjukkan pada tahun 2003 jumlah anggota sebesar 159.707 orang dan pada tahun 2004 mencapai 153.495 orang atau mengalami penurunan sebesar 4%.

Penurunan anggota ini sebagai perwujudan revitalisasi keanggotaan yang aktif berperan dalam pengembangan usaha koperasi. Dari aspek volume usaha pada tahun 2004 mencapai perkembangan sebesar Rp. 171.227.784.000,- atau meningkat 7,9 % dari tahun 2003 yang mencapai Rp. 158.653.692.000,-. Kondisi tersebut, koperasi sebagai badan yang bersifat otonom dan merupakan wadah ekonomi rakyat dituntut turut berperan dan dapat mewarnai dalam perekonomian daerah. Untuk itu secara eksternal koperasi diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerja sama usaha dengan badan usaha negara dan swasta. Sedangkan secara internal dalam mewujudkan pengembangan jati diri koperasi dengan upaya peningkatan sumberdaya manusia dalam meningkatkan kinerja pengurus menjadi langkah strategi untuk terus ditingkatkan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Meningkatkan citra koperasi sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang produktif, mandiri, maju dan berdaya saing.

2. Sasaran

- a. Terwujudnya koperasi yang tangguh, profesional dan mandiri.
- b. Terwujudnya koperasi yang berkualitas.
- c. Meningkatkan akses koperasi terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana.
- d. Meningkatkan citra koperasi di kalangan masyarakat serta menunjang terhadap perekonomian rakyat.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Koperasi memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan pengembangan usaha koperasi** dengan strategi dan prioritas a) Memfasilitasi bantuan permodalan koperasi dan melalui lembaga keuangan, antara lain perbankan dan lembaga non perbankan, b) Memfasilitasi hubungan kerjasama kemitraan dengan para pengusaha, c) Pemantauan terhadap Koperasi yang mendapat bantuan permodalan, d) Melaksanakan pembinaan teknis manajemen pengelolaan bagi koperasi. **2. Revitalisasi kelembagaan koperasi** dengan strategi dan prioritas a) Optimalisasi pembinaan teknis penataan organisasi dan usaha terhadap koperasi, b) Peningkatan evaluasi kinerja koperasi, c)

Penyusunan program pengembangan koperasi. **3. Pengembangan kualitas SDM Koperasi** dengan strategi dan prioritas a) Pembinaan terhadap SDM lembaga Koperasi, b) Mendorong terciptanya jiwa wirausaha dan enter-prunership para pengelola koperasi.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Koperasi sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : PERKOPERASIAN

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN BIAYA	KETERANGAN (Btl.)	USULAN INSTANSI
1	Memfasilitasi bentuk pendirian koperasi dan melalui lembaga keuangan, antara lain perbankan dan lembaga non perbankan	G.1.a	1. Pembinaan dan bentuk pinjaman modal kerja ketahanan pangan melalui koperasi	Kab. Lamongan	20 Koperasi	Rp. 1.500.000.000,00	Lama	Indagkop
			2. Bantuan modal usaha KSP/USP	Kab. Lamongan	1 Paket	Rp. 1.000.000.000,00	Baru	Indagkop
2	Peningkatan evaluasi kinerja koperasi	G.2.b	1. Penelitian kelayakan dan kesehatan koperasi	Kab. Lamongan	200 kop. se-Kab. Lamongan	Rp. 30.000.000,00	Lama	Indagkop
3	Penyusunan program pengembangan koperasi	G.2.c	1. Penyusunan data base koperasi / profil koperasi se-Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	300 kop	Rp. 60.000.000,00	Baru	Indagkop
4	Pembinaan terhadap SDM lembaga koperasi	G.3.a	1. Pelatihan Perkoperasian bagi Pra Koperasi	Kab. Lamongan	18 desa	Rp. 10.000.000,00	Baru	Indagkop
Jumlah Total						Rp. 2.600.000.000,00		

BIDANG PENANAMAN MODAL

A. PENDAHULUAN

Didalam memasuki era globalisasi yang menganut sistem perdagangan bebas termasuk didalamnya kegiatan dibidang investasi memiliki tingkat persaingan yang semakin tajam. Menghadapi hal tersebut mulai Pemerintah Pusat sampai Tingkat Daerah berbenah melakukan regulasi melalui kebijakan baru yang intinya diharapkan pertumbuhan investasi dan perdagangan dapat meningkat secara signifikan, sehingga menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih banyak.

Seiring itu pula dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengelola Pemerintahan secara mandiri, akan memiliki konskuensi logis dimana Pemerintah Kabupaten Lamongan dituntut harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, utamanya dalam mendorong peningkatan di bidang investasi dan perdagangan sebagai manifestasi terwujudnya perkembangan penanaman modal di Kabupaten Lamongan.

Sebagai akselerasi perkembangan penanaman modal di daerah, tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah saja, melainkan perlu adanya sinergi antara Pemerintah, swasta dan usaha masyarakat yang terhimpun dalam rangka menggarap potensi sumber daya melalui berbagai macam pola kerjasama secara optimal.

B. KONDISI UMUM

Perkembangan nilai investasi tahun 2004 baik pada usaha formal secara total mencapai Rp. 38.919.800.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 4,34% dibandingkan tahun 2003. Namun demikian perkembangan sektor investasi di bidang industri dan perdagangan masih memerlukan akselerasi melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, sosialisasi, pembinaan, bantuan peralatan, mesin dan bantuan modal.

Perkembangan nilai investasi melalui pengembangan usaha daerah telah dikembangkan melalui akselerasi : (1) Kegiatan usaha daerah pada PD Bank Pasar Lamongan mengalami kenaikan, hal ini dapat ditunjukkan oleh kenaikan aset sebesar Rp. 44.238.793.000,- pada tahun 2003 dengan tahun 2004 sebesar Rp. 49.889.937.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 0,13 % hal ini memberikan gambaran semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PD Bank Pasar. Sedangkan rentabilitas atau kemampuan untuk mendapatkan laba terhadap modal disetor mencapai 18,9 %, hal ini menggambarkan bahwa PD Bank Pasar

masih cukup profitable. (2) Kegiatan usaha daerah pada PDAM Lamongan mengalami peningkatan target pendapatan pada tahun 2004 ini didasarkan pada adanya peningkatan jumlah sambungan rumah (SR) / pelanggan dan telah berfungsi Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Babat yang mempunyai kapasitas produksi 60 liter / detik. Sampai Desember 2004 realisasi pendapatan mencapai Rp. 2.598.219.000,- atau sekitar 57,90%. (3) Kegiatan usaha daerah pada PD Aneka Usaha Lamongan Jaya cukup mengalami peningkatan, hal ini dapat ditunjukkan dengan peningkatan aset modal dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 2.590.774.119,64 pada tahun 2004 atau meningkat sebesar 5,40 %. Dari peningkatan tersebut berdampak pada laba PD Aneka Usaha Lamongan Jaya sebesar Rp. 212.125.001,70,-. Bila dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp. 209.883.117,93,- atau naik sebesar 1,07 %.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Menyempurnakan sistem dan mekanisme keuangan perusahaan daerah secara berkesinambungan
- b. Meningkatkan akuntabilitas keuangan perusahaan daerah
- c. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas anggaran

2. Sasaran

- a. Mendorong tumbuh kembangnya perusahaan daerah.
- b. Peningkatan pembinaan dan penataan manajemen perusahaan daerah
- c. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perusahaan daerah
- d. Membangun jaringan dan mitra kerja dengan Pihak III (Swasta).

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Penanaman Modal memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan investasi pembangunan daerah** dengan strategi dan prioritas a) Meningkatkan mutu pelayanan prima investasi, b) Penataan sarana prasarana investasi, c) Penyebar luasan potensi investasi daerah, d) Tersedianya pusat informasi kajian investasi. **2. Pelayanan perijinan penanaman modal** dengan strategi dan prioritas a) Pemberian kemudahan persetujuan para investor, b) Merubah sikap dan cara aparaturnya dalam memberikan pelayanan secara profesional **3. Peningkatan kinerja perusahaan daerah** dengan strategi dan

prioritas a) Mendorong tumbuh kembangnya perusahaan daerah, b) Peningkatan pembinaan dan penataan manajemen perusahaan daerah, c) Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perusahaan daerah, d) Membangun jaringan dan mitra kerja dengan Pihak III (Swasta).

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Penanaman Modal sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : PENANAMAN MODAL

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERSERAAN BIAYA	KETERANGAN (Bd.)	URUTAN WETAS
1	Meningkatkan mutu pelayanan prima investasi	H.1.a	1 Pembuatan data potensi investasi daerah	Kab. Lamongan	-	Rp. 20,000,000.00	Baru	Indagrop
2	Penyediaan potensi investasi daerah	H.1.c	1 Penyediaan informasi investasi daerah	Kab. Lamongan	1 paket	Rp. 20,000,000.00	Baru	Beg. Penekonomian
3	Peningkatan Kinerja Perusahaan Daerah	H.3.a	1 Pengadaan dan pemasangan pipa diameter 200 mm	Puruk - Sukodadi Sukodadi - Poboowehyu	7500 m 6793 m	Rp. 1,038,461,538.00 Rp. 850,000,000.00	Baru Baru	PDAM PDAM
4	Peningkatan pembinaan dan pelatihan manajemen perusahaan daerah	H.3.b	1 Pembinaan dan evaluasi perusahaan daerah	Kab. Lamongan	PD. Benik Passar, PDAM, PD. ALLJ, Pabrik Pupuk Mahanini dan Pabrik Es	Rp. 75,000,000.00	Baru	Beg. Penekonomian
Jumlah Total						Rp. 2,093,461,538.00		

BIDANG KETENAGAKERJAAN

A. PENDAHULUAN

Tenaga kerja menempati makna yang penting bagi kehidupan berbangsa bahkan mungkin juga merupakan faktor penentuan kelangsungan kehidupan suatu bangsa yang bersangkutan baik fisik maupun kultural, sedangkan bekerja mempunyai makna banyak dan luas yang ditujukan untuk memelihara kelangsungan hidup badaniah maupun rohaniah dengan menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan seseorang.

Persoalan yang pelik adalah terhadap persediaan tenaga kerja di Indonesia umumnya dan Lamongan khususnya, sebagian besar masih terdiri dari tenaga kerja yang tidak terlatih dengan penyebaran yang tidak seimbang antar wilayah/daerah sedangkan kebutuhan pasar kerja diperlukan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai/tepat dan memadai, sehingga terjadi ketimpangan antar daerah/wilayah yang menyebabkan terjadinya kesukaran-kesukaran seperti kesukaran berpindah ke lain daerah, pengangkutan, perumahan, kesukaran syarat-syarat kerja. Betapapun melimpah ruahnya kekayaan alam suatu daerah tanpa adanya tenaga kerja yang terampil untuk menggali dan mengolahnya maka kekayaan alam tersebut tidak ada artinya untuk kemakmuran masyarakat.

Pertumbuhan penduduk yang cepat berakibat pula terhadap peningkatan pertumbuhan angkatan kerja sedangkan kesempatan kerja tidak sanggup mengikuti percepatan dari pertumbuhan angkatan kerja yang menimbulkan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran, solusinya adalah menciptakan dan atau mewujudkan kesempatan-kesempatan kerja baik formal maupun informal secara luas bagi angkatan kerja atau penduduk usia kerja sehingga dapat diserap oleh pasar kerja.

Pemerintah berusaha secara optimal mengembangkan potensi inisiatif dan daya kreasi setiap tenaga kerja dalam rangka penanaman serta mempertinggi kecerdasan dan keterampilan insan kerja yang diharapkan dapat tercapainya tingkat produksi barang dan jasa yang tinggi dan produktivitas tenaga kerja yang optimal.

B. KONDISI UMUM

Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2003 yang sebanyak 1.224.817 jiwa, usia pencari kerja pemula (15-19 tahun) ada 110.159 orang, (20-24 tahun) ada 87.469 orang dan usia (25-29 tahun) sebanyak 88.685 orang, dari jumlah tersebut berdasarkan data yang ada tahun 2004 di Kabupaten Lamongan

menunjukkan bahwa angka pencari kerja telah tercatat sebanyak 7.576 orang, sementara berdasarkan pendataan lapangan kerja yang ada hanya membutuhkan 455 orang, dengan realisasi penempatan tenaga kerja sebanyak 419 orang. Sedangkan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tahun 2004 tercatat sebanyak 234 orang. Sedangkan Tenaga Kerja Formal tercatat sebanyak 9.511 orang dan tenaga Kerja Informal terdidik tercatat 160 orang dengan data pengangguran mumi tercatat sebanyak 21.866 orang.

Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh atau dengan pertumbuhan kesempatan kerja merupakan kondisi yang faktual dewasa ini dan merupakan dasar persoalan manajemen ketenagakerjaan hal ini pula yang paling banyak membutuhkan energi pemecahannya, belum lagi persoalan TKI ilegal disamping peraturan-peraturan ketenagakerjaan di luar negeri yang kurang mendukung terhadap tenaga kerja Indonesia yang akan mencari penghidupan di luar negeri.

Banyak persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah dibidang pembangunan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan baik untuk kebutuhan industri dalam negeri maupun luar negeri disamping persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga kerja sendiri yang merupakan akar dasar persaingan teknikal maupun intelektual masyarakat guna mencukupi dan meningkatkan derajat kehidupannya.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Meningkatkan ketrampilan serta menumbuh kembangkan motivasi dan jiwa wira usaha.
- b. Menciptakan perluasan kesempatan kerja dan upaya penempatan tenaga kerja melalui sistem terpadu.
- c. Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan Undang-undang Ketenagakerjaan.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja.
- b. Tersedianya Informasi Pasar Kerja.
- c. Terlaksananya Pemberangkatan/Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Keluar Negeri.
- d. Meningkatkan Pengetahuan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
- e. Meningkatkan Hubungan Industrial.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM pencari kerja** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan sarana dan prasarana untuk pelatihan tenaga kerja, b) Menyiapkan SDM pencari kerja dengan memberikan pembekalan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan, c) Mewujudkan perluasan kesempatan kerja formal/informal secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, d) Mewujudkan penyediaan sistem informasi bursa kerja, lokal, regional, nasional dan internasional. **2. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja** dengan strategi dan prioritas a) Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan kepada perusahaan dan masyarakat, b) Memfasilitasi pemberian hak dan perlindungan bagi tenaga kerja khususnya wanita, TKI dan TKW, c) Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan ketenagakerjaan berusaha, d) Peningkatan produktifitas dan pelatihan ketrampilan tenaga kerja

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

BIDANG : KETENAGAKERJAAN

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KESATUAN PROYEK	LOKASI	VOLUME	REKONSTRUKSI BAYI	KETERANGAN (RS)	USULAN BERTAMBAH
1	Pengembangan sarana dan prasarana untuk pelatihan tenaga kerja	1.1.a	1. Pengadaan modal training Unit (MTU) sesuai peruntukannya 2. Pengadaan modal mesin 3. Pengadaan kendaraan roda 2 4. Pembangunan gedung dan BLK	Kab. Lamongan	1 unit	Rp 750.000.000,00	Baru	Tenaga Kerja
2	Meningkatkan SDM pencari kerja dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan	1.1.b	1. Pengadaan pelatihan keterampilan tenaga kerja 2. Pembinaan, Bimbingan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI)	Kab. Lamongan	100 orang Pembinaan 100 orang	Rp 175.000.000,00 Rp 750.000.000,00	Baru	Tenaga Kerja
3	Meningkatkan pendidikan dalam informasi bursa kerja lokal, regional, nasional dan internasional	1.1.c	1. Informasi Bursa Kerja	Kab. Lamongan	10 orang	Rp 15.000.000,00	Laputan	Tenaga Kerja
4	Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pengusaha	1.2.a	1. Sosialisasi peraturan tenaga kerja KALAMAD dan AMAN	Kab. Lamongan	20 kali	Rp 25.000.000,00	Baru	Tenaga Kerja
5	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya	1.2.b	1. Sosialisasi spaes minimum Kabupaten 2008 2. Monitoring/pembinaan terhadap organisasi Serikat Pekerja 3. Monitoring/pembinaan terhadap Organisasi Pengusaha 4. Monitoring/pembinaan terhadap LKS (Kartu) 5. Pembinaan pendirian dan pengisian UMR Tahun 2007 6. Pembinaan norma ketenagakerjaan 7. Pembinaan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait 8. Survey lapangan tidak langsung (KALAM) 9. Monitoring Upah Minimum Kab. (UMK) 10. Monitoring Tindakan Har Raya (THR)	Kab. Lamongan	100 pertemuan 30 organisasi 1 organisasi 15 kali 5 kali 100 orang 100 orang 12 Pagar 200 pertemuan 100 pertemuan	Rp Rp 3.000.000,00 Rp 100.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 2.500.000,00	Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru	Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja
Jumlah Total						Rp 12.075.000.000,00		

BIDANG KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Derajat kesehatan yang optimal merupakan dambaan bagi setiap orang, oleh karena itu perlu diupayakan semaksimal mungkin dan dijaga terus-menerus. Kesehatan sangat berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia sehingga penanganan dibidang ini dilakukan lintas sektor dan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Pembangunan dibidang kesehatan adalah tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan Pembangunan Nasional.

Kesehatan adalah investasi yang secara nasional diprogramkan menuju Lamongan Sehat 2010 mengandung makna bahwa kesehatan adalah kekayaan dan anugrah yang patut disyukuri, dijaga, dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. dengan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten memiliki peluang untuk merumuskan perencanaan strategik dalam upaya mewujudkan masyarakat sehat 2010 yang dituangkan dalam akuntabilitas pembangunan kesehatan. Dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah kita upayakan bersama ini nampak hasilnya secara nyata dengan adanya penilaian dan penghargaan yang telah kita terima berupa Manggala Karya Bhakti Husada dan Ksatria Bhakti Husada dari Presiden Republik Indonesia, meskipun demikian kita tidak boleh terlena, upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas, tempat-tempat pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit juga terus dikembangkan dalam upaya pencegahan dan penyembuhan serta pemulihan yang paripurna dilaksanakan secara serasi, terpadu serta terus dikembangkannya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan.

B. KONDISI UMUM

Untuk menunjang pelayanan di Bidang Kesehatan di Kabupaten Lamongan, telah didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana antara lain : Pusling sebanyak 36 Puskesmas 33 unit, Puskesmas Perawatan 108 unit, Polindes dengan 238 unit, Posyandu 1.740 unit. Sedangkan untuk menunjang pelayanan masyarakat di Bidang Kesehatan pada tahun 2004 telah tersedia Sumber Daya Manusia Kesehatan antara lain : Tenaga Medis sebanyak 142 orang, Paramedis Perawatan 891 orang, Non Paramedis Perawatan 200 orang dan Non Perawatan 382 oarang, serta didukung oleh Tenaga Kader Kesehatan sebanyak 7.932 orang, Instansi

Swasta 3 unit, Balai Pengobatan 20 unit, Rumah Bersalin 12 unit, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) 12 unit dan Apotik sebanyak 21 unit.

Dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan melalui program-program Pelayanan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Rujukan, Kesehatan Keluarga, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Famasi, Makanan dan Minuman, dan Sumber Daya Kesehatan.

Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan terdepan yang melayani masyarakat, pada tahun 2000 kunjungan rawat jalan sebanyak 896.567 orang (80,35 %) dari jumlah penduduk turun menjadi 437.301 orang (35,81 %) di tahun 2004. Namun pelayanan kesehatan rujukan yang dilakukan Rumah Sakit Umum pada tahun 2004 sebanyak 62.164 orang atau mengalami peningkatan sebesar 61,84 % bila dibanding tahun 2000 yang hanya mencapai 32.357 orang.

Peningkatan jumlah kunjungan ini disebabkan karena semakin banyaknya dibuka Poli Pelayanan yang disertai dengan adanya Dokter Spesialis. Jumlah kunjungan pasien Rawat Inap di puskesmas di tahun 2000 sebanyak 12.161 orang meningkat menjadi 17.652 orang pada tahun 2004. Kecenderungan peningkatan ini lebih banyak disebabkan adanya fasilitas Rawat Inap yang ada disebagian Puskesmas, sedangkan kunjungan pasien Rawat Inap di rumah sakit tahun 2000 menjadi sebanyak 5.274 orang di tahun 2004.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Terwujudnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat terutama keluarga kurang mampu;
- b. Terwujudnya peningkatan/perbaikan gizi masyarakat dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat gizi buruk;
- c. Terwujudnya peningkatan sumberdaya kesehatan dan manajemen pembangunan kesehatan;
- d. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang paripurna dengan cara dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan dengan cepat, tepat dan rama bagi masyarakat;

2. Sasaran

- a. Penurunan Angka Kematian Bayi (IMR) dan Angka Kematian Ibu serta peningkatan umur harapan hidup;
- b. Angka Kematian akibat penyakit menular dapat lebih diturunkan lagi, untuk Angka Kesakitan diare diharapkan dapat ditekan, Angka Kesakitan dikarenakan ISPA, diharapkan tinggal 10 %, Penyakit Malaria tetap rendah, Penyebaran dan kecenderungan, penyakit demam berdarah dapat ditekan, Penyakit TBC Paru pada tahun 2006 diharapkan prevalensinya rendah, Penyakit Kusta pada tahun 2006 diharapkan tinggal 1 per 10.000 penduduk;
- c. Penderita kurang energi Protein (KEP) pada Balita Anemia Gizi pada Ibu dan Gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKI) di desa endemik berangsur-angsur untuk di tekan;
- d. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih ditingkatkan didahului oleh pemeriksaan kehamilan sedini mungkin, dengan upaya ini diharapkan angka kematian ibu dapat menurun;
- e. Puskesmas-puskesmas di Kabupaten Lamongan tetap dalam keadaan strata maju;
- f. RSD Kelas C Dr. Soegiri Lamongan selain dapat lebih meningkatkan lagi pelayanannya kepada masyarakat juga tenaga spesialisiknya;
- g. Kemampuan laboratorium Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah (RSD) serta pelayanan rujukan dapat dikembangkan dan ditingkatkan lagi;
- h. Penggunaan Obat Esensial dan Generik makin meluas di setiap unit pelayanan kesehatan pemerintah/swasta dengan distribusi yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- i. Obat tradisional yang telah terbukti keamanan dan khasiatnya dapat dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan;
- j. Pelayanan air bersih untuk penduduk perkotaan dan pedesaan sedangkan penduduk pedesaan yang menggunakan jamban keluarga dan SPAL dari tahun ke tahun meningkat;
- k. Tenaga kesehatan ditingkatkan mutu dan jumlahnya berdasarkan beban kerja dan kapasitasnya;

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Kesehatan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi : **1. Peningkatan mutu keterjangkauan pelayanan kesehatan sarana dan prasarana Kesehatan** dengan strategi dan prioritas a) Ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai, b) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan Plus, c) Peningkatan SDM Aparat Kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan dan perawatan, d) Peningkatan dan pembinaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), e) Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan, f) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, g) Ketersediaan obat yang memadai. **2. Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi keluarga miskin, b) Jaminan asuransi kesehatan bagi keluarga miskin. **3. Peningkatan mutu dan akses pelayanan KIA, reproduksi dan Gizi** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan kesehatan ibu dan anak, b) Peningkatan kesehatan reproduksi dan usia lanjut, c) Perbaikan gizi masyarakat. **4. Peningkatan mutu ketersediaan obat dan perlindungan obat dan makanan/minuman berbahaya** dengan strategi dan prioritas a) Penyediaan obat yang memadai, b) Peningkatan distribusi obat, c) Intensifikasi pengawasan obat dan makanan khususnya beredar obat palsu, penyalahgunaan obat NAPZA dan pembinaan obat tradisional. **5. Pemberdayaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan peran posyandu sebagai wadah pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, b) Peningkatan promosi kesehatan, c) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). **6. Penyehatan lingkungan dan permukiman** dengan strategi dan prioritas a) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB), b) Penyehatan lingkungan permukiman, c) Penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih, d) Perbaikan perilaku sehat melalui lingkungan sehat.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Kesehatan sebagaimana terlampir :

MURDANO - MEREDITH

Bidang Kesehatan
Hussein 1

BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka telah terjadi pembaharuan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam upaya mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa di Kabupaten Lamongan, senantiasa berusaha agar setiap warga mendapatkan layanan pendidikan tanpa mengenal latar belakang baik yang normal maupun yang berkelainan yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, berstatus sosial ekonomi tinggi, menengah maupun rendah. Kesemuanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, sekurang-kurangnya pendidikan dasar sembilan tahun yang dalam perwujudannya menjadi tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Pendidikan serta peranan faktor keluarga.

Pembangunan di bidang ini merupakan bidang yang memiliki peranan penting dalam mempersiapkan dan membentuk anak didik/generasi muda sebagai generasi penerus dan berkualitas di masa depan, sehingga kegiatan pembangunan yang mendukung ke arah ini meliputi Pembangunan pada : Pembinaan pendidikan baik dasar, menengah, tinggi, bantuan operasional, perawatan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana, Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pembinaan dan pengembangan Generasi muda dan olahraga di lingkungan sekolah serta Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah.

B. KONDISI UMUM

Secara Umum tingkat pendidikan masyarakat Lamongan relatif rendah, rata-rata penduduk berpendidikan setingkat SLTP. Angka Partisipasi Murni SD/MI tahun 2004 sebesar 99,43 %, Angka Partisipasi Murni SLTP/MTS sebesar 78,50 % sedangkan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA lebih rendah sebesar 45,39 %.

Berdasarkan hasil base line survey tahun 2002 diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan penyandang Buta Huruf/Aksara yang berusia 10-44 tahun berjumlah 15.077 orang. Terhadap permasalahan ini pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah secara bertahap setiap tahun berupaya melakukan pemberantasan Buta Huruf melalui Program Keaksaraan Fungsional (KF) dengan melibatkan lembaga lain yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan.

Perkembangannya penyandang Buta Aksara Tahun 2004 berkurang menjadi 12.453 orang.

Tantangan umum pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lamongan adalah bagaimana membangun sistem pendidikan agar semakin mampu membentuk manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri serta tanggap menghadapi perubahan jaman, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan tuntutan pembangunan, kenyataan menunjukkan bahwa kualitas produk pendidikan dari daya serapnya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, peningkatan rata-rata pendidikan bagi semua warga negara serendah-rendahnya berpendidikan SLTP merupakan prasarat penting untuk memasuki era global dengan mewujudkan pemerataan pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu.

Permasalahan pokok yang mendasar adalah masih kurangnya kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan dan rendahnya mutu pendidikan seperti : rendahnya kualitas lulusan para siswa, belum optimalnya kualitas proses belajar mengajar, belum optimalnya kemampuan mengajar dari kalangan guru-guru, rendahnya manajemen sekolah serta kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Sebagaimana diamanatkan dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (2) : * Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya *, salah satu hambatannya adalah kondisi sarana dan prasarana Gedung Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Lamongan yang berjumlah 684 lembaga, yang kondisinya baik sejumlah 226 lembaga, kondisi rusak berat berjumlah 174 lembaga dan rusak sedang berjumlah 284 lembaga. Upaya rehabilitasi selalu dilakukan setiap tahun, akan tetapi karena tingkat kerusakannya yang parah dan membahayakan siswa, kiranya perlu memprioritaskan penanganan rehabilitasi secara tuntas.

Penyelenggaraan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan. Secara umum salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Lamongan adalah lemahnya manajemen sekolah (Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan Dewan Guru) dan kurangnya partisipasi masyarakat secara langsung dibidang pendidikan. Disadari memang kekuatan keberhasilan pendidikan harus dimulai dari pengelolaan secara profesional manajemen sekolah baik sekolah negeri maupun swasta dan mampu menciptakan rasa memiliki lembaga sekolah. Solusi kearah pengelolaan sekolah yang baik perlu kiranya menerapkan dan mengembangkan Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diseluruh lembaga pendidikan. Program ini telah dirintis dan diuji coba oleh UNICEF & UNISCO di Kabupaten Lamongan sejak tahun 2002.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dibidang pendidikan seusia dengan amanat Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang SISDIKNAS Nomor : 20 Tahun 2003, sehingga mutu pendidikan di Kabupaten Lamongan lebih dapat ditingkatkan yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja terhadap pencapaian pelaksanaan tugas;
- b. Tertatanya manajemen pengelolaan pendidikan di daerah yang berkualitas dan profesional yang mampu meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatnya anak usia sekolah untuk memperoleh kesempatan dan pemerataan pendidikan;
- d. Menekan sekecil mungkin anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah (Drop Out);
- e. Meningkatnya mutu pendidikan (sarana dan prasarana, kurikulum, SDM Guru dan Lulusan) disetiap jenjang pendidikan baik SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta;
- f. Terwujudnya Manajemen Sekolah yang profesional di setiap lembaga pendidikan baik SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta;

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan serta penuntasan Wajib Belajar Diknas 9 Tahun** dengan strategi dan prioritas a) Meningkatkan daya tampung siswa, b) Penurunan angka putus sekolah, c) Optimalisasi pelaksanaan wajar diknas 9 tahun, d) Memberikan bantuan biaya minimal kepada siswa SD/MI dan SLTP/MTs bagi keluarga miskin, e) Memberikan bantuan Biaya Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI, f) Meningkatkan angka partisipasi pada semua jenjang pendidikan, g) Optimalisasi kegiatan keaksaraan fungsional untuk menekan angka buta huruf, h) Optimalisasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS), i)

Mengembangkan Program GNOTA, j) Mewujudkan Kejar Pakat A, B dan C. 2. **Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan** dengan strategi dan prioritas a) Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), b) Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), c) Pengendalian Mutu Sekolah Negeri/Swasta melalui Badan Akreditasi Sekolah (BAS), d) Meningkatkan standarisasi Mutu Pendidikan PADU, TK, SD/MI, MTs/SLTP, SLTA/MA, e) Mengupayakan pemerataan dan pendayagunaan guru untuk efisiensi, f) Mengembangkan karya ilmiah remaja melalui berbagai lomba, g) Memberikan reward kepada siswa yang berprestasi, h) Mengembangkan dan menanamkan budi pekerti kepada siswa, i) Pengembangan teknologi informasi, j) Meningkatkan dan mengembangkan disiplin kegiatan belajar mengajar, k) Meningkatkan Kesejahteraan Guru PNS/Guru Bantu/Guru Ngaji/GTT/KJM guru, l) Meningkatkan Mutu Perpustakaan Sekolah, m) Pembinaan Kewirausahaan Pemuda di Sekolah. 3. **Peningkatan kualitas SDM Guru/Pendidik** dengan strategi dan prioritas a) Meningkatkan Mutu profesi (kualifikasi dan kompetensi) Guru, b) Pembinaan dan pengembangan karier Guru, c) Peningkatan kemampuan profesional guru negeri/swasta dan PLS melalui pendidikan dan pelatihan. 4. **Peningkatan mutu seni dan budaya daerah** dengan strategi dan prioritas a) Intensifikasi Apresiasi dan Kreativitas Seni dan Budaya Daerah, b) Optimalisasi Penggalan nilai-nilai Budaya Tradisional Daerah, c) Pengembangan Potensi Seni dan Budaya Daerah, d) Dokumentasi nilai-nilai Budaya Tradisional dan Musium Purbakala, e) Tersedianya Fasilitas Gedung dan Peralatan Kesenian Daerah, f) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pada prasasti dan tempat-tempat ziarah yang berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan dalam pelaksanaan Hari Jadi Lamongan. 5. **Peningkatan Mutu sarana dan prasarana pendidikan** dengan strategi dan prioritas a) Pembangunan/Rehabilitasi/Revitalisasi Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah, b) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Olah raga guna mendukung prestasi olah raga siswa.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	PRIORITAS DAIRAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PENGALAN BIAYA	KETERANGAN (Btl.)	USULAN INSTANSI
1	Meningkatkan mutu tenaga kerja	K.1.a	1. Diklatasional, Binaan, Kelas Baru SD, SDN Pendidikan, SDN Bimbingan IV, SDN Sumbawa I	Datut, Bonting, Suband	3 Lokal 3 Lokal 1 Lokal	Rp 180.000.000,00 Rp 180.000.000,00 Rp 60.000.000,00	Baru, Baru, Baru	P. dan K. P. dan K. P. dan K.
2	Mendukung belajar lebih banyak melalui akses SCAM dan SLTMATIS bagi keluarga miskin	K.1.d	2. Diklatasional, Binaan, Kelas Baru, (Dit. 2) SAKSI 1 Kambingbaru, SAKSI Negeri 2 Sakran, SAKSI 1 Mekar	Kambingbaru, Sakran, Mekar	4 orang 2 orang 2 orang	Rp 280.000.000,00 Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00	Baru, Baru, Baru	P. dan K. P. dan K. P. dan K.
3	Mendukung belajar lebih banyak melalui akses sekolah (GAS) SDAM	K.1.e	3. Diklatasional, Binaan, Kelas Baru, (Dit. 2) SAKSI 1 Kambingbaru, SAKSI Negeri 2 Sakran, SAKSI 1 Mekar	Kambingbaru, Sakran, Mekar	4 orang 2 orang 2 orang	Rp 280.000.000,00 Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00	Baru, Baru, Baru	P. dan K. P. dan K. P. dan K.
4	Mengembangkan program QHOTA	K.1.f	4. Diklatasional, Binaan, Kelas Baru, (Dit. 2) SAKSI 1 Kambingbaru, SAKSI Negeri 2 Sakran, SAKSI 1 Mekar	Kambingbaru, Sakran, Mekar	4 orang 2 orang 2 orang	Rp 280.000.000,00 Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00	Baru, Baru, Baru	P. dan K. P. dan K. P. dan K.
5	Mengembangkan program QHOTA	K.1.g	5. Diklatasional, Binaan, Kelas Baru, (Dit. 2) SAKSI 1 Kambingbaru, SAKSI Negeri 2 Sakran, SAKSI 1 Mekar	Kambingbaru, Sakran, Mekar	4 orang 2 orang 2 orang	Rp 280.000.000,00 Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00	Baru, Baru, Baru	P. dan K. P. dan K. P. dan K.
6	Mengembangkan program QHOTA	K.1.h	6. Diklatasional, Binaan, Kelas Baru, (Dit. 2) SAKSI 1 Kambingbaru, SAKSI Negeri 2 Sakran, SAKSI 1 Mekar	Kambingbaru, Sakran, Mekar	4 orang 2 orang 2 orang	Rp 280.000.000,00 Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00	Baru, Baru, Baru	P. dan K. P. dan K. P. dan K.
7	Mengembangkan program QHOTA	K.1.i	7. Diklatasional, Binaan, Kelas Baru, (Dit. 2) SAKSI 1 Kambingbaru, SAKSI Negeri 2 Sakran, SAKSI 1 Mekar	Kambingbaru, Sakran, Mekar	4 orang 2 orang 2 orang	Rp 280.000.000,00 Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00	Baru, Baru, Baru	P. dan K. P. dan K. P. dan K.

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PENDAHUAN BIAYA	KETERANGAN (BL)	URAIAN INSTANSI
8.	Pengembangan mutu layanan negeri / swasta melalui Sistem Akreditasi Sekolah (BAS)	K.2.c	1. Pengembangan mutu Sekolah Negeri/Swasta melalui BAS 2. Mengadakan pembinaan akreditasi sekolah 3. Pengembangan mutu Sekolah Negeri/Swasta melalui BAS SAMPUSwasta 4. Bantuan Negeri/GOPNG	27 Kecamatan 108 lembaga SD/TK 27 Kecamatan	50 Lembaga Kec. 3 Lumb 50 Lembaga	Rp 100.000.000,00 Rp 54.000.000,00 Rp 125.000.000,00 Rp 30.000.000,00	Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan	P dan K P dan K P dan K Bag. Keumatan
9.	Meningkatkan standar mutu pendidikan PAUD, TK, SD/SLTP, SLTA/MA	K.2.d	1. Lomba MPK SMP 2. Olimpiade SAINS/SMK 3. Lomba MPK SMP 4. Olimpiade SAINS/SMK 5. Lomba pidato dan ngaji SAINS/SMK 6. Lomba siswa berprestasi SMP 7. Lomba siswa berprestasi SMA 8. Lomba guru berprestasi SAINS/SMK	Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan	126 SMP 80 SMA 378 orang 500 orang 215 orang 250 orang 120 orang 85 orang	Rp 37.800.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp 37.800.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 21.500.000,00 Rp 37.800.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 6.500.000,00	Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru	P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K
10.	Mengajukan pemenuhan dan pengembangan guru untuk alfabet	K.2.e	1. Musyawarah guru SD	SDN dalam Kab. Ling	135 guru	Rp 6.750.000,00	Lanjutan	P dan K
11.	Mengembangkan karya inovatif melalui lomba/kegiatan kreatif	K.2.f	1. TOT Pembinaan KIR SMA/SMK 2. TOT Pembinaan KIR SMP/MS 3. LKIR SMA/SMK 4. LKIR SMP/MS 5. LKIR SMP 6. LKIR SMA 7. LKIR SMK	Lamongan Lamongan Lamongan/Hus Lamongan/Hus Lamongan Lamongan Lamongan	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 128 SMP 80 SMA 25 SMA	Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 12.800.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 2.700.000,00	Lanjutan Lanjutan Baru Baru Baru Baru Baru	P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K
12.	Mendukung prestasi siswa yang berprestasi	K.2.g	1. Pembinaan reward siswa berprestasi SMP/MS 2. Pembinaan reward siswa berprestasi SMP/MS 3. Pembinaan reward prestasi berprestasi SMP/MS 4. Olimpiade MPK, Lomba Mata Pelajaran TVOSD siswa berprestasi, lomba HAH, kreatifitas PJB dan pgsd SD 5. Melaksanakan PORPA yang diikuti oleh pelajar SMP, SMA, SMK, MS 6. Melaksanakan POR SD TK Kabupaten 7. Melaksanakan lomba jalan Suci dan mengikuti kegiatan di TL. Pro.	Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan	1 paket 1 paket 1 paket 750 Siswa 27 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan	Rp 17.500.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 80.000.000,00 Rp 75.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp 7.000.000,00	Lanjutan Lanjutan Baru Baru Baru Baru Baru	P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K
13.	Mengembangkan dan memberikan budi pekerti kepada siswa	K.2.h	1. LDKS SAINS/MAINS 2. LDKS SMP 3. TOT KMD Pemula One SAMA 4. TOT KMD Pemula One SMP 5. Pelatihan Pendidikan	Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp 25.000.000,00	Lanjutan Baru Lanjutan Lanjutan Baru	P dan K P dan K P dan K P dan K P dan K
14.	Meningkatkan kemampuan guru PNS/guru binau guru ngaji/GTTAKM guru	K.2.i	1. Musyawarah GTT/TTY SD 2. Bantuan pembinaan pendidikan 3. Bantuan kepada guru ngaji 4. Bantuan kemampuan guru swasta 5. Bantuan kemampuan guru TK	Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan	800 guru - - - -	Rp 960.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00 Rp 800.000.000,00 Rp 460.000.000,00	Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan	P dan K Bag. Keumatan Bag. Keumatan Bag. Keumatan Bag. Keumatan
15.	Meningkatkan mutu proses (mutualitas dan kompetensi) guru	K.3.a	1. Pelatihan Guru Teleson	TVOSD	156 guru	Rp 10.800.000,00	Lanjutan	P dan K

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BIAYA	KETERANGAN (DL)	URAIAN BENTANG
			- Rehabilitasi Bangunan Gedung					
			1. SAMPN 3 Ngimbang	Kec. Ngimbang	2 ruang	Rp 50.000.000,00	Baru	P dan K
			2. SAMPN 1 Pucuk	Kec. Pucuk	2 ruang	Rp 40.000.000,00	Baru	P dan K
			3. SAMPN 2 Lembang	Kec. Lembang	5 ruang	Rp 60.000.000,00	Baru	P dan K
			4. SAMPN 10 Minto	Kec. Minto	2 ruang	Rp 40.000.000,00	Baru	P dan K
			5. SAMPN 1 Cigati	Kec. Cigati	3 ruang	Rp 50.000.000,00	Baru	P dan K
			6. SAMPN 1 Kumbang	Kec. Kumbang	2 ruang	Rp 40.000.000,00	Baru	P dan K
			7. SAMPN 2 Ngimbang	Kec. Ngimbang	3 ruang	Rp 55.000.000,00	Baru	P dan K
			8. SAMPN 1 Sacedah	Kec. Sacedah	2 ruang	Rp 40.000.000,00	Baru	P dan K
			9. SAMPN 1 Tar	Kec. Tar	2 ruang	Rp 40.000.000,00	Baru	P dan K
			10. SAMPN 11 Karangreng	Kec. Karangreng	2 ruang	Rp 40.000.000,00	Baru	P dan K
			11. SAMPN 11 Gede Sukiranti Kumbang	Kec. Kumbang	2 ruang	Rp 40.000.000,00	Baru	P dan K
			12. SAMPN 11 Suge	Kec. Suge	2 ruang	Rp 40.000.000,00	Baru	P dan K
			13. SAMPN 11 Sacedah	Kec. Sacedah	2 ruang	Rp 40.000.000,00	Baru	P dan K
			14. SAMPN 11 Suke	Kec. Suke	4 ruang	Rp 40.000.000,00	Baru	P dan K
			15. SAMPN 2 Pucuk	Kec. Pucuk	3 ruang	Rp 30.000.000,00	Baru	P dan K
			16. SAMPN 11 Karangreng	Kec. Karangreng	3 ruang	Rp 30.000.000,00	Baru	P dan K
			17. SAMPN 1 Lembang	Kec. Lembang	1 ruang	Rp 15.000.000,00	Baru	P dan K
			18. SAMPN 11 Kumbang	Kec. Kumbang	2 ruang	Rp 30.000.000,00	Baru	P dan K
			20. SAMPN 1 Lami	Kec. Lami	3 ruang	Rp 60.000.000,00	Baru	P dan K
			21. SAMPN 2 Lami	Kec. Lami	4 ruang	Rp 80.000.000,00	Baru	P dan K
			- Pembangunan Ruang Laboratorium Sektoral					
			1. SAMPN 11 Pucuk Alfiah Sektoral	Kec. Sektoral	1 ruang	Rp 150.000.000,00	Baru	P dan K
			2. SAMPN 1 Buluk	Kec. Buluk	1 ruang	Rp 150.000.000,00	Baru	P dan K
			3. SAMPN 1 Kumbang	Kec. Kumbang	1 ruang	Rp 150.000.000,00	Baru	P dan K
			- Pembangunan Ruang Perpustakaan					
			1. SAMPN 1 Kumbang	Kec. Kumbang	1 ruang	Rp 90.000.000,00	Baru	P dan K
			2. SAMPN 4 Lembang	Kec. Lembang	1 ruang	Rp 90.000.000,00	Baru	P dan K
			3. SAMPN 11 Lami	Kec. Lami	1 ruang	Rp 90.000.000,00	Baru	P dan K
			- Pembangunan Ruang Kandang					
			1. SAMPN 1 Brondong	Kec. Brondong	1 ruang	Rp 90.000.000,00	Baru	P dan K
			2. SAMPN 3 Sektoral	Kec. Sektoral	1 ruang	Rp 90.000.000,00	Baru	P dan K
			3. SAMPN 1 Buluk	Kec. Buluk	1 ruang	Rp 90.000.000,00	Baru	P dan K
			4. SAMPN 1 Kumbang	Kec. Kumbang	1 ruang	Rp 90.000.000,00	Baru	P dan K
			- Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan					
			1. Pengadaan Komputer untuk 2 SAMPN	Kec. Sektoral	20 unit	Rp 120.000.000,00	Baru	P dan K
			2. Pengadaan Perabotan Bangsal di 2 SAMPN	Kec. Brondong	2 unit	Rp 75.000.000,00	Baru	P dan K
			- Rehabilitasi Gedung MI					
			1. MI Kumbang	Kec. Kumbang	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			2. MI Kumbang	Kec. Kumbang	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			3. MI Kumbang	Kec. Kumbang	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			4. MI Kumbang	Kec. Kumbang	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BIAYA	KETERANGAN (BL.)	URUTAN INSTANSI
5.			Mt Darul Ulum	Kec. Delat	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
6.			Mt Basmal Ulum	Dk. Olateng	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
7.			Mt Alimul Hasyim Darul Ulum	Dk. Hekun	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
8.			Mt Darul Salamah	Kec. Karangasem	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
9.			Mt Al-Naim	Dk. Sumbung	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
10.			Mt Rahmatul Ummah	Dk. Karangasem	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
11.			Mt Alamiyah	Kec. Olateng	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
12.			Mt Ihsanul Ulum	Dk. Ronggong	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
13.			Mt Tawakkul Alkar	Dk. Margasari	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
14.			Mt Alamiyah	Kec. Kallang	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
15.			Mt Ihsanul Ulum	Dk. Pongro	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
16.			Mt Al-Naim	Dk. Sumbung	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
17.			Mt Rabbul Ulum	Dk. Pongro	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
18.			Mt Al-Naim	Kec. Pongro	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
19.			Mt Al-Naim	Dk. Pongro	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
20.			Mt Al-Naim	Dk. Pongro	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
21.			Mt Al-Naim	Kec. Sukan	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
22.			Mt Al-Naim	Dk. Sukan	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
23.			Mt Al-Naim	Kec. Karangasem	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
24.			Mt Al-Naim	Dk. Karangasem	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
25.			Mt Al-Naim	Dk. Karangasem	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
26.			Mt Al-Naim	Dk. Karangasem	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
27.			Mt Al-Naim	Dk. Karangasem	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
28.			Mt Al-Naim	Kec. Madura	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
29.			Mt Al-Naim	Dk. Madura	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
30.			Mt Al-Naim	Dk. Madura	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
31.			Mt Al-Naim	Kec. Lurah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
32.			Mt Al-Naim	Dk. Lurah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
33.			Mt Al-Naim	Dk. Lurah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
34.			Mt Al-Naim	Kec. Solok	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
35.			Mt Al-Naim	Dk. Solok	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
36.			Mt Al-Naim	Dk. Solok	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
37.			Mt Al-Naim	Kec. Brondong	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
38.			Mt Al-Naim	Dk. Brondong	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
39.			Mt Al-Naim	Dk. Brondong	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEMANTANPROYEK	LOKASI	VOLUME	PEROGRAH BAYAT	KETERANGAN (BIL.)	URUTAN INSTANSI
40			M. Derasan	Kec. Mering	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
41			M. Tarkiyah Alim Mqam	Des. Tarkiyah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
42			M. Tarkiyah Alim Mqam	Des. Tarkiyah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
43			M. Mersud Huda	Kec. Banteng	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
44			M. Daul Ulu	Des. Sumbawud	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
45			M. Alim	Des. Tarkiyah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
46			M. Derasan	Kec. Ngimbang	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
47			M. Alim	Des. Gading Ngimbang	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
48			M. Alim	Kec. Banteng	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
49			M. Mersud Huda	Des. Tarkiyah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
50			M. Mersud Huda	Des. Tarkiyah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
51			M. Mersud Huda	Kec. Banteng	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
52			M. Mersud Huda	Des. Tarkiyah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
53			M. Mersud Huda	Des. Tarkiyah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
54			M. Alim	Kec. Banteng	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
55			M. Daul Ulu	Des. Sumbawud	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
56			M. Alim	Des. Tarkiyah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
57			M. Daul Ulu	Kec. Banteng	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
58			M. Tarkiyah Alim	Des. Tarkiyah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
59			M. Alim	Des. Tarkiyah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
60			M. Alim	Des. Tarkiyah	2 x 7 x 8 m2	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
Pembangunan Infrastruktur - Sarana Prasarana Gedung SD								
1			SD Tarkiyah	Lamongan	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
2			SD Sumbawud	Lamongan	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
3			SD Pengkajene	Lamongan	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
4			SD Sumbawud	Lamongan	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
5			SD Sumbawud	Des. Tarkiyah	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
6			SD Sumbawud	Des. Tarkiyah	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
7			SD Sumbawud	Des. Tarkiyah	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
8			SD Sumbawud	Des. Tarkiyah	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
9			SD Sumbawud	Des. Tarkiyah	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
10			SD Sumbawud	Des. Tarkiyah	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
11			SD Sumbawud	Des. Tarkiyah	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
12			SD Sumbawud	Des. Tarkiyah	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
13			SD Sumbawud	Des. Tarkiyah	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
14			SD Sumbawud	Des. Tarkiyah	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
15			SD Sumbawud	Des. Tarkiyah	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
16			SD Sumbawud	Des. Tarkiyah	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
17			SD Sumbawud	Des. Tarkiyah	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
18			SD Sumbawud	Des. Tarkiyah	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K
19			SD Sumbawud	Des. Tarkiyah	7 Lokal	Rp 175.000.000,00	Baru	P dan K

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PENGADAAN BAHAN	KETERANGAN (ML.)	USULAN INSTANSI
20		50	Sukoharjo I	Sukoharjo	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
21		50	Tela	Selatan	7 Lokal	175.000.000,00	Baru	P dan K
22		50	Bugel	Selatan	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
23		50	Betar	Selatan	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
24		50	Mertani I	Karanggening	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
25		50	Kecanduh	Karanggening	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
26		50	Sungkelah	Karanggening	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
27		50	Ngimbang	Pusuk	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
28		50	Gempingbadung	Pusuk	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
29		50	Tanggungan I	Pusuk	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
30		50	Sumargus I	Babat	7 Lokal	175.000.000,00	Baru	P dan K
31		50	Kecanduh	Babat	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
32		50	Trikunggal II	Babat	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
33		50	Mandemp II	Melak	7 Lokal	175.000.000,00	Baru	P dan K
34		50	Melak	Karanggening	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
35		50	Kondorwapi	Karanggening	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
36		50	Banyang	Karanggening	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
37		50	Sarunah	Karanggening	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
38		50	Kabanggen	Karanggening	7 Lokal	175.000.000,00	Baru	P dan K
39		50	Gonding I	Sugri	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
40		50	Kabanggen II	Sugri	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
41		50	Jati jaya II	Moko	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
42		50	Sekeluh I	Moko	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
43		50	Nyauak	Moko	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
44		50	Lemurung II	Ngimbang	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
45		50	Sarunah II	Ngimbang	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
46		50	Jelei	Ngimbang	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
47		50	Gaganggen	Ngimbang	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
48		50	Songgi II	Bukit	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
49		50	Taurang II	Bukit	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
50		50	Pinggan	Bukit	7 Lokal	175.000.000,00	Baru	P dan K
51		50	Merong II	Sembang	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
52		50	Karanggening I	Sembang	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
53		50	Wesmaningun II	Sembang	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
54		50	Mertap II	Mertap	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
55		50	Pelabuhan	Mertap	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
56		50	Tunggur II	Mertap	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
57		50	Wesmaningun I	Sukorame	6 Lokal	150.000.000,00	Baru	P dan K
58		50	Mengel	Sukorame	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
59		50	Banyang	Sukorame	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
60		50	Wesmaningun I	Karanggening	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
61		50	Gemping	Karanggening	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
62		50	Banyang II	Karanggening	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
63		50	Kulur I	Kabanggen	7 Lokal	175.000.000,00	Baru	P dan K
64		50	Kabanggen	Kabanggen	7 Lokal	175.000.000,00	Baru	P dan K
65		50	Pusungala	Kabanggen	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
66		50	Pes	Glagah	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P dan K
67		50	Duduk I	Glagah	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
68		50	Margenyer	Glagah	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
69		50	Sekeluh II	Pucur	9 Lokal	225.000.000,00	Baru	P dan K
70		50	Kony II	Pucur	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P dan K
71		50	Banyang	Pucur	7 Lokal	175.000.000,00	Baru	P dan K

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BIAYA	KETERANGAN (S/L)	URUTAN INSTANSI
			72 SD Bimbingan I	Brondong	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P-dan K
			73 SD Sekolah	Brondong	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P-dan K
			74 SD Brondong II	Brondong	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P-dan K
			75 SD Seberkawan II	Brondong	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P-dan K
			76 SD Tegayut	Larut	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P-dan K
			77 SD Gubug	Larut	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P-dan K
			78 SD Gemp	Larut	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P-dan K
			79 SD Temenayut	Larut	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P-dan K
			80 SD Payaman	Soklatu	7 Lokal	175.000.000,00	Baru	P-dan K
			81 SD Teluru	Soklatu	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P-dan K
			82 SD Penggubyo	Soklatu	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P-dan K
			83 SD Guntutuh	Medun	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P-dan K
			84 SD Pengun	Medun	4 Lokal	100.000.000,00	Baru	P-dan K
			85 SD Sembales	Sempu	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P-dan K
			86 SD Tembenanjen II	Sempu	3 Lokal	75.000.000,00	Baru	P-dan K
			Bantuan Keuangan Pengadaan Meja Kursi Mundul SD					
			1 Sukorapi I	Lamongan	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			2 Pengalirap II	Lamongan	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			3 Sukorapi IV	Lamongan	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			4 Mea IV	Lamongan	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			5 Kemat II	Lamongan	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			6 Mea II	Lamongan	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			7 Sugihwesi	Delat	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			8 Denggi II	Delat	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			9 Sukorapi II	Delat	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			10 Daulatun I	Delat	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			11 Bedukane	Tut	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			12 Ogge	Tut	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			13 Wangunjo	Tut	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			14 Paditumpul	Tut	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			15 Tembenanjen II	Tlung	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			16 Pengutuband I	Tlung	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			17 Gunungjo	Tlung	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			18 Baweng II	Tlung	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			19 Djumayu	Kembangharu	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			20 Gunung	Kembangharu	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			21 Peling IV	Kembangharu	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			22 Kembangharu I	Kembangharu	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			23 Tembenanjen I	Kembangharu	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			24 Gempokubus	Sempu	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			25 Sumbaji II	Sempu	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			26 Sriban	Sempu	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			27 Mading I	Sukodad	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			28 Mading II	Sukodad	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			29 Sukodad	Sukodad	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			30 Sughejo	Sukodad	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			31 Kembangharu	Kembangharu	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			32 Sumbawad	Kembangharu	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K
			33 Kewidhi	Kembangharu	80 Ssl	15.000.000,00	Baru	P-dan K

NO.	PRIORITAS DAURAN	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	POROSAN BANYA	KETERANGAN (BL.)	UNITAS INSTANSI
34			Bayanah	Karanganying	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
35			Tan	Maduran	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
36			Gumutah	Maduran	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
37			Janglungkuso	Maduran	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
38			Pengalihan	Maduran	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
39			Sukawijaya	Sekuran	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
40			Uzo	Sekuran	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
41			Jago	Sekuran	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
42			Itiner	Puak	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
43			Cemping	Puak	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
44			Karanganying	Puak	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
45			Bogday	Puak	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
46			Karanganying	Karanganying	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
47			Jedong	Karanganying	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
48			Sekuran	Karanganying	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
49			Ordehulung II	Sugih	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
50			Jedong II	Sugih	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
51			Sekuran I	Mudu	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
52			Labakul I	Mudu	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
53			Jedong II	Mudu	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
54			Karanganying II	Mudu	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
55			Yanggung II	Mudu	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
56			Karanganying II	Mudu	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
57			Karanganying II	Mudu	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
58			Mudu	Ngindang	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
59			Pandah	Ngindang	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
60			Ngindang	Ngindang	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
61			Pandah II	Sekuran	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
62			Sekuran I	Sekuran	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
63			Cemping	Sekuran	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
64			Andap II	Sekuran	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
65			Wesungun II	Sekuran	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
66			Madap I	Madap	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
67			Sekuran I, II	Madap	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
68			Sekuran II	Madap	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
69			Tunggal I	Madap	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
70			Madap	Madap	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
71			Sekuran	Sekuran	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
72			Sekuran	Sekuran	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
73			Pandah II	Sekuran	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
74			Cemping	Karanganying	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
75			Sekuran I	Karanganying	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
76			Pandah I	Karanganying	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
77			Pandah II	Chagih	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
78			Mudu I	Chagih	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
79			Mudu II	Chagih	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
80			Dukuh Tunggal	Karanganying	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
81			Kudat II	Karanganying	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
82			Mudu	Karanganying	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
83			Sekuran	Karanganying	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
84			Jedong I	Karanganying	60 Dst	15.000.000.00		P dan K
85			Pandah II	Pandah	60 Dst	15.000.000.00		P dan K

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERMBAHAN BAYU	KETERANGAN (M.)	URUPAN INSTANSI
			86 Kematihan	Pecutan	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			87 Tugaspeng	Pecutan	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			88 Branding IV	Brondong	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			89 Selayakmas II	Brondong	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			90 Sedumali	Brondong	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			91 Selayangpang II	Brondong	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			92 Gemp	Lanen	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			93 Bulunenge	Lanen	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			94 Cerehi	Lanen	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			95 Tegglun	Sokuro	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			96 Tabuni I	Sokuro	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			97 Takahapo II	Sokuro	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			98 Sunkuchenge	Bluk	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			99 Terepang II	Bluk	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			100 Bluk I	Bluk	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			101 Kedinggungul II	Bluk	60 Stel	Rp 15,000,000.00	Baru	P dan K
			Bantuan Rehabilitasi Gedung Tamen Kawan Barat	Keninggangan	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			1 Beluk Uluu	Gegah	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			2 Madinat NU	Brondong	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			3 Madinat NU	Delat	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			4 Bunga Harpan V	Sekoladi	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			5 A.B.A	Sokuro	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			6 A.B.A	Kedungging	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			7 Derna Putat I	Bluk	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			8 Prengi	Kalenggan	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			9 Pawa Karye Baki	Thung	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			10 Derna Warata	Bluk	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			11 Mayil Utuno	Sekuran	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			12 Nasa Indah	Ngembang	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			13 PGR	Santeng	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			14 PGR I	Lamangan	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			15 Pawa Maja	Lamangan	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			16 Tutan Harpan II	Turi	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			17 Pongangutan	Kembangbahu	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			18 Perhe	Sempe	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			19 Sekun Saku	Puak	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			20 Derna Warata	Keninggangan	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			21 Shien Harpan	Medun	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			22 Derna Warata	Sago	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			23 Wipya Kuzume	Mobi	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			24 Bunga Benge	Merup	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			25 Nasa Indah	Sukran	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			26 Hikap Santan	Pecutan	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			27 Derna Warata	Lanen	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			28 Derna Warata	Bluk	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K
			29 Malar uti II	Bluk	1 Loket	Rp 5,000,000.00	Baru	P dan K

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	REKAM/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PENYERAHAN BIAYA	KETERANGAN (BL.)	URUTAN INSTANSI
			- Transaksi Sistem Perantara Produksi : - Pengadaan Bahan Baku					
			1. SPPN 2 Sekeloa	Kec. Sekeloa	2 Ruang	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			2. SPPN 1 Sekeloa	Kec. Sekeloa	2 Ruang	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			3. SPPN 1 Tun	Kec. Tun	2 Ruang	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			4. SPPN 1 Cigugur	Kec. Cigugur	2 Ruang	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			5. SPPN 1 Tumpang	Kec. Tumpang	2 Ruang	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			6. SPPN 1 Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	2 Ruang	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			7. SPPN 1 Merapi	Kec. Merapi	2 Ruang	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			8. SPPN 1 Sukodadi	Kec. Sukodadi	2 Ruang	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			9. SPPN 1 Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	2 Ruang	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			10. SPPN 1 Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	2 Ruang	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			11. SPPN 1 Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	2 Ruang	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			12. SPPN 1 Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	2 Ruang	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			13. SPPN 1 Bluk	Kec. Bluk	2 Ruang	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
			14. SPPN 1 Kembangbahu	Kec. Kembangbahu	2 Ruang	Rp 25.000.000,00	Baru	P dan K
						Rp 34.000.000,00		

BIDANG SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Pembangunan bidang sosial merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin. Pembangunan di Bidang Sosial memiliki arti yang sangat strategis mengingat bidang ini sangat berkaitan langsung dengan kualitas kehidupan manusia. Agar pelaksanaannya tepat sasaran maka penanganan dibidang ini dilakukan dengan lintas sektor dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan bidang sosial adalah merupakan hasil upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari segenap aparat pemerintah bersama masyarakat. Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tugas dan fungsinya lebih terfokus dalam memfasilitasi, pengembangan kehidupan kemasyarakatan khususnya dalam melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan serta pemberian bantuan, rehabilitasi sosial, penanggulangan bencana alam dan pengembangan berbagai kegiatan pelayanan sosial. Disamping juga peningkatan peranan wanita, PKK, anak dan remaja terus ditumbuh kembangkan dalam ikut berpartisipasi dan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sosial.

B. KONDISI UMUM

Pembangunan di bidang sosial telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan hal tersebut nampak dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan tumbuh kembangnya usaha kecil, mikro dan sektor informal yang mempunyai daya tahan terhadap guncangan krisis.

Berbagai program yang telah dilaksanakan dalam bidang ini lebih difokuskan pada pembangunan keluarga dalam posisinya sebagai bagian terkecil kelompok sosial pertama dan utama dalam membentuk norma nilai dan watak kepribadian bangsa, dan memiliki potensi posisi sentra dalam membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang handal.

Hasil pendataan terhadap pentahapan KK di Kabupatewn Lamongan tahun 2003 menunjukkan jumlah Keluarga miskin sebanyak 286.643 jiwa terdiri dari 73.708 KK atau sebanyak 22,96 % , dari 1.248.817 jiwa Penduduk Kabupaten Lamongan atau 293.944 KK.

Program-program yang selama ini telah dilaksanakan dan terus dikembangkan diantaranya 1. Program Pemberdayaan Keluarga yang dalam tahun 2004 telah menunjukkan adanya peningkatan usaha sebanyak 2.306 kelompok dan

tumbuh kembangnya kelompok Bina Keluarga Balita sebanyak 831 kelompok, Remaja 331 kelompok dan Lansia 258 kelompok. 2. Program Keluarga Berencana dalam tahun 2004 mencapai sebanyak 111.585 peserta KB Aktif. 3. Program kesehatan reproduksi remaja (KRR) menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang kualitas KRR, dan adanya fasilitasi pusat konseling remaja. 4. Program Penguatan kelembagaan dengan kegiatan pengembangan kegiatan advokasi dan KIE, peningkatan peran serta institusi dan peran serta masyarakat. 5. Program Pendataan keluarga meliputi data demografi dan KB, serta data tahapan KS. yang dapat mendukung berbagai program lanjutan. 6. Program Pembinaan Potensi Kesejahteraan Sosial dan Penanganan PMKS/PSKS meliputi rehabilitasi dan Penyantunan Penyandang Cacat, Pembinaan dan Pengembangan Orsos dan Karang Taruna, Penyantunan Lanjut Usia dan Fakir Miskin, Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan (TMP), Rehabilitasi Tuna Susila, Pembinaan dan pengembangan Kesejahteraan Anak Terlantar.

Sedangkan tantangan utama yang masih harus dihadapi dan ditanggulangi adalah kemiskinan dan keterbelakangan sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dalam mengejar ketinggalan dengan masyarakat yang sudah lebih maju, agar lebih mampu memberikan sumbangan dan berperan serta dalam pembangunan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- b. Mewujudkan Kemitraan dalam upaya Peningkatan, Kemandirian, Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Sosial.
- c. Mewujudkan peningkatan Kualitas pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi serta Kesejahteraan Sosial.
- d. Mewujudkan peningkatan upaya-upaya promosi perlindungan dan pemenuhan hak-hak reproduksi serta pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Mewujudkan Sumber Daya yang berkualitas sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.

2. Sasaran

- a. Seluruh Anggota Keluarga
- b. Organisasi Sosial dan kemasyarakatan

- c. Organisasi Kepemudaan dan Olahraga
- d. Fakir miskin
- e. Penyandang Cacat
- f. Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial
- g. Tuna wisma dan lanjut usia
- h. Anak terlantar dan anak bermasalah
- i. Bencana Alam.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Sosial memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi : **1. Peningkatan partisipasi sosial dan kesejahteraan masyarakat** dengan strategi dan prioritas a) Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat, b) Memberi bantuan pada organisasi dan mengoptimalkan fungsi yayasan/panti asuhan/pantiwredha/ lansia/fakir miskin/ orang terlantar, c) Rehabilitasi sosial rumah kumuh, d) Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan sosial keagamaan, e) Rehabilitasi dan penyantunan penyandang cacat, eks penderita kusta, f) Penguatan kelembagaan Pondok Pesantren dan peningkatan peran serta Pondok Pesantren dalam pelaksanaan program-program pembangunan. **2. Peningkatan penanggulangan bencana alam** dengan strategi dan prioritas a) Merehabilitasi korban bencana, b) Melaksanakan penanggulangan bencana, c) Bantuan Korban Bencana Alam, d) Pelaksanaan proyek padat karya untuk mengantisipasi tingkat pengangguran sementara pada lokasi bencana dan kekeringan. **3. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial, dan peningkatan peranan wanita** dengan strategi dan prioritas a) Meningkatkan ketrampilan pada penyandang masalah sosial sesuai dengan bakat dan minatnya, b) Peningkatan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP), c) Mengikut sertakan wanita dalam pembangunan daerah, d) Meningkatkan peran Tim Penggerak PKK, e) Meningkatkan peran wanita dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera, f) Tersedianya dukungan dana untuk menunjang kegiatan peranan wanita, g) Peningkatan perlindungan peranan wanita. **4. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pelayanan peserta KB baru, b) Terbinanya peserta KB Aktif mandiri dan Pasangan Usia Subur (PUS), c) Memantapkan manajemen kelembagaan Keluarga Sejahtera (KS) dan Keluarga Bahagia (KB), d) Membuka pusat pelayanan KB pria di Tingkat Kecamatan, e) Adanya jaminan perlindungan para peserta KB Aktif yang mengalami efek samping dan komplikasi, f) Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan potensi ekonomi

keluarga, g) Pembinaan ketahanan lingkungan keluarga, h) Peningkatan peran jaring kelembagaan, i) Peningkatan pelayanan informasi dan konseling bagi masyarakat tentang KB, j) Peningkatan SDM KB Kessos, petugas medis dan medis teknis, k) Adanya kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat untuk mendukung Program KB, l) Melakukan upaya-upaya deteksi dini dan respon cepat untuk kelangsungan program dan kelembagaan, m) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB. **5. Promosi konvensi hak-hak anak** dengan strategi dan prioritas a) Ketersediaan Lembaga Bantuan Hukum bagi ibu dan anak korban tindak kekerasan.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Sosial sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

BIDANG : SOSIAL

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KISIA/AMPEK/IKS	LOKASI	VOLUME	PENDAPATAN BAYAR	REKONSILIASI (BL.1)	LOKASI BENTANG
1	Membangun sarana pendidikan dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial	L.1a	1. Berikan bantuan sosial	Kabupaten Lamongan	504 anak	Rp 74.000.000,00	Baru	KIS dan Kaseks
			2. Berikan bantuan sosial	Kabupaten Lamongan	115 anak	Rp 6.000.000,00	Baru	KIS dan Kaseks
			3. Berikan bantuan sosial	Kab. Lamongan	250 orang/25 keluarga 6 x 250 orang	Rp 300.000.000,00	Baru	KIS dan Kaseks
			4. Berikan bantuan sosial	Kab. Lamongan	14 KT (25 orang) 17 orang	Rp 600.000.000,00	Baru	KIS dan Kaseks
			5. Berikan bantuan sosial	Kabupaten Lamongan	2 kali	Rp 20.000.000,00	Baru	KIS dan Kaseks
			6. Berikan bantuan sosial	Kec. Blida, Karanggeneng	50 orang	Rp 50.000.000,00	Baru	KIS dan Kaseks
			7. Berikan bantuan sosial	Kec. Lamongan	-	Rp 400.000.000,00	Lanjutan	Bag. Kaseks
			8. Berikan bantuan sosial	Kab. Lamongan	-	Rp 400.000.000,00	Lanjutan	Bag. Kaseks
			9. Berikan bantuan sosial	Kab. Lamongan	-	Rp 20.000.000,00	Lanjutan	Bag. Kaseks
2	Relaksasi sosial dan sosial	L.1c	1. Berikan bantuan sosial	Kab. Lamongan	25 KT	Rp 100.000.000,00	Baru	KIS dan Kaseks
3	Relaksasi dan peningkatan pendapatan sosial, dan peningkatan sosial	L.1e	1. Berikan bantuan sosial	Kec. Lamongan, Merto, Sukoharjo	50 orang	Rp 50.000.000,00	Baru	KIS dan Kaseks
4	Melakukan peningkatan sosial	L.2b	1. Peningkatan sosial	Kabupaten Lamongan	-	Rp 30.000.000,00	Lanjutan	Ked. Kaseks
5	Bantuan sosial	L.2c	1. Bantuan sosial	Kab. Lamongan	-	Rp 300.000.000,00	Lanjutan	Bag. Kaseks
6	Mengurangi beban sosial dan pendapatan sosial	L.3a	1. Peningkatan sosial	Kabupaten Lamongan	250 orang	Rp 400.000.000,00	Baru	KIS dan Kaseks

NO.	PRIORITAS DASAR	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKUS	VOLUME	PENDAPAIK BAYU	KETERANGAN (BL)	URAIAN BENTANG
7	Mengembangkan kerja dalam pembangunan daerah	L.3c	2. Peningkatan kemampuan bag. anak bermutu, anak belajar dan anak jember 3. Pendidikan kejuruan dengan UNICEF	Kab. Lamongan	1.5	Rp 100.000.000,00	Baru	KB dan Kaseks
8	Mengembangkan para Tim Penggerak PKK	L.3d	1. Peningkatan kemampuan kerjasama (BRI, BCR, BCI) dan pembinaan jiwa serta jember dan Himpunan 2. Rencanan kelompok belajar (BRI, BCR, BCI) dan pembinaan jiwa serta jember dan Himpunan	Kabupaten Lamongan	1 kegiatan	Rp 75.000.000,00	Baru	KB dan Kaseks
9	Mengembangkan para kerja dalam membangun daerah	L.3e	2. Kegiatan Peningkatan Fokus TP PKK Defusi 1. Peningkatan pengkaderan dan pengkaderan kejuruan dalam membangun kejuruan yang berkualitas	Kab. Lamongan	474 Desa/Kel	Rp 75.000.000,00	Lanjutan	Begitupun
10	Terdapatnya dukungan dana untuk menunjang kegiatan jember serta	L.3f	2. Peningkatan Program Peningkatan Peningkatan kerja dalam membangun kejuruan	Kab. Lamongan	2 orang tenaga (2 x 100 KIK)	Rp 75.000.000,00	Lanjutan	Begitupun
11	Terdapatnya para KB aktif, mendidik dan Peningkatan Usia Subur (PUS)	L.4a	1. Peningkatan para KB aktif, mendidik dan Peningkatan Usia Subur (PUS)	Kab. Lamongan	1 tahun	Rp 150.000.000,00	Lanjutan	Bag. Kaseks
12	Menciptakan kerjasama dalam membangun KB dan KS serta meningkatkan kerja	L.4c	1. Organisasi pembangunan (Negeri Organisasi) dan Kemandirian bag. jember dan Peningkatan (PUSPNS) dan (PUSPNS) dan (PUSPNS)	Kabupaten Lamongan	1 tahun	Rp 100.000.000,00	Baru	KB dan Kaseks
13	Terdapatnya pembinaan kegiatan kejuruan	L.4g	2. Peningkatan, pembinaan, dan jember dan Peningkatan KB dan Kaseks 3. Peningkatan, pembinaan, dan jember dan Peningkatan KB dan Kaseks	Kabupaten Lamongan	4 kali / 27 KIK	Rp 244.200.000,00	Baru	KB dan Kaseks
14	Peningkatan pelayanan informasi dan konseling bag. masyarakat terdampak bencana reproduksi	L.4j	1. Peningkatan pelayanan informasi dan konseling bag. masyarakat terdampak bencana reproduksi	Kabupaten Lamongan	12 kali	Rp 36.000.000,00	Baru	KB dan Kaseks
			2. Peningkatan pelayanan informasi dan konseling bag. masyarakat terdampak bencana reproduksi	Kabupaten Lamongan	20 kali	Rp 20.000.000,00	Baru	KB dan Kaseks
			3. Peningkatan pelayanan informasi dan konseling bag. masyarakat terdampak bencana reproduksi	Kabupaten Lamongan	4 kali / 27 KIK / 174 Desa	Rp 313.400.000,00	Baru	KB dan Kaseks
			4. Peningkatan pelayanan informasi dan konseling bag. masyarakat terdampak bencana reproduksi	Kabupaten Lamongan	4 kegiatan	Rp 25.000.000,00	Baru	KB dan Kaseks

NO	PROPOSTAS DAVIDAR	NOTAS PROPOSTA	REQUISITACIONES	LOCAL	VOLUMEN	PRECIOSAN BATA	REPERANGAN (BIL)	DESIAN BASTANG
15	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KESKID kurntasepe	L 4 m	1. Peningkatan alat kurntasepe, alat cidalan dan Alat alat medis	Kacamatan	LS	Rp 1.250.000.000,00	Baru	KB dan Kessze
Jumlah Total						Rp 4.982.376.850,00		

BIDANG PENATAAN RUANG

A. PENDAHULUAN

Ruang dilihat sebagai wadah merupakan tempat keseluruhan interaksi sistem sosial (meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan budaya) dengan ekosistem (sumberdaya alam dan Sumberdaya buatan) berlangsung. Interaksi yang terjadi tidak selalu berjalan seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang kumulatif.

Berkaitan dengan hal tersebut serta dalam rangka menjamin laju perkembangan dan pertumbuhan daerah maupun memelihara pembangunan, keseimbangan dan pemerataan serta penyebaran pembangunan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah maupun guna memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan kelangsungan hidupnya secara optimal, maka ruang perlu ditata dan diatur pemanfaatannya secara terpadu dan sinergis sesuai kondisi dan potensinya.

Disamping itu, kegiatan penataan ruang juga dilakukan guna dapat mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi dan sosial budaya serta keserasian dan keselarasan antara daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan dengan struktur lingkungan (keterkaitan jaringan infrastruktur dengan pusat permukiman, jasa, perdagangan dan sebagainya). Upaya Pemerintah Kab. Lamongan dalam mewujudkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, kesinambungan dan pemerataan pemanfaatan ruang dengan daya dukung lingkungan dan sumberdaya buatan, maka disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK/RDTRK) Ibukota Kecamatan, dan didetailkan lagi dalam Rencana Teknik Tata Ruang Kota (RTRK), dimana masing-masing konsep Rencana Tata Ruang tersebut setiap 5 tahun sekali dievaluasi dan setiap 10 tahun sekali ditinjau kembali.

B. KONDISI UMUM

Dalam rangka mewujudkan penyerasian tata guna tanah, tata guna air dan sumberdaya alam serta daya dukung lingkungan dalam pengaturan tata ruang sebagai implementasi dari undang – undang nomor 24 tahun 1992, maka Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2004 telah menyusun sebanyak 25 RUTRK/RDTRK, dari 27 ibu kota kecamatan yang ada, serta telah menghasilkan

penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan.

Disamping itu dengan adanya perkembangan kota Lamongan telah tersusun dokumen penataan wajah kota Lamongan yang merupakan arahan pemanfaatan lahan disepanjang jalan arteri primer di kota Lamongan dan Babat. Selain itu juga telah disusun RTRK Lamongan dan RTRJ Arteri Primer Paciran serta RTBL Kecamatan Deket.

Dan untuk tahun 2005 akan dilaksanakan penyusunan 2 RUTRK/RDTRK pada IKK Maduran dan Sarirejo serta penyusunan Rencana Tata Ruang Jalan Arteri Brondong.

Dengan demikian hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan telah memiliki RUTRK/RDTRK kecuali Kecamatan Maduran dan Sarirejo, akan tetapi hampir 50 % RUTRK/RDTRK Ibu Kota Kecamatan tersebut sudah waktunya dievaluasi dan direvisi termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan sebagai dampak dari perkembangan pembangunan dan investasi di Kabupaten Lamongan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Terwujudnya ruang kota yang tertata, teratur dan terarah sesuai fungsi perwilayahan.

2. Sasaran :

- a. Perencanaan Tata Ruang sesuai dengan potensi daerah-daerah yang sedang berkembang terutama bagi daerah yang potensi di bidang industri.
- b. Peningkatan penyebaran informasi tentang tata ruang kota kepada masyarakat dan dunia usaha serta pelaksanaan pembinaan dalam bentuk pengawasan dan penertiban.
- c. Terciptanya keseimbangan dan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lahannya.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Penataan Ruang memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan perencanaan dan pengendalian tata ruang** dengan strategi dan prioritas a) Penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai

skala prioritas/ arahan tata ruang, b) Evaluasi dan review terhadap dokumen penataan ruang yang telah berakhir masa berlakunya dan yang kurang sesuai, c) Evaluasi terhadap penetapan Ibukota Kecamatan (IKK), d) Peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang terkait perijinan. **2. Peningkatan perencanaan penataan ruang wilayah/kawasan** dengan strategi dan prioritas a) Penyusunan Tata Ruang Kawasan Pantai, Pelabuhan, Industri dan perdagangan, b) Penyusunan Rencana Teknis Jalan Arteri Primer/ Ring Road lanjutan.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Penataan Ruang sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

BIDANG : PENATAAN RUANG

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN BIAYA	KETERANGAN (BL)	USULAN INSTANSI
1	Penyusunan Rencana dan Pengendalian Tata Ruang	M.1.a	1. Penyusunan RTRK Kota Babel	Kec. Babel	105,96 Ha	Rp. 125,000,000.00	Baru	Optik Karya
			2. Penyusunan master plan dan DED pemb. fasilitas umum di IKK Sukorene	Kec. Sukorene	1 Paket	Rp. 150,000,000.00	Baru	Beppoda
			3. Penyusunan rencana umum tata ruang kota dengan isidalam rencana detail tata ruang kota IKK Karanggeneng, Tikung, Ngimbang, Mantup, Lamongan	5 Kecamatan	5 Paket	Rp. 250,000,000.00	Baru	Beppoda
			4. Penyusunan Master Plan dan DED Sport Center	Kec. Lamongan	1 Paket	Rp. 150,000,000.00	Baru	Optik Karya
			5. Penyusunan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD)	Kab. Lamongan	1 paket	Rp. 150,000,000.00	Baru	Beppoda
2	Penyusunan Tata Ruang Kawasan Perairan, Pelabuhan, Industri, Jalan dan Perdagangan	M.2.a	1. Evaluasi dan revisi RTRW Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	-	Rp. 150,000,000.00	Baru	Beppoda
3	Penyusunan Rencana Teknik Jalan Arteri Primer/Ring Road Lanjutan	M.2.b	1. Penyusunan RTRJ Kolektor Dekat Karangbinangun	Kec. Dekat dan Kr. Binangun	480 Ha	Rp. 150,000,000.00	Baru	Optik Karya
Jumlah Total						Rp. 1,131,000,000.00		

BIDANG PERMUKIMAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Bidang Permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi dimensi. Ada banyak aspek yang terkait dengan kegiatan Bidang Permukiman diantaranya adalah Aspek Kesehatan, Aspek Lingkungan, Aspek Ruang dan Penataaannya, Aspek Kebersihan dan Keindahan.

Pembangunan Bidang Permukiman sebagaimana arahan Dokumen Rencana Strategis Daerah Kabupaten Lamongan (RENSTRA) Tahun 2002 – 2006 adalah termasuk bagian dari Program Peningkatan Drajat Kesehatan dan Sosial.

Guna menunjang pemenuhan kebutuhan perumahan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah khususnya bagi pegawai negeri golongan I, II, dan III pemerintah melalui Perum Perumnas melaksanakan pembangunan perumahan dengan berbagai tipe yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Sedang untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hal air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan diupayakan melalui PDAM meskipun sampai saat ini tingkat pelayanannya masih perlu ditingkatkan

B. KONDISI UMUM

Meskipun secara umum perekonomian mulai membaik, namun pembangunan di bidang permukiman masih banyak menghadapi kendala. Sedangkan keberlanjutan pembangunan suatu kawasan perkotaan maupun perdesaan salah satunya ditentukan oleh kualitas permukiman yang meliputi komponen perumahan, jalan lingkungan, drainase, air bersih, persampahan dan sanitasi.

Pada umumnya keadaan permukiman di Kabupaten Lamongan terutama di wilayah pedesaan masih belum tertata secara optimal. Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat menyadari hal tersebut, sehingga setiap tahunnya selalu dianggarkan untuk kegiatan perbaikan permukiman, namun karena luasnya wilayah yang harus ditangani dan kompleksnya permasalahan baru sebagian kecil yang dapat tertangani. Upaya pemenuhan kebutuhan rumah yang dilakukan oleh Perum Perumnas masih sangat terbatas.

Di wilayah pantai umumnya keadaan rumah sudah permanen, namun antar bangunan hampir tidak ada ruang, jalan dan saluran menyatu, kesulitan dalam mendapatkan air bersih, sampah berserakan di pantai dan tidak setiap rumah memiliki MCK.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh melalui penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman, perkotaan dan perdesaan yang layak dan memadai.
- b. Meningkatkan kemampuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan, pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan perdesaan.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Permukiman memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman sehat di kota dan desa** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman Perdesaan dan Perkotaan, b) Penataan dan peningkatan fasilitas kawasan permukiman kumuh, c) Peningkatan dan penyediaan air bersih, d) Perbaikan/pemugaran perumahan dan permukiman. **2. Peningkatan manajemen sarana dan prasarana perkotaan** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pengelolaan kebersihan dan keindahan kota, b) Penanggulangan banjir kota, c) Pembangunan dan peningkatan sarana perkotaan/IKK, d) Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas umum di perkotaan.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Permukiman sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : PERMUKIMAN

NO.	PROYEK/ALOKASI	KODE PROYEK	REKAPITULASI PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BIAYA	KETERANGAN (M)	LOKASI
1	Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	H 1 a	1. Pengaspalan Jalan Desa Sidomudi	Kec. Lamongan	1800 x 3 m	Rp. 270.000.000,00	Baru	Opis Kerya
			2. Peningkatan jalan lingkungan pemukiman Kelurahan Sidokumpul	Kec. Lamongan	420 x 2,40 m	Rp. 160.000.000,00	Baru	Opis Kerya
			3. Pembangunan jalan lingkar Tambak Tigo Mies Sidokumpul	Kec. Lamongan	250 x 2 m	Rp. 25.000.000,00	Perbaikan	Opis Kerya
			4. Perbaikan Trotoar dan Saluran air	Kec. Darat	600 m x 1,5 m	Rp. 256.000.000,00	Baru	Opis Kerya
			5. Pembangunan Saluran Air/bengangan Desa Sukorejo	Kec. Turi	500 m	Rp. 200.000.000,00	Lanjutan	Opis Kerya
			6. Pengaspalan Jalan Lingkungan Tambakgading - Jember	Kec. Sampung	1500 m x 3 m	Rp. 282.500.000,00	Baru	Opis Kerya
			7. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tambakmanggat	Kec. Sampung	800 x 3 m	Rp. 160.000.000,00	Baru	Opis Kerya
			8. Perbaikan Jalan Aspal Desa Sukorejo	Kec. Sukorejo	1000 x 2,5 m	Rp. 170.000.000,00	Lanjutan	Opis Kerya
			9. Pengaspalan Jalan Lingkungan Kas. Benaran	Kec. Darat	1000 m x 2 m	Rp. 175.000.000,00	Baru	Opis Kerya
			10. Pengaspalan Jalan Lingkungan KKK Ngimbang	Kec. Ngimbang	100 x 3 m	Rp. 164.000.000,00	Baru	Opis Kerya
			11. Pembangunan Trotoar jalan Buloke Kecamatan	Kec. Buluk	400 x 1,5 m	Rp. 172.000.000,00	Lanjutan	Opis Kerya
			12. Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Buluk	Kec. Buluk	700 x 3 m	Rp. 122.000.000,00	Lanjutan	Opis Kerya
			13. Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Ardiyo	Kec. Sembong	1000 x 3 m	Rp. 175.000.000,00	Lanjutan	Opis Kerya
			14. Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman KKK Mampung - Jalan Aspal Perumahan	Kec. Mampung	1200 x 3 m	Rp. 210.000.000,00	Lanjutan	Opis Kerya
			15. Perbaikan Jalan Lingkungan Desa Sukorejo	Kec. Sukorejo	1100 m x 3 m	Rp. 162.500.000,00	Baru	Opis Kerya
			16. Pembangunan gop satirwa air Kedungmanggat Desa Suro, Sidokumpul	Kec. Paciran	500 x 0,75 m 750 x 0,5 m	Rp. 75.000.000,00 Rp. 100.000.000,00	Baru Baru	Opis Kerya Opis Kerya

NO	PROJEK DASAR	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BIAYA	NETRANSKAM (B/L)	STATUS INSTANSI
17			Pembuatan jalan aspal Jember Perhutani baru Komplek	Kec. Paciran	1.500 x 3 m	Rp 75.000.000,00	Baru	Opis Karya
18			Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Karangrengan	Kec. Karangrengan	1000 x 3 m	Rp 175.000.000,00	Baru	Opis Karya
19			Pembangunan Kuchas lingkungan Perumahan Blok Gajah	Kec. Gajah	800 m x 1,5 m	Rp 270.000.000,00	Baru	Opis Karya
20			Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Obo	Kec. Kuthing	1000 x 3 m	Rp 175.000.000,00	Baru	Opis Karya
21			Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Clureng	Kec. Kuthing	800 m x 3 m	Rp 150.000.000,00	Lanjutan	Opis Karya
22			Pembangunan Kuchas lingkungan Perumahan Blok Mekar Sari & Srikul	Kec. Mekar Sari	600 x 1,5 m	Rp 270.000.000,00	Baru	Opis Karya
23			Pengaspalan Kuchas lingkungan Perumahan Blok Pucuk	Kec. Pucuk	600 x 1,5 m	Rp 270.000.000,00	Baru	Opis Karya
24			Pembangunan jalan aspal Gang Hidayatul Kaili Sidiyasa	Kec. Lamongan	850 x 4 m	Rp 100.000.000,00	Baru	Opis Karya
25			Pembangunan jalan aspal Gang Kaili Kaili Sidiyasa Gang Kaili Kaili Sidiyasa Gang Kaili Kaili Sidiyasa	Kec. Lamongan	100 x 4 m 90 x 4 m 150 x 4 m	Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 40.000.000,00	Baru Baru Baru	Opis Karya Opis Karya Opis Karya
26			Pengaspalan jalan masuk Banyuwangi RW 1	Kec. Lamongan	400 x 3 m	Rp 25.000.000,00	Baru	Opis Karya
27			Pembangunan jalan aspal Gang Kaili Kaili Sidiyasa Gang Kaili Kaili Sidiyasa Gang Kaili Kaili Sidiyasa	Kec. Lamongan	220 x 3 m 82 x 3 m 250 x 2 m	Rp 105.000.000,00	Baru Baru Baru	Opis Karya Opis Karya Opis Karya
28			Pembangunan Jalan Aspal Jalan Gang IV Kaili Sidiyasa	Kec. Lamongan	800 x 3 m	Rp 100.000.000,00	Baru	Opis Karya
29			Pembangunan Jalan Aspal Kaili Sidiyasa	Kec. Lamongan	500 x 4 m	Rp 150.000.000,00	Baru	Opis Karya
30			Pembangunan jalan masuk beton Gang Kaili Kaili Sidiyasa Gang Kaili Kaili Sidiyasa Gang Kaili Kaili Sidiyasa Gang Kaili Kaili Sidiyasa Gang Kaili Kaili Sidiyasa Gang Kaili Kaili Sidiyasa Gang Kaili Kaili Sidiyasa Gang Kaili Kaili Sidiyasa Gang Kaili Kaili Sidiyasa	Kec. Lamongan	100 x 3 m 100 x 3 m 200 x 3 m 300 x 3 m 1.500 x 3 m 300 x 3 m 300 x 3 m	Rp 150.000.000,00	Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru	Opis Karya Opis Karya Opis Karya Opis Karya Opis Karya Opis Karya Opis Karya

No.	Pencapaian Fisik	Kondisi Fisik	Gedung / Lokasi	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	Keterangan	Keterangan
2	Pembangunan Fasilitas Kamar Pemukiman Kumuh	M.1.b	1. Pembangunan jalan beton ke rumah Desa	Kec. Delat	3 x 225 m	Rp 45.000.000,00	Cipta Karya	
3	Pembangunan Fasilitas Kamar Pemukiman Kumuh	M.1.c	2. Pembangunan jalan ingkungan/jalan desa	Kec. Delat	1.000 x 2,5 m	Rp 100.000.000,00	Cipta Karya	
			- Ujung. Suburipul	Kec. Delat	8.000 m	Rp 200.000.000,00	Cipta Karya	
			- Ujung. Gajah	Kec. Delat	1000 x 2 m	Rp 150.000.000,00	Cipta Karya	
			3. Pembangunan jalan ingkungan RT Sugio	Kec. Delat	300 x 2 m	Rp 60.000.000,00	Cipta Karya	
			4. Pembangunan jalan ingkungan RT Sugio	Kec. Delat	300 x 2 m	Rp 60.000.000,00	Cipta Karya	
			1. Program NUSIP	Kab. Lamongan	8.000 m	Rp 87.000.000,00	Republika	
			1. Pembangunan Saluran Air Desa Delat	Kec. Lamongan	750 m	Rp 200.000.000,00	Cipta Karya	
			2. Pembangunan Saluran Air Desa Delat	Kec. Lamongan	1.000 m	Rp 75.000.000,00	Cipta Karya	
			3. Pengaliran air ke arah Kandangkumpul	Kec. Lamongan	1.000 m	Rp 125.000.000,00	Cipta Karya	
			4. Pembangunan Saluran Air ke arah Desa Delat	Kec. Delat	2500 m	Rp 125.000.000,00	Cipta Karya	
			5. Pembangunan Saluran Air ke arah Desa Delat	Kec. Delat	3000 m	Rp 400.000.000,00	Cipta Karya	
			6. Pembangunan Saluran Air ke arah Desa Delat	Kec. Delat	3000 m	Rp 125.000.000,00	Cipta Karya	
			7. Pembangunan Saluran Air ke arah Desa Delat	Kec. Subuloh	2500 m	Rp 125.000.000,00	Cipta Karya	
			8. Pembangunan Saluran Air ke arah Desa Delat	Kec. Kandangkumpul	3500 m	Rp 150.000.000,00	Cipta Karya	
			9. Pembangunan Saluran Air ke arah Desa Delat	Kab. Lamongan (2 Mac.)	1.000 m	Rp 50.000.000,00	Cipta Karya	
			10. Pembangunan Saluran Air ke arah Desa Delat	Kec. Kandangkumpul	3000 m	Rp 125.000.000,00	Cipta Karya	
			11. Pembangunan Saluran Air ke arah Desa Delat	Kec. Kandangkumpul	1500 m	Rp 60.000.000,00	Cipta Karya	
			12. Pembangunan Saluran Air ke arah Desa Delat	Kec. Subuloh	1.000 m	Rp 125.000.000,00	Cipta Karya	

NO	PROJEK/KELOMPOK	NOUR PROGRAM	REKAMATA/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BAYAN	KETERANGAN (MIL)	LEBIH ATAS BASTAMIS
14			Pembangunan Sarana Air Bersih / Perumahan Gondarjati	Kec. Sugo	2.000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
15			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Hupinjo	Kec. Mado	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
16			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sembungap	Kec. Mado	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
17			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Macungwang	Kec. Sambeng	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
18			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Wudi	Kec. Sambeng	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
19			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Merub	Kec. Manting	3000 m	Rp 100.000.000,00	Baru	Optis Kayu
20			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sumurghyan	Kec. Paciran	3500 m	Rp 150.000.000,00	Baru	Optis Kayu
21			Pembo. Sarana Air Bersih Desa Banyuwati (Mekas Sunan Drajat)	Kec. Paciran	3000 m	Rp 100.000.000,00	Baru	Optis Kayu
22			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Laren	Kec. Laren	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
23			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sobkuro	Kec. Sobkuro	3500 m	Rp 150.000.000,00	Baru	Optis Kayu
24			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Payaman	Kec. Sukuro	3000 m	Rp 100.000.000,00	Baru	Optis Kayu
25			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Karangnangun	Kec. Karangnangun	3500 m	Rp 150.000.000,00	Baru	Optis Kayu
26			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Wudu	Kec. Karangnangun	3000 m	Rp 100.000.000,00	Baru	Optis Kayu
27			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Manganti	Kec. Gajah	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
28			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Kertong	Kec. Gajah	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
29			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Karangnangun	Kec. Babat	3000 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Optis Kayu
30			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Lukinjo	Kec. Kallangah	1000 m	Rp 50.000.000,00	Lanjutan	Optis Kayu
31			Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tunjungmasir	Kec. Kallangah	1000 m	Rp 50.000.000,00	Lanjutan	Optis Kayu

NO.	PERENCANAAN SALURAN	KODE PROJEKSI	LOKASI	VOLUME	PERENCANAAN SALURAN	KETERANGAN	URUTAN
6	Perencanaan Saluran Air	N.2.a	1. Perencanaan saluran air bersih Cemara	1 unit 0,3 x 1 x 1.000 m	Rp 100.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			2. Perencanaan saluran air bersih Cemara	1 unit	Rp 50.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			3. Perencanaan saluran air bersih Cemara	1 unit	Rp 20.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			4. Perencanaan saluran air bersih Cemara	1 unit	Rp 225.000.000,00	Lantai	Opis Kayu
			5. Perencanaan saluran air bersih Cemara	1 unit	Rp 100.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			6. Perencanaan saluran air bersih Cemara	1 unit	Rp 100.000.000,00	Batu	Opis Kayu
6	Perencanaan Saluran Air	N.2.b	1. Perencanaan saluran air Cemara	220 x 4 m x 800 m ²	Rp 120.000.000,00	Lantai	Opis Kayu
			2. Perencanaan saluran air Cemara	1 unit	Rp 22.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			3. Perencanaan saluran air Cemara	1 unit	Rp 50.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			4. Perencanaan saluran air Cemara	200 m x 1,5 m	Rp 110.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			5. Perencanaan saluran air Cemara	4 x 6 m	Rp 75.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			6. Perencanaan saluran air Cemara	300 m	Rp 150.000.000,00	Batu	Opis Kayu
7	Perencanaan Saluran Air	N.2.c	1. Perencanaan saluran air Cemara	100 m	Rp 180.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			2. Perencanaan saluran air Cemara	100 m	Rp 180.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			3. Perencanaan saluran air Cemara	100 m	Rp 180.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			4. Perencanaan saluran air Cemara	250 x 3 m	Rp 180.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			5. Perencanaan saluran air Cemara	300 m	Rp 180.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			6. Perencanaan saluran air Cemara	120 m	Rp 180.000.000,00	Batu	Opis Kayu
7	Perencanaan Saluran Air	N.2.d	1. Perencanaan saluran air Cemara	300 x 1 x 1,5 m	Rp 175.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			2. Perencanaan saluran air Cemara	300 m x 1,50 m	Rp 387.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			3. Perencanaan saluran air Cemara	1200 m x 2 m	Rp 210.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			4. Perencanaan saluran air Cemara	500 m x 1,50 m	Rp 215.000.000,00	Lantai	Opis Kayu
			5. Perencanaan saluran air Cemara	500 m x 1,50 m	Rp 215.000.000,00	Batu	Opis Kayu
			6. Perencanaan saluran air Cemara	500 m x 1,50 m	Rp 215.000.000,00	Batu	Opis Kayu

NO	PROJEK/AS DIBANGUN	KODE PROJEK	REKAM/AMPROVIS	KOMAR	VOLUME	PERHITUNGAN BAYAN	KETERANGAN (ML)	URUTAN BERTAMBAH
5			Pemb. Sekam di Riz. Bontolung	Kac. Bontolung	1500 m x 0,5 x 0,8 m	Rp 375.000.000,00	Baru	Opis Kayu
6			Pemb. Trotoar dan Sekam di Riz. Dawai	Kac. Dawai	600 m x 1,5 m	Rp 268.000.000,00	Baru	Opis Kayu
7			Pemb. Trotoar dan Sekam di Riz. Kandangring	Kac. Kandangring	800 m x 1,5 m	Rp 304.000.000,00	Lanjutan	Opis Kayu
8			Pembangunan jalan ingkungan seluas 800 (Pembangunan seluas 400)	Kac. Layan	500 m x 1,5 m	Rp 125.000.000,00	Baru	Opis Kayu
9			Pembangunan Lapangan Persewaan Jalan Kelapayan, Subotad	Kac. Layan	10 Unit	Rp 96.500.000,00	Baru	Opis Kayu
10			Rehabilitasi Jalan Aspal Persewaan - Tolakembang	Kac. Tungg	1200 x 3 m	Rp 48.000.000,00	Baru	Opis Kayu
11			Pembangunan LPAJ Riz. Kandangring	Kac. Kandangring	2 Unit	Rp 17.300.000,00	Lanjutan	Opis Kayu
12			Pembangunan LPAJ Dawa Pula - Sempu	Kac. Sempu	10 Unit	Rp 86.500.000,00	Baru	Opis Kayu
13			Pembangunan LPAJ 6 Dawa 3 Pura Dawa	Kac. Kandangring	15 Unit	Rp 125.750.000,00	Baru	Opis Kayu
14			Pembangunan LPAJ Shokun - A. Harnad Tur Subotad	Kac. Subotad	15 Unit	Rp 130.000.000,00	Lanjutan	Opis Kayu
15			Pembangunan LPAJ Shokun - A. Harnad Subotad - Subotad Paj	Kac. Subotad	14 Unit	Rp 125.000.000,00	Lanjutan	Opis Kayu
16			Pembangunan Gubuk Subotad - Paj	Kac. Subotad	1000 Bg	Rp 75.000.000,00	Baru	Opis Kayu
17			Pembangunan besar Persewaan jalan umum Gembong - Kandi (Pura Bontolung gemb)	Kac. Sekam	5.000 m	Rp 250.000.000,00	Baru	Opis Kayu
18			Pembangunan LPAJ Mru - Sekam	Kac. Sekam	6.000 m	Rp 300.000.000,00	Baru	Opis Kayu
19			Pembangunan persewaan jalan Sekam, Subotad, Tungg	Kac. Sekam	1 paket	Rp 900.000.000,00	Baru	Opis Kayu
20			Pembangunan LPAJ Gembong - Sekam Sekam	Kac. Sekam	20 Unit	Rp 172.000.000,00	Baru	Opis Kayu
21			Pembangunan LPAJ Di Paj, Tungg	Kac. Mudi	10 Bg	Rp	Lanjutan	Opis Kayu
22			Pembangunan LPAJ Riz. Subotad	Kac. Subotad	4 Tpk	Rp 2.000.000,00	Baru	Opis Kayu
23			Pembangunan LPAJ Shokun Persewaan - Topobong	Kac. Persewaan	20 Unit	Rp 172.000.000,00	Lanjutan	Opis Kayu

NO.	PRIORITAS DIBAYAR	KODE PROGRAM	REKAPITULASI	LOKASI	VOLUME	PERKURIR BAYAR	ASTERISKAN (BL)	BESTARIF WISATA
24			Pengadaan LPJU Di Fase Bimbang	Kec. Prabon	10 Unit	Rp 86.000.000,00	Rehabilitasi	Opis Kayu
25			Pemasangan LPJU SUP H 1 Prabon dan Sebelah malam	Kec. Prabon	20 Unit	Rp 172.000.000,00	Baru	Opis Kayu
26			Pengadaan lampu dan tangk LPJU Lurah - Gempangasah	Kec. Lurah	10 Unit	Rp 60.000.000,00	Baru	Opis Kayu
27			Pemasangan LPJU Jalan Raya Ika Kayu Kasingan	Kec. Turit	5 Unit	Rp 43.250.000,00	Baru	Opis Kayu
28			Pemasangan LPJU Kacemilatan - Patak	Kec. Patak	10 Unit	Rp 86.000.000,00	Baru	Opis Kayu
29			Pemasangan LPJU BIK Maduran	Kec. Maduran	10 Unit	Rp 86.000.000,00	Baru	Opis Kayu
30			Pemasangan LPJU Jalan Ayah Abas	Kec. Mertap	5 Unit	Rp 43.250.000,00	Baru	Opis Kayu
31			Pemasangan LPJU Desa Kandangin	Kec. Ngimbang	6 Unit	Rp 51.900.000,00	Lanjutan	Opis Kayu
32			Pembangunan jalan aspal lingkungan Perumahan Karonan	Kec. Sukohadi	3 x 1.000 m	Rp 75.000.000,00	Baru	Opis Kayu
33			Pembangunan Klatik lingkungan IKK Glegah Tidor dan Saluran Air	Kec. Glegah	600 x 1,5 m	Rp 270.000.000,00	Baru	Opis Kayu
34			Peningkat jalan lingkungan Perumahan - Pembangunan Tidor dan Saluran Air	Kec. Maduran	600 x 1,5 m	Rp 270.000.000,00	Baru	Opis Kayu
35			Pertanian jalan lingkungan perumahan perikanan (wawahan)	Kec. Lamongan & Babat	2500 m	Rp 250.000.000,00	Baru	Opis Kayu
Jumlah Total						Rp 18.348.000.000,00		

BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya mendayagunakan dan mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan daerah.

Dalam meningkatkan kemampuan, pendayagunaan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang dimiliki, maka Bidang Pekerjaan Umum merupakan salah satu bidang yang mempunyai peranan penting dalam mendukung dan menunjang peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan potensi yang dimiliki. Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi kebinamargaan, keciptakarya dan pengairan, dalam mendukung optimalisasi pengelolaan serta pendayagunaan potensi yang ada melalui diantaranya peningkatan kondisi infra struktur, baik yang berupa prasarana jalan Kabupaten, prasarana lingkungan perkotaan dan pedesaan, prasarana pendukung perdagangan dilingkungan perkotaan, prasarana lingkungan permukiman, Penataan Ruang, Ruang terbuka hijau dan rest area, peningkatan ketersediaan air baku bagi pemenuhan kebutuhan irigasi maupun air bersih, peningkatan kondisi bangunan air, peningkatan kapasitas daya tampung waduk, embung, rawa, sungai dan kali.

B. KONDISI UMUM

1. Sub Bidang Kebinamargaan.

Untuk membuka keterisolasian daerah dan memperlancar hubungan transportasi antar wilayah di Kabupaten Lamongan, baik itu dalam rangka kegiatan ekonomi ataupun kegiatan lainnya tersedianya jalan adalah hal yang mutlak. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PU Binamarga setiap tahunnya selalu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kebinamargaan yang meliputi kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, perbaikan maupun kegiatan peningkatan ataupun pembangunan dalam jumlah yang cukup significant. Sehingga setiap tahunnya panjang jalan baik terus bertambah. Pada tahun 2004 kondisi jalan baik di Kabupaten Lamongan sepanjang

238,445 Km atau 68,80% dari total panjang jalan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, demikian juga dengan jembatan yang dalam keadaan baik sebanyak 184 buah atau 97,35% dari jumlah total banyaknya jembatan.

Selain melakukan kegiatan pada jalan-jalan kabupaten, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga mengarahkan kegiatannya pada peningkatan dan pembangunan jalan poros desa.

2. Sub Bidang Keciaptakaryaan.

Dalam rangka membangun dan mengembangkan kawasan wilayah perkotaan dan perdesaan yang aman, tertib dan terkendali, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PU Cipta Karya telah melakukan kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dan perkotaan yang meliputi penerangan jalan umum, pembangunan dan perbaikan gedung, penataan alon-alon, penataan Stadion Surajaya, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana TPA, pengendalian banjir kota, pembangunan tugu batas wilayah dan kegiatan lain yang terkait dengan keciaptakaryaan.

3. Sub Bidang Pengairan.

Dalam rangka menunjang kegiatan pertanian di Kabupaten Lamongan, peran Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan memiliki arti yang sangat penting, utamanya dalam hal penyediaan air dan prasarana jaringan irigasi, mengingat lebih dari separuh luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah lahan pertanian sehingga menuntut perhatian dan penanganan serius pemerintah daerah. Dalam rangka mendukung penyediaan air untuk kepentingan irigasi pertanian dan perikanan, Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan membagi daerah kerjanya atas 7 cabang seksi, meliputi ; Cabang Seksi Laren dengan luas baku sawah 3.209 Ha, Cabang Seksi Kedungpring dengan luas baku sawah 6.331 Ha, Cabang Seksi Pucuk dengan luas baku sawah 7.122 Ha, Cabang Seksi Karanggeneng dengan luas baku sawah 7.035 Ha, Cabang Seksi Sumlaran dengan luas baku sawah 6.731 Ha, Cabang Seksi Kuro dengan luas baku sawah 9.986 Ha dan Cabang Seksi Lamongan dengan luas baku sawah 6.098 Ha.

Selain menangani penyediaan air, Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan juga bertanggung jawab dalam hal pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Lamongan.

Adapun hal-hal yang ditangani oleh Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan meliputi kegiatan pemeliharaan/normalisasi waduk, rawa, embung,

jaringan irigasi ditingkat primer dan sekunder, perbaikan dan pembangunan dam, pintu air dan bangunan-bangunan pengairan lainnya termasuk juga penanganan waduk desa.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kelancaran lalu lintas dan perekonomian masyarakat baik di perkotaan maupun diperdesaan.
- b. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan, jembatan, waduk, jaringan irigasi, drainase, sanitasi dan persampahan
- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dan perkotaan.
- d. Meningkatkan optimalisasi dan ketertiban pemanfaatan ruang.
- e. Meningkatkan kegiatan pembinaan kepada masyarakat pemakai air (HIPPA) dan pemakai tanah pengairan.
- f. Melakukan penanggulangan banjir dan kekeringan.
- g. Meningkatnya pengetahuan personil melalui Diklat

2. Sasaran

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur jalan kabupaten, jalan poros desa jembatan, drainase, sanitasi dan persampahan
- b. Terwujudnya kesadaran dan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pemeliharaan, pengendalian dan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan.
- c. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan ruang.
- d. Meningkatnya kondisi infrastruktur pengairan (waduk, embung, waduk desa, jaringan irigasi, bendungan, dam, saluran pembuangan, dan bangunan-bangunan pengairan lainnya)
- e. Terwujudnya pelaksanaan Diklat – Diklat Fungsional Bidang Teknis Ke PU-an.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan Fungsi Manajemen Pembangunan Sektor PU** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Pembangunan Sektor PU, b) Peningkatan monitoring dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan, c) Prioritas kegiatan pelaksanaan pembangunan sesuai situasi dan kondisi, d) Peningkatan pembinaan konsultan perencana, pengawas dan kontraktor pelaksana dalam rangka peningkatan kualitas bangunan. **2. Peningkatan pelayanan pembangunan sektor PU** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan pelayanan perijinan di sektor PU, b) Peningkatan pelayanan bantuan teknis perencanaan dan pembangunan, c) Pengadaan dan pemeliharaan peralatan operasional sektor PU. **3. Peningkatan, pengembangan dan perluasan fungsi Sub Sektor Irigasi** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan fungsi waduk, rawa, sungai, jaringan dan bangunan-bangunan pengairan, b) Pembinaan kelompok HIPPA dan peningkatan SDM anggotanya. **4. Peningkatan, Pengembangan dan Perluasan Fungsi Sub Sektor Bina Marga** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan dan Pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten, b) Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan poros desa, c) Optimalisasi bahan baku kebutuhan Sub Sektor Bina Marga, d) Peningkatan status jalan Kabupaten menjadi Propinsi.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir :

NO.	PROJEK/TAJUK DUAH	KODE PROJEK	REKOD/AMPOYER	LOKASI	VOLUME	PERKIRAAN BAYAR	PERINGKAT (BC)	STATUS BILAU
15	Normalisasi dan Peralihan Jambatan Ngineh Mekas Bawa			Da. Kedondong Kec. Mekas	Tinggi 1,500 m Palaran 1 buah Dua 1 unit Saluran 1,000 m	Rp 800,000,000	Baru	OPN Pengiraan
16	Normalisasi Kal Sawa			Da. Subang ud Kec. Kemangan Kec. Kemangan	Kal 2000 m	Rp 1,000,000,000	Lanjutan	OPN Pengiraan
17	Pengerai/normalisasi Kal Sawa 1			Da. Kaban ud Kec. Kemangan Kec. Tur	Kal 3000 m Dua 1 Unit Jambatan 1 buah	Rp 1,000,000,000	Baru	OPN Pengiraan
1	Pelarian Tembuka Kal - Kal (Jalan Baru) Normalisasi Kal Waj			Da. Waj, Sudohep Kec. Lomangan	Palaran 3,000 m	Rp 150,000,000	Baru	OPN Pengiraan
2	Normalisasi Kal Puth			Da. Mangi ud Da. Teringmela Kec. Kallangah	Kal 3,000 m	Rp 200,000,000	Lanjutan	OPN Pengiraan
3	Normalisasi Kal Gindang			Da. Sawa ud Da. Mangan Kec. Subudat	Kal 2,000 m	Rp 200,000,000	Lanjutan	OPN Pengiraan
4	Normalisasi Peralihan Mekas			Da. Mekas Kec. Lomangan	Palaran 1,500 m	Rp 150,000,000	Baru	OPN Pengiraan
5	Normalisasi Kal Duluheg ud Pengiraan			Da. Duluheg ud Da. Sawa ud Kec. Taring	Kal 2,000 m	Rp 175,000,000	Lanjutan	OPN Pengiraan
6	Normalisasi Kal Pular HAU			Da. Taring ud Da. Subudat Kec. Kedondong	Kal 2,000 m	Rp 200,000,000	Lanjutan	OPN Pengiraan
7	Normalisasi Saluran/Lanjutan Gulp			Da. Luran, Gemping Segit, Temenggan Kec. Luran	Saluran 2,000 m	Rp 250,000,000	Baru	OPN Pengiraan
8	Normalisasi Saluran Sungai HAU			Da. Pengerai ud Da. Sawa ud Kec. Taring	Saluran 2,000 m	Rp 175,000,000	Baru	OPN Pengiraan
9	Normalisasi Kal Sawa			Da. Kedondong Kec. Mekas	Kal 3,000 m	Rp 200,000,000	Baru	OPN Pengiraan

NO	PROPOSAL SUBSIDI	KODE PROPOSAL	ASAS/LOKASI/LOKASI	LOKASI	VOLUME	PESONAN BAYU	KETERANGAN (M)	URUTAN BERTAMBAH
			Normalisasi Waduk - Waduk Dues (Jilat Birit dengan Pola Shading) :					
1	Kawangan/Terak			Dk. Dukung Dk. Bityuth Kec. Thung	Gulud tanah 1,600 m ²	Rp	43.000.000	DPU Pengantar
2	Bukang			Dk. Sempit Kec. Sumbang	Gulud tanah 1,600 m ²	Rp	11.000.000	DPU Pengantar
3	Waduk			Dk. Sumbang Kec. Marup	Gulud tanah 1,600 m ²	Rp	19.000.000	DPU Pengantar
4	Kelak			Dk. Tumpang Kec. Kembangbahu	Gulud tanah 1,600 m ²	Rp	24.000.000	DPU Pengantar
5	Pulak			Dk. Pulak Kec. Kembangbahu	Gulud tanah 1,600 m ²	Rp	19.000.000	DPU Pengantar
6	Kelak			Dk. Kelak Kec. Kembangbahu	Gulud tanah 1,200 m ²	Rp	21.000.000	DPU Pengantar
7	Kelak			Dk. Kelak Kec. Kembangbahu	Gulud tanah 1,200 m ²	Rp	21.000.000	DPU Pengantar
8	Waduk			Dk. Waduk Kec. Thung	Gulud tanah 1,600 m ²	Rp	19.000.000	DPU Pengantar
9	Banyang			Dk. Banyang Kec. Sumbang	Gulud tanah 1,600 m ²	Rp	24.000.000	DPU Pengantar
10	Sugan			Dk. Sugan Kec. Sumbang	Gulud tanah 1,200 m ²	Rp	21.000.000	DPU Pengantar
11	Bukang			Dk. Bukang Kec. Sumbang	Gulud tanah 17.600 m ²	Rp	87.000.000	DPU Pengantar
12	Sumbang			Dk. Sumbang Kec. Sumbang	Gulud tanah 1,600 m ²	Rp	23.000.000	DPU Pengantar
13	Dagang Sempit			Dk. Dagang Kec. Sumbang	Gulud tanah 1,200 m ²	Rp	46.000.000	DPU Pengantar
14	Sumbang			Dk. Sumbang Kec. Sumbang	Gulud tanah 1,200 m ²	Rp	26.000.000	DPU Pengantar
15	Dk - Dk Ordo			Dk. Marup Kec. Marup	Gulud tanah 1,600 m ²	Rp	30.000.000	DPU Pengantar
16	Pulak			Dk. Sumbang Kec. Pulak	Gulud tanah 15.000 m ²	Rp	78.000.000	DPU Pengantar

NO	PRIORITAS DARI	KODE PROGRAM	REKAPITULASI	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BAYAN	KETERANGAN (M)	URUTAN JENJANG
7	Pengisian dan Perawatan jalan dan Jambatan Kalsipatan	0 4 a	1. Pengisian Jalan Jambatan Dendang - Dendang Rum Jamb. Gembong - Dendang (Pengaspalan Paved)	Kec. Sukarno	3.000 x 4 m	1.050.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru
			2. Pengisian Jalan Jambatan Mendang - Sembang	Kec. Mendang dan Sembang	2.000 x 4 m	110.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru
			3. Pengisian Jalan Jambatan Sukarno - Jag	Kec. Sukarno	2.000 x 4 m	720.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru
			4. Pengisian Jalan Jambatan Sempang - Jember	Kec. Sempang	1.000 x 3 m	240.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru
			5. Pengisian Jalan Jambatan Tawang - Kambangpaku	Kec. Tawang Kambangpaku	2.000 x 4 m	860.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru
			6. Pengisian Jalan Jambatan Tawang - Sungayung	Kec. Ngimbang dan Bluk	2.000 x 4 m	360.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru
			7. Perbaikan Jalan Jambatan Mendang - Ajamada (250)	Kec. Mendang	2.000 x 1m	800.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru
			8. Pengisian Jalan Jambatan Sukohadi - Kerangwang	Kec. Sukohadi	2.000 x 4,5 m	800.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru
			9. Pengisian Jalan Jambatan Laren - Blitang	Kec. Mekar	2.000 x 4,50 m	790.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru
			10. Pengisian Jalan Jambatan Dendang - Sukohadi	Kec. Mendang Kambangpaku	2.000 x 4,20 m	708.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru
			11. Pengisian Jalan Jambatan Kambangpaku - Sukohadi	Kec. Kambangpaku	2.500 x 4,20 m	877.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru
			12. Perbaikan Dendang Jambatan Bui Puyi	Kec. Ngimbang	12 x 6 m	60.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru
			13. Perbaikan Dendang Jambatan Bluk	Kec. Ngimbang	11 x 6 m	50.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru
			14. Perbaikan Dendang Jambatan Jagat	Kec. Ngimbang	12 x 6 m	50.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru
			15. Perbaikan Jambatan Laren Rum Jamb Laren - Blitang	Kec. Laren dan Mekar	-	PU	Baru	Dend. PU Baru
			16. Pengisian Jambatan Sukarno 8 Rum Jamb. Sukarno - Jag	Kec. Sukarno	5,5 x 7 m	175.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru
			17. Pengisian Jambatan Tawang Rum Jamb Tawang - Ngbaru	Kec. Tawang	2,5 x 7 m	85.000.000.00	Baru	Dend. PU Baru

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PEROGRAAN BIAYA	KETERANGAN (SK)	USULAN INSTANSI
			18. Penggantian Jambatan Bergondang Rute Jln Mertup - Piyemata	Kec. Mertup	8,3 x 7 m	175,000,000.00	Baru	Dinas PU Bina
			19. Penggantian Gorong-gorong Rute Jalan Nimbang - Bluk	Kec. Bluk	1 x 7 m	45,000,000.00	Baru	Dinas PU Bina
			20. Penggantian Gorong-gorong Pendawa Rute Jalan Soko - Lonying	Kec. Glayat	1,25 x 7 m	50,000,000.00	Baru	Dinas PU Bina
			21. Penggantian Gorong-gorong Teras Rute Jalan Mertup - Sembang	Kec. Sembang	1,5 x 7 m	57,000,000.00	Baru	Dinas PU Bina
			22. Pembangunan Dinding Penahan Tanah dengan Beton	Kec. Sugio	150 m	385,000,000.00	Baru	Dinas PU Bina
			23. Pembangunan Dinding Penahan Tanah dengan Pasangan Batu Bata	Kec. Kedungpring	40 m	30,000,000.00	Baru	Dinas PU Bina
			24. Peningkatan Jalan Sriburo - Dagan	Kec. Sriburo	1500 x 4,5 m	532,500,000.00	Baru	Kacamatan
			Pemeliharaan Rutin Jalan					
1			Pemeliharaan Rutin Jalan Juruah Sukodadi-Sumbawud	Kec. Sukodadi	6.800 x 4 m	Rp 108,000,000.00	Teknik/Lapen/Hotmix	Dinas PU Bina
2			Pemeliharaan Rutin Jalan Juruah Sumbawud Ki Geneng	Kec. Karanggeneng	2000 x 4 m	Rp 35,000,000.00	Teknik/Lapen/Hotmix	Dinas PU Bina
3			Pemeliharaan Rutin Jalan Juruah Perin - Banyuwat	Kec. Pakoran	6.500 x 4 m	Rp 113,750,000.00	Teknik/Lapen/Hotmix	Dinas PU Bina
4			Pemeliharaan Rutin Jalan Juruah Piyemata-Pancon	Kec. Lemongan, Sukodadi	5000 x 4 m	Rp 87,500,000.00	Teknik/Lapen/Hotmix	Dinas PU Bina
5			Pemeliharaan Rutin Jalan Juruah Pancon - Sugio	Kec. Sukodadi, Sugio	6200 x 4 m	Rp 106,500,000.00	Teknik/Lapen/Hotmix	Dinas PU Bina
6			Pemeliharaan Rutin Jalan Juruah Sugio - Teras	Kec. Sugio, Kedungpring	11000 x 4 m	Rp 106,000,000.00	Teknik/Lapen/Hotmix	Dinas PU Bina
7			Pemeliharaan Rutin Jalan Juruah Teras - Ngawet	Kec. Kedungpring, Madi	4800 x 4 m	Rp 85,750,000.00	Teknik/Lapen/Hotmix	Dinas PU Bina
8			Pemeliharaan Rutin Jalan Juruah Pucuk - Sekaran	Kec. Pucuk, Sekaran	5000 x 4 m	Rp 87,500,000.00	Teknik/Lapen/Hotmix	Dinas PU Bina
9			Pemeliharaan Rutin Jalan Juruah Sekaran - Lelan	Kec. Sekaran, Lelan	6200 x 4 m	Rp 106,500,000.00	Teknik/Lapen/Hotmix	Dinas PU Bina

NO	PROJEK/TAHAP BANGUNAN	NOOR PROSEDUR	REKAM JALAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BAYAR	KETERANGAN (M)	URAIAN MATERIAL
10	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Gembong - Gempol		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Gembong - Gempol	Kec. Madiun, Sukorejo	7000 x 4 m	Rp 66.000.000,00	Tekard	Dress PU Bina
11	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Loran - Blembing		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Loran - Blembing	Kec. Loran, Bledong	6200 x 4 m	Rp 108.500.000,00	Tekard Lapor, Hozma	Dress PU Bina
12	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Sukorejo - Saj		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Sukorejo - Saj	Kec. Sukorejo	3400 x 4 m	Rp 58.500.000,00	Tekard Lapor, Hozma	Dress PU Bina
13	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Dukuh - Solo		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Dukuh - Solo	Kec. Dukuh	5000 x 4 m	Rp 86.700.000,00	Tekard Lapor, Hozma	Dress PU Bina
14	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Solo - Kerangwangun		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Solo - Kerangwangun	Kec. Gajah, Kerangwangun	4700 x 4 m	Rp 82.200.000,00	Tekard Lapor, Hozma	Dress PU Bina
15	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Mantiap - Sembang		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Mantiap - Sembang	Kec. Mantiap	5000 x 4 m	Rp 87.300.000,00	Tekard Lapor, Hozma	Dress PU Bina
16	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Solo - Dugang		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Solo - Dugang	Kec. Gajah	6600 x 4 m	Rp 113.700.000,00	Tekard Lapor, Hozma	Dress PU Bina
17	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Loring - Mandio		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Loring - Mandio	Kec. Gajah	8300 x 4 m	Rp 110.200.000,00	Tekard Lapor, Hozma	Dress PU Bina
18	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Sumpend - Makur		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Sumpend - Makur	Kec. Karanggeneng	5000 x 4 m	Rp 87.500.000,00	Tekard Lapor	Dress PU Bina
19	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Sembang - Ngirang		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Sembang - Ngirang	Kec. Sembang	5630 x 4 m	Rp 87.500.000,00	Tekard Lapor, Hozma	Dress PU Bina
20	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Gempang - Pati		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Gempang - Pati	Kec. Loran, Sukorejo	5000 x 4 m	Rp 87.500.000,00	Tekard Lapor	Dress PU Bina
21	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Peken - Gadag		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Peken - Gadag	Kec. Peken, Sukorejo	8000 x 4 m	Rp 126.000.000,00	Tekard Lapor	Dress PU Bina
22	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Mantiap - Madi		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Mantiap - Madi	Kec. Mantiap, Sukorejo	5000 x 4 m	Rp 125.000.000,00	Tekard Lapor	Dress PU Bina
23	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Mantiap - Ayer ses		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Mantiap - Ayer ses	Kec. Mantiap	5700 x 4 m	Rp 96.700.000,00	Tekard Lapor, Hozma	Dress PU Bina
24	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Tumpang - Songwarang		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Tumpang - Songwarang	Kec. Ngirang	5000 x 4 m	Rp 125.000.000,00	Tekard Lapor	Dress PU Bina
25	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Dukuh - Bulu		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Dukuh - Bulu	Kec. Madi, Bulu	5000 x 4 m	Rp 87.500.000,00	Tekard Lapor, Hozma	Dress PU Bina
26	Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Bulu - Sukorejo		Pemeliharaan Rutin Jalan Jurnan Bulu - Sukorejo	Kec. Bulu, Sukorejo	5000 x 4 m	Rp 125.000.000,00	Tekard Lapor, Hozma	Dress PU Bina

NO	PROJEK AT DARI	KODE PROJEK	KELOMPOK PROJEK	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BAYAR	ARTIKEL/AMBIEN (M ²)	URAIAN ARTIKEL
44	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri Lembangan			Kec. Lembangan	Sal 2725 m ³ Cat 9700 m ² JH 14228 m ²	Rp 300.000.000,00	Teknik Lapisan, Habis	Chase PU Bina
45	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri Bida			Kec. Bida	Sal 453 m ³ Cat 9700 m ² JH 14228 m ²	Rp 150.000.000,00	Teknik Lapisan, Habis	Chase PU Bina
46	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri - Samping Damar			Kec. Ponor	3000 x 4 m	Rp 52.500.000,00	Teknik Lapisan	Chase PU Bina
47	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri - Samping Damar			Kec. Lembangan	3000 x 4 m	Rp 260.000.000,00	Lapisan	Chase PU Bina
48	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri - Samping Damar			Kec. Bratang	3000 x 4 m	Rp 61.250.000,00	Teknik Lapisan	Chase PU Bina
49	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri - Samping Damar			Kec. Sugo	3000 x 3 m	Rp 328.500.000,00	Batu	Chase PU Bina
50	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri - Samping Damar			Kec. Ngimbang	2000 x 3 m	Rp 210.000.000,00	Lapisan	Chase PU Bina
51	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri - Samping Damar			Kec. Marup Kec. Kambang	1000 x 3 m	Rp 164.250.000,00	Batu	Chase PU Bina
52	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri - Samping Damar			Kec. Marup	1000 x 3,5 m	Rp 254.000.000,00	Lapisan	Chase PU Bina
53	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri - Samping Damar			Kec. Samping	1000 x 3,5 m	Rp 154.000.000,00	Lapisan	Chase PU Bina
54	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri - Samping Damar			Kec. Damar	1000 x 3,5 m	Rp 188.000.000,00	Lapisan	Chase PU Bina
55	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri - Samping Damar			Kec. Bida	1000 x 4 m	Rp 228.000.000,00	Lapisan	Chase PU Bina
56	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri - Samping Damar			Kec. Bratang	2000 x 3 m	Rp 204.000.000,00	Batu	Chase PU Bina
57	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri - Samping Damar			Kec. Bida	1000 x 3 m	Rp 162.000.000,00	Batu	Chase PU Bina
58	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri - Samping Damar			Kec. Lembangan	1000 x 3 m	Rp 162.000.000,00	Batu	Chase PU Bina
59	Pembangunan Jalan dan Saluran Kiri - Samping Damar			Kec. Lembangan Kec. Damar	2000 x 3 m	Rp 328.500.000,00	Batu	Chase PU Bina

NO.	PROJEKSI DAIRAH	NOOR PRODUKSI	ASAS/ANALISIS	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BAYAN	KETERANGAN (BA)	URUTAN NO. (BA)
12			Pengawasan Jalan (Pondasi) Tumpang - Tumpang Puncung	Kec. Tul	1000 x 3 m	Rp 102.000.000.00	Batu	Dua PU Batu
13			Pengawasan Jalan Selo - Klaten	Kec. Tawang	2000 x 3 m	Rp 204.000.000.00	Batu	Dua PU Batu
14			Pengawasan Jalan Pura Desa Tumpang - Klaten	Kec. Klaten	1000 x 3 m	Rp 102.000.000.00	Batu	Dua PU Batu
15			Pembangunan Jembatan - Klaten, Di Klaten	Kec. Klaten	3 x 7 m	Rp 75.000.000.00	Lantai	Dua PU Batu
16			Pengawasan Jalan Selo - Selo, Di Klaten	Kec. Selo	2400 x 3 m	Rp 104.000.000.00	Batu	Dua PU Batu
17			Pengawasan Jalan Pura Desa - Selo, Di Klaten	Kec. Selo	3 x 1000 m	Rp 158.000.000.00	Batu	Dua PU Batu
18			Pengawasan Jalan Pura Desa Pengulu - Sugih	Kec. Sugih	1000 x 3 m	Rp 158.000.000.00	Batu	Dua PU Batu
19			Rehab. Jalan Pura Desa / Mekar - Sugih	Kec. Sugih	3000 x 3 m	Rp 73.000.000.00	Batu	Dua PU Batu
20			Pengawasan Jalan - Mekar - Sugih	Kec. Sugih	1000 x 2,5 m	Rp 122.000.000.00	Rehab	Dua PU Batu
21			Rehab. Jalan Tegal - Mekar - Sugih	Kec. Sugih	1500 x 3 m	Rp 152.000.000.00	Rehab	Dua PU Batu
22			Pembangunan Jalan Aspal - Mekar - Sugih	Kec. Sugih	1000 x 2,5 m	Rp 135.000.000.00	Batu	Dua PU Batu
23			Pengawasan Jalan Pura Desa - Mekar - Sugih	Kec. Mekar	1500 x 2 m	Rp 243.000.000.00	Batu	Dua PU Batu
24			Pengawasan Jalan Pura Desa - Pura - Sugih	Kec. Mekar	1500 x 3 m	Rp 243.000.000.00	Batu	Dua PU Batu
25			Rehab. Jembatan - Grogol - Sugih	Kec. Sugih	5 x 3 m & 4 x 7 x 3 m	Rp 102.000.000.00	Rehab	Dua PU Batu
26			Rehab. Jalan Tegal - Mekar - Sugih	Kec. Sugih	1500 x 2,5 m	Rp 135.000.000.00	Rehab	Dua PU Batu
27			Rehab. Jalan Mekar - Pura - Sugih	Kec. Mekar	2000 x 2,7 m	Rp 150.000.000.00	Batu	Dua PU Batu
28			Pembangunan Jalan Mekar - Pura - Sugih	Kec. Sugih	1500 x 2 m	Rp 243.000.000.00	Batu	Dua PU Batu

NO	PICORIAN DABOR	NOOR PROGRAM	KESIAKAPROVEN	LONKAM	VOLUMET	PERHITUNGAN BAYAN	KEPERAWATAN (M2)	AMALAN M2/ANAL
			20 Perbaikan Tampak Persegi Panjang Jalan Pura Desa : Sumbasari - Sumbasari (Desa Majasari)	Kec. Mekar	20 x 4 m	Rp 42.000.000.00	Batu	Ornat PU Batu
			30 Perbaikan Jalan aspal Persegi Kampung, Turi, Penggondan, Penggondan	Kec. Mekar	2000 x 2,5 m	Rp 267.500.000.00	Lapukan	Ornat PU Batu
			31 Perbaikan Jalan Aspal Persegi Desa - Sungai	Kec. Selayar	9000 x 2,7 m	Rp 147.000.000.00	Batu	Ornat PU Batu
			32 Perbaikan Jalan Aspal Kembangpaku - Sungai	Kec. Kembangpaku	1000 x 3 m	Rp 162.000.000.00	Batu	Ornat PU Batu
			33 Perbaikan Jalan Persegi Desa Manggajaya & PU	Kec. Selayar	900 m x 3 m	Rp 152.000.000.00	Lapukan	Ornat PU Batu
Jumlah Total						Rp 1.400.000.000.00		

BIDANG PERHUBUNGAN

A. PENDAHULUAN

Bidang Perhubungan memiliki peran yang sangat strategis dan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan, dimana pembangunannya diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang andal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang serta menggerakkan dinamika pembangunan dan perekonomian mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa guna lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Disamping itu bidang Perhubungan melalui program transportasi akan mendukung dalam mempercepat pengembangan wilayah. Oleh karena itu, guna mempercepat pengembangan wilayah, Peningkatan ekonomi dan secara makro untuk kesejahteraan masyarakat, maka transportasi pedesaan agar mendapat perhatian secara khusus, sehingga distribusi produksi dari pedesaan dapat berjalan lancar ke pusat-pusat perdagangan maupun distribusi barang dari kota menuju pedesaan dan berikutnya transportasi antar pulau.

Dalam pembangunan bidang Perhubungan ditumbuh kembangkan dan diserasikan dengan perkembangan transportasi serta pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun perkembangan wilayah secara berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pada peningkatan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana transportasi dan perhubungan ditujukan untuk menciptakan sistem transportasi yang tertib, teratur, lancar, aman dan nyaman.

B. KONDISI UMUM

Potensi sumber daya alam yang ada saat ini akan sulit dikembangkan bila tidak disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, terkait bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Lamongan terdapat tiga sub bidang yakni : sub bidang perhubungan darat, sub bidang perhubungan laut dan sub bidang pos dan telekomunikasi.

Sub bidang perhubungan darat terdiri dari prasarana jalan raya dengan panjang total 486,2332 Km dan jalan baja 41,200 Km yang keberadaannya membentang di wilayah tengah Lamongan sangat menunjang perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sub bidang perhubungan darat pada Tahun 2004 memberikan kontribusi pada PAD sebesar Rp.

1.010.790.000,- sebagai upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat pada Tahun 2005 ini mulai dirancang kereta api komuter Surabaya – Lamongan PP dan Jalan Lingkar Utara Kota Lamongan serta terminal terpadu di wilayah pantura.

Sub bidang perhubungan laut, Kabupaten Lamongan memiliki potensi laut dengan panjang pantai $\pm$ 35 Km, meskipun saat ini telah terdapat pelabuhan TPI dan Pelabuhan Rakyat Nusantara III, namun untuk kontribusi terhadap PAD secara langsung belum memenuhi harapan. Oleh karenanya saat ini akan dikembangkan pelabuhan penyeberangan ASDP, DOK dan PERKAPALAN, Shore Base Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan untuk sub bidang Pos dan Telekomunikasi meskipun secara umum pelayanan jasa kepada masyarakat meningkat, Pemkab Lamongan hanya sebatas memfasilitasi saja. Karena kewenangannya masih belum diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Terwujudnya suatu sistem angkutan manusia dan barang yang berlangsung secara tertib, aman, nyaman dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

2. Sasaran

- a. Terkurangnya dan atau mencegah kecelakaan Lalu Lintas karena faktor jalan, alur pelayanan dan fasilitas jalan, di pelabuhan karena faktor manusia.
- b. Terpadunya jaringan trayek antar kota dan pedesaan yang menghubungkan antar Kecamatan di Wilayah Kabupaten, antar Kecamatan dengan Kabupaten perbatasan.
- c. Terpenuhinya kebutuhan angkutan sebanyak 20 kendaraan dan dari 14 jaringan trayek pedesaan dan atau mengurangi jumlah angkutan over load trayek Babat – Lamongan.
- d. Terpenuhinya angkutan Pedesaan yang aman dan lancar melalui renovasi kendaraan di jalur trayek Lamongan – Sugio dan Lamongan – Glagah.
- e. Tersedianya tenaga trampil 60 % dari jumlah staf Perhubungan yang tersedia.

USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008

SIDANG : PERHUBUNGAN

[illegible]

NO	PROJEK/AS BAKSIAN	KODE PRODUKSI	REKAM/AMPROYER	LOKAS	VOLUME	PERHISAN BAKSI	KETERANGAN (BK)	DOLLAR BERTAMBE
1	Pengadaan sarana pendukung kegiatan operasional transportasi bus	P.2.6	1. Pengadaan sarana pengisian dan pemeliharaan bus (1 buah kapal 10 GT + 2 mesin Yamaha 150) 2. Pemasangan prototipe kapal penumpang dan perbaikan di bus	Kab. Limbungan	1 unit	Rp 300.000.000,00	baru	Dinas Perhubungan
				Kab. Pagar dan Kab. Bontolung	2 unit	Rp 40.000.000,00	baru	Dinas Perhubungan
	Jumlah Total					Rp 340.000.000,00		

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. PENDAHULUAN

Peranan aspek lingkungan hidup begitu besar dalam kehidupan manusia, mengingat lingkungan hidup merupakan komponen utama dalam kehidupan manusia karena kedua komponen tersebut saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu, dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk mempertahankan keberadaan, keseimbangan, serta keselarasannya secara dinamis melalui berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan serta pemeliharaan keseimbangan, antara unsur-unsurnya secara terus menerus agar mutu dan fungsinya dapat dipelihara serta ditingkatkan kemanfaatannya bagi generasi selanjutnya sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor : 23 tahun 1997.

Disamping itu pembangunan lingkungan hidup juga berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup dan diharapkan dapat mewujudkan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan konservasi kawasan hutan, rehabilitasi lahan kritis termasuk flora dan fauna, serta penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan terus ditingkatkan guna melindungi segenap komponen makhluk hidup, keaneka ragaman plasma nutfah maupun ekosistemnya.

B. KONDISI UMUM

Secara umum gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup telah mengalami peningkatan hal ini terlihat dengan menurunnya luas lahan kritis yang hingga saat ini luas lahan kritis diluar kawasan hutan mencapai $\pm 14.060,71$ Ha, yang merupakan keberhasilan program penghijauan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemulihan lingkungan dan pelestarian Sumber Daya Alam.

Dalam upaya pengendalian dampak lingkungan akibat usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan telah dilaksanakan pembinaan kepada usaha/kegiatan dimaksud guna menyusun Dokumen AMDAL, UKL/UPL, dan saat ini usaha/kegiatan yang telah menyusun dokumen AMDAL sebanyak 8 pengusaha dan dokumen UKL/UPL sebanyak 9 pengusaha.

Untuk mendukung pelestarian pantai telah dilaksanakan program pantai lestari dan telah dilaksanakan rehabilitasi mangrove sepanjang + 8 Km di Pantai Utara Kab. Lamongan. Disamping itu untuk meningkatkan kesadaran bagi

pengusaha/industri dalam menerapkan usaha/industri yang ramah lingkungan maka telah diadakan sosialisasi dan audit lingkungan terhadap jenis usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Dan dalam pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dilaksanakann kerjasama dengan BAPEDALPROP, Bejis Project dan adanya dukungan dari LSM pemerhati Lingkungan yaitu KOLILA.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mewujudkan suatu ekosistem yang mampu menyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi.

2. Sasaran :

- a. Usaha penyelamatan hutan, tanah, air dan pantai dengan program terpadu antara lain gerakan penghijauan di lahan kritis, penanaman bakau di wilayah pesisir/pantai, dan gerakan penghijauan terpadu.
- b. Meningkatkan kualitas air sungai dan daya guna sungai melalui pembersihan kali disepanjang kali otik, kali dapur, sidoharjo dan Bengawan Jero.
- c. Penerapan AMDAL, UKL/UPL dalam proses perencanaan dan manajemen pelaksanaan pembangunan dan kegiatan/usaha serta penyusunan dokumen AMDAL/UKL/UPL bagi usaha/kegiatan industri yang belum AMDAL, UKL/UPL.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- e. Pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi pencemaran dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan** dengan strategi dan prioritas a) Penyusunan Dokumen AMDAL, UKL dan UPL sesuai kebutuhan, b) Keterlibatan peranserta masyarakat (LSM) dalam pengelolaan lingkungan hidup, c) Penataan hutan kota, kelestarian, keasrian dan keindahan kota, d) Meminimalisasi lahan-lahan kritis/ reboisasi, e) Pembinaan SDM

berwawasan lingkungan. **2. Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Alam** dengan strategi dan prioritas a) Memfasilitasi penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan, b) Pengelolaan SDA potensial dan pelestarian lingkungan hidup. **3. Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan SDA** dengan strategi dan prioritas a) Pembinaan dan pemberdayaan lembaga pemerhati lingkungan.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : LINGKUNGAN HIDUP

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PENDERAHAN BAYA	KETERANGAN (BIL.)	USULAN INSTANSI
1	Penyusunan Dokumen Amdal UKL & UPL Sesuai kebutuhan	Q.1.a	1 Penyusunan Dokumen UKL / UPL RSD Dr. Soegri TPA Tambakgedung Pasar Sidoharjo TPI Weru-Pasirien	Kabupaten Lamongan		Rp 80.000.000.00	Baru	Bag. LH
			2 Penyusunan dokumen amdal UKL dan UPL	RSD Dr. Soegri	1 Paket	Rp 15.000.000.00	Baru	RSD Soegri
2	Keterlibatan Peran serta masyarakat (LSM) dalam pengelolaan	Q.1.b	1 Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Pembinaan dan penyuluhan bagi masyarakat tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Pekan Penghijauan Nasional (PPKAN) dan Hari Lingkungan	Kabupaten Lamongan		Rp 200.000.000.00	Baru	Bag. LH
3	Meminimalisasi Lahan - lahan kritis / Rehabilitasi	Q.1.d	1 Gerakan Sejuta Pohon (GSP) Penanaman pohon penghijauan di lahan-lahan kritis	Kabupaten Lamongan		Rp 125.000.000.00	Baru	Bag. LH
4	Pembinaan SDM berwawasan Lingkungan	Q.1.e	1 Pembinaan lingkungan hidup bagi masyarakat pesisir pantai Penyusunan Buku Nersa Kualitas Lingkungan Hidup Pembinaan Program Bangun Praja Monitoring dan Pemantauan lokasi Bangun Praja Konsultasi ke Jakarta					Bag. LH
			2 Penguatan institusi bagi Tim Penilai Dokumen AMDAL dan bantuan operasional Komite AMDAL Kab Tim Komite AMDAL Tim UKL/UPL	Kabupaten Lamongan		Rp 50.000.000.00	Baru	Bag. LH

NO	PROJEK/TAHAP	KODE PROJEK/TAHAP	KEGIATAN/PROJEK	LOKASI	VOLUME	PESUGRUHAN BAYAR	KETERANGAN (M)	USULAN BENTANG
5	Pengelolaan Sumber Daya Alam Potensial dan Pelestarian Lingkungan Hidup	G.2.b	1. Program Kasi Beras (Prokasah) Pembinaan Kasi Pemb. Pagar BRC 2. Audit Lingkungan terhadap kegiatan dari/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan Rumah Sakti Industri / Pelembakan	Jero		Rp. 35.000.000,00	Baru	Bag. LH
				Kabupaten Lamongan		Rp. 15.000.000,00	Baru	Bag. LH
Jumlah Total						Rp. 500.000.000,00		

BIDANG KEPENDUDUKAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan Sumber Daya Manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas dan mobilitas penduduk. Dalam kaitan itu, aspek penataan administrasi kependudukan merupakan hal penting dalam mendukung perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah.

Tingkat kepadatan penduduk akan menimbulkan permasalahan sosial ditengah masyarakat termasuk terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia guna mempertahankan kehidupannya. Untuk mengatasi hal tersebut manajemen kependudukan perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara profesional dan proporsional dalam mendukung percepatan pertumbuhan penduduk sehingga dapat mengeliminir antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.

Tantangan untuk meningkatkan pelayanan publik tentunya akan membutuhkan energi dan strategi yang lebih lugas, tuntas dan akurat. Sistem pencatatan, pemutasian serta registrasi kependudukan memerlukan konsentrasi tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Belum lagi kebijakan kependudukan diharapkan terjadi penyebaran penduduk yang merata pada setiap wilayah dengan mendaya gunakan secara optimal potensi-potensi lokal dengan membangun dan membentuk jaringan pelayanan kependudukan akan lebih memudahkan dalam hal pembinaan, monitoring dan pemotretan manajemen kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan berusaha secara optimal mengembangkan dan meningkatkan inisiatif dan inovasi dalam rangka mengelola pembangunan kependudukan yang bersifat majemuk sehingga diharapkan tidak adalagi diskriminasi pelayanan manajemen kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Lamongan yang diharapkan dapat menunjang kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan.

B. KONDISI UMUM

Pembangunan kependudukan diarahkan pada penyiapan Sumber Daya Manusia yang semakin mantap agar mampu menjawab tantangan dimasa yang akan datang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terekam bahwa dalam rentang waktu antara tahun 2000 hingga 2003 pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamongan dari 1.200.103 jiwa yang terdiri dari 585.259 laki-laki dan 614.844 perempuan pada tahun 2000 menjadi 1.224.812 jiwa yang terdiri dari 598.572 laki-laki dan 626.240 perempuan, sehingga terjadi penambahan sebesar 24.709 jiwa. Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Lamongan yang sebesar 1.812,80 km², maka tingkat kepadatan penduduk mencapai 675,6 orang/km². Berkenaan dengan itu untuk menekan pertumbuhan penduduk, maka peran Gerakan Keluarag Berencana sangat menentukan.

Pelaksanaan transmigrasi pada era Otonomi Daerah mengalami banyak hambatan, disatu sisi daerah penampungan kurang dapat menerima para pendatang dari luar daerah karena evoria Otonomi Daerah, disisi lain para calon transmigrasi kurang memiliki keberanian karena isue instabilitas. Walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2004 melalui proses kerjasama dengan daerah tujuan telah dapat memberangkatkan para transmigrasi sebanyak 50 kk (200 jiwa) dari 217 KK yang telah mendaftar dengan tujuan Propinsi Jambi melalui transmigrasi umum dan swakarsa.

Dalam upaya tertib administrasi bidang kependudukan, serta peningkatan pelayanan pada masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum, telah dikembangkan melalui Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan (SIMDUK) dengan bentuk pelayanan berupa pemberian KTP, KK, LAMPID, Akta Kelahiran, Perkawinan, Kematian, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengembangkan kualitas rasa aman, tentram, bahagia lahir bathin, selain itu masih diupayakan secara terus menerus pengendalian pertumbuhan penduduk dengan menurunkan tingkat kelahiran anak.

2. Sasaran

- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas;

- d. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk;
- e. Meningkatnya peserta KB laki-laki;
- f. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif serta efisien;
- g. Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun;
- h. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh-kembang anak;
- i. Meningkatnya jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif;
- j. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- k. Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas pengarah mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- l. Meningkatnya cakupan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Kependudukan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Tertib administrasi sistem kependudukan dan peningkatan pelayanan catatan sipil** dengan strategi dan prioritas a) Sosialisasi tentang arti pentingnya catatan sipil dan kependudukan bagi masyarakat, b) Peningkatan akan mutu pelayanan publik terhadap catatan sipil, c) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung. **2. Penyiapan, peningkatan serta pemberdayaan kualitas dan kuantitas calon transmigran** dengan strategi dan prioritas a) Melakukan kerjasama inovatif dengan Pemerintah Daerah tempat tujuan transmigran, b) Memberikan pembinaan, pembekalan, dan ketrampilan terhadap calon transmigran, c) Meningkatkan jalinan koordinasi dengan Dinas Terkait baik secara horizontal maupun vertikal.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Kependudukan sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

BIDANG : KEPENDUDUKAN

NO	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGATIFIKASI	LOKASI	VOLUME	PERHITUNGAN BAKU	KEPERANGKATAN (BBL)	USULAN INSTANSI
1	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendukung	R 1.2	1. Peningkatan gedung Aneka 2. Peningkatan sarana dan prasarana	Kantor Camat Kantor Camat	8 x 21 x 4 x 2 Rak besi 1 buah 867 other	Rp 940.000.000,00 Rp 13.800.000,00 Rp 9.303.500,00	Baku	Camat
2	Manajemen layanan masyarakat dengan memanfaatkan sumber tenaga terampil	A 2.2	1. Kurang: Kaya sama dalam rangka peningkatan mutu pelayanan 2. Monitoring perkembangan pelayanan dan mutu pelayanan	Luar Jawa Luar Jawa	2 hal 2 hal	Rp 175.000.000,00 Rp 50.000.000,00	Baku	Tenaga Kerja
3	Mendukung pelayanan, pendataan dan pembinaan terampil dan terampil	R 2.2	1. Pembinaan, pendataan dan pembinaan terampil dan terampil 2. Peningkatan dan peningkatan terampil dan terampil	Kab. Lamongan Kab. Lamongan	50 KIC 50 KIC	Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00	Baku	Tenaga Kerja
4	Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan sarana Terampil dan terampil	R 2.2	1. Peningkatan dan peningkatan terampil dan terampil	Kab. Lamongan	50 KIC	Rp 50.000.000,00	Baku	Tenaga Kerja
Jumlah Total						Rp 1.207.803.500,00		

BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAH RAGAAN

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia di masa mendatang, maka salah satu peran penting dan strategis adalah kepedulian dan perhatian kita yang tinggi terhadap pembangunan di Bidang Kepemudaan yang di dukung dengan pembangunan di Bidang Keolahragaan. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat tampilan kehidupan bangsa ini dimasa mendatang sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya di hari ini, yang ditunjang dengan kegiatan Keolahragaan guna membentuk jasmani dan rohani agar selalu kuat dan energik. Oleh karena itu maka segenap daya upaya harus dilakukan untuk mampu memberdayakan generasi mudanya.

Pembangunan di bidang ini merupakan bidang yang memiliki peranan strategis dalam mempersiapkan dan membentuk anak didik/generasi muda sebagai generasi penerus dan berkualitas di masa depan, sehingga kegiatan pembangunan yang mendukung ke arah ini meliputi Pembangunan pada : Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan pelajar, Pembinaan Pemuda dan Olahraga Masyarakat, Pembinaan Tenaga Teknis Keolahragaan, dan Pembangunan sarana prasaranan keolahragaan serta mendukung kegiatan Kepramukaan.

B. KONDISI UMUM

Perkembangan prestasi di Bidang Pemuda dan Olahraga pada 5 tahun dapat disampaikan sebagai berikut : Prestasi yang pernah diraih Pemerintah Kabupaten Lamongan di bidang olahraga pada tahun 2001 atas jerih payah dalam pembinaan di bidang olahraga ini tidak hanya persepakbolaan (PERSELA), yang menjuari divisi II Nasional pada tahun 2001, akan tetapi juga prestasi olahraga yang lain seperti panahan dan balapan sepeda yang berprestasi ditingkat internasional, catur, tenis meja, pecak silat dan gulat yang berprestasi ditingkat regional Jawa Timur, maka pada upaya tersebut Kabupaten Lamongan telah mendapatkan penghargaan sebagai pembina olahraga terbaik versi SIWO Jawa Timur dalam 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2003 di tingkat internasional pada SEA GAMES di Vietnam melalui Cabang Olahraga Panahan dengan penghargaan medali Perak (putra beregu) atas nama Saudara KUSWANTORO. Balap sepeda di tingkat ASEAN pada even di Bangkok dan Malaysia atas nama RUSDIANA. Pada tingkat nasional cabang Pencak Silat Juara I atas nama SUTRISNA dan 2 orang Juara II putra. Cabang Gulat menempati Juara atas nama Saudara M. ARIF kelas 84 kg, Saudara ZAENAL ARIFIN kelas 74 Kg, Saudara KARYONO pada kelas 60 Kg. Pada tingkat regional Propinsi Jawa Timur Cabang Panahan Juara I dan II Cabang

Balap Sepeda Putri Juara Beregu, Catur Pelajar Juara II. Sedangkan untuk tahun 2004 ini Pesepakbolaan (PERSELA) telah berjuang pada tingkat Divisi Utama.

Dibidang Kepramukaan sesuai dengan jiwa Dasa Darma dan tri Satya Pramuka, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Lamongan pada even Jambore Dunia ke 20 di Thailand peserta Kuarcab Kabupaten Lamongan telah memperoleh penghargaan atas dedikasinya di dalam melaksanakan kegiatan paling terbanyak bila dibandingkan dengan utusan dari negara-negara lain. Pada even pelaksanaan Jambore Regional di Jakarta Kuarcab Lamongan juga memperoleh penghargaan masuk nominasi 4 (empat) besar di dalam penyampaian makalah karya ilmiah. Sedangkan tingkat regional Kuarcab Lamongan juga memperoleh penghargaan sebagai Juara Umum dalam pelaksanaan lomba-lomba pada even Hari Ulang Tahun Pramuka di Surabaya.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan keserasian berbagai kebijakan pemuda di tingkat daerah;
- b. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan;
- c. Meningkatkan keserasian berbagai kebijakan olahraga ditingkat daerah;
- d. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga dan;
- e. Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Pembinaan Kepemudaan** dengan strategi dan prioritas a) Pengembangan pembinaan generasi muda melalui pendekatan aspek mental, pikir, fisik baik melalui sistem pendidikan sekolah maupun luar sekolah, b) Memfasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan, c) Mengikut sertakan pemuda dalam pembangunan daerah, d) Peningkatan pelatih dan pembina, e)

Pengembangan dan pembinaan kegiatan kepramukaan, f) Tersedianya dukungan dana untuk menunjang kegiatan pemuda dan pramuka. **2. Pembinaan Keolahragaan** dengan strategi dan prioritas a) Menumbuhkembangkan Pembinaan olahraga yang bertumpu pada kemampuan swakelola dan swadana masyarakat pada berbagai tingkatan, b) Tersedianya sarana dan prasarana olahraga serta sumber daya manusia keolahragaan, c) Menjaring atlet berprestasi dari berbagai cabang olah raga melalui penyelenggaraan kompetisi olah raga tingkat daerah, d) Tersedianya sarana dan prasarana berbagai cabang olah raga sebagai fasilitas pengembangan prestasi atlet daerah (pengadaan tanah untuk fasilitas lapangan sepak bola dan lapangan tenis disekitar Stadion Surajaya sebagai solusi pemindahan lokasi fasilitas olah raga yang ada di alun-alun Kota Lamongan), e) Tersedianya dukungan dana untuk menunjang kegiatan Persela. **3. Peningkatan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan** dengan strategi dan prioritas a) Meningkatkan pemberdayaan organisasi kepemudaan, b) Peningkatan pelatih dan pembina.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : KEPERBUKARAN DAN KEOLAHRAHASIAAN

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KESKAT/ALPHABETISK	LOKASI	VOLUME	POROSKAL BAKWA	KETERANGAN (SL)	URAIAN INSTANSI
1	Membina kegiatan organisasi kepemudaan	5.1.b	1. Perencanaan generasi muda dibidang wawasan kebangsaan	Kecamatan	-	Rp 80.000.000,00	Lampiran	Kecamatan
2	Pengembangan dan pembinaan kegiatan kepemudaan	5.1.a	1. Berikan kegiatan Pramuka	Kab. Lamongan	-	Rp 275.000.000,00	Lampiran	Dag. Pemuda
3	Tercadanya subsektor yang untuk menunjang kegiatan Pemuda	5.2.a	1. Berikan kegiatan kepemudaan dan Pemuda	Kab. Lamongan	-	Rp 4.900.000.000,00	Lampiran	Dag. Pemuda
4	Memangkas dan meningkatkan organisasi kepemudaan	5.3.b	1. Berikan kegiatan kepemudaan dan Pemuda	Kab. Lamongan	-	Rp 250.000.000,00	Lampiran	Dag. Pemuda
			2. Berikan kegiatan KOKI dan kepemudaan dan Pemuda	Kab. Lamongan	-	Rp 850.000.000,00	Lampiran	Dag. Pemuda
						Rp 8.075.000.000,00		

BIDANG PARIWISATA

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Kabupaten Lamongan memiliki objek wisata yang potensial baik berupa wisata alam maupun wisata budaya. Oleh karena itu pembangunan bidang Pariwisata ke depan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan ekonomi, termasuk pula kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat akan meningkat dimana pada akhirnya pendapatan daerahpun akan meningkat.

Pembangunan pariwisata dilaksanakan sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta akan tanah air dan budaya bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur, secara bertahap dan berkesinambungan sehingga Kabupaten Lamongan menjadi salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jawa Timur.

B. KONDISI UMUM

Objek wisata di kabupaten Lamongan mempunyai potensi kepariwisataan yang cukup baik dan dapat diandalkan dalam menunjang kontribusi terhadap perekonomian daerah dan masyarakat. Pola pengembangan objek wisata di Kabupaten Lamongan dapat dikelompokkan: objek wisata alam, objek wisata budaya dan objek wisata minat khusus.

Objek wisata alam diantaranya : Tanjung Kodok dan Maharani yang sekarang akan dijadikan satu paket dalam objek Wisata Bahari Lamongan, dan Waduk Gondang. Objek wisata budaya : Makam Sunan Drajad, Makam Sendang Dhuwur, dan Makam Nyai Putri Andongsari, selanjutnya untuk objek wisata minat khusus yaitu : TPI Brondong dan Monumen Kapal Van der Wijck, Sumber Air Panas Tepanas dan Pucak Wangi.

Perkembangan bidang pariwisata selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2004 kontribusi dari bidang pariwisata melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.026.500.000,- Hal ini dikarenakan adanya pengembangan objek wisata Tanjung Kodok menjadi Wisata Bahari Lamongan (WBL) yang saat ini masih dalam tahap akhir persiapan Grand Opening.

Selanjutnya pengembangan bidang pariwisata ke depan diarahkan kepada pengelolaan kepariwisataan yang lebih profesional sehingga akhirnya selain menjadi kontribusi PAD andalan juga menjadi daerah tujuan wisata yang sejalan dengan sapta pesona.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Menjadikan Lamongan sebagai daerah tujuan wisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah dan masyarakat serta sekaligus untuk menyediakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

2. Sasaran

- a. Pengembangan pariwisata untuk meningkatkan arus kunjungan wisata, baik wisatawan nusantara (domestik) maupun wisatawan mancanegara.
- b. Meningkatkan pelayanan wisatawan dan PAD serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya melalui peningkatan dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Pariwisata memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Peningkatan pengelolaan obyek-obyek wisata** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan dan pengembangan fasilitas obyek dan daya tarik wisata, b) Peningkatan promosi dan kerjasama kepariwisataan. **2. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan** dengan strategi dan prioritas a) Melaksanakan pemilihan Yak dan Yuk dan sejenisnya secara bertingkat, b) Penyediaan fasilitas/sarana pendukung kawasan obyek wisata, c) Pengadaan dan pemeliharaan sarana/prasarana kepariwisataan **3. Penataan Kawasan Wisata** dengan strategi dan prioritas a) Pembuatan Master Plan/DED Kawasan Wisata, b) Penyusunan Rencana Tindak Revitalisasi Permukiman (RTRP) Lingkungan Kawasan Obyek Wisata berwawasan lingkungan. **4. Peningkatan SDM pengelola kepariwisataan** dengan strategi dan prioritas a) Peningkatan SDM melalui Diklat Fungsional Pelayanan Jasa Wisata, b) Melaksanakan pembinaan Petugas Hotel dan Penginapan

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Pariwisata sebagaimana terlampir :

USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2008

BIDANG : KEPERAWATAN

[illegible]

BIDANG PERTANAHAN

A. PENDAHULUAN

Kegiatan dibidang pertanahan di Kabupaten Lamongan telah mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan. Penyediaan atau pengadaan tanah untuk pembangunan semakin meningkat jumlahnya, bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat, akan tetapi juga untuk memenuhi tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik sebagai akibat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Peranan penataan pertanahan dalam kegiatan pembangunan antara lain : mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, menentukan dan mengatur hubungan antara orang-orang dan perbuatan hukum yang menyangkut pertanahan. Mengingat begitu besarnya peranan aspek pertanahan sebagai daya dukung lahan didalam kelangsungan pelaksanaan pembangunan dan penunjang kehidupan manusia, maka pengelolaan dan pemanfaatannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai kegiatan diantaranya dengan melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan sehingga hasil dari pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya.

B. KONDISI UMUM

Kegiatan pembangunan Bidang Pertanahan di Kabupaten Lamongan pada Tahun 2004 meliputi : 1) Penyuluhan Bidang PPT sebanyak 8 Kecamatan; 2) Pendataan Subyek dan Obyek 1268 Bidang; 3) Ijin Peralihan Hak / Aspek PPT 631 Unit; 4) Survey Pengumpulan Data/Komplikasi Data PGT 1 Kabupaten; 5) Penelitian/Monitoring perubahan penggunaan tanah 1 Kabupaten; 6) Penyusunan Data dan Neraca penggunaan tanah 1 Kabupaten; 7) Pemberian Aspek penatagunaan tanah 141 Unit; 8) Pemberian Klarifikasi rencana perolehan dan penatagunaan tanah 2 Buah; 9) Permohonan Hak Atas Tanah 100 Unit; 10) Permohonan Hak : a. Hak Milik 53 Unit, b. Hak Guna Bangunan 25 Unit, c. Hak Pakai 7 Unit, d. Hak Pengelolaan tidak ada; 11) Penerbitan SPTK Konversi 5388 Unit; 12) Penerbitan SPTK SK Hak 58 Unit; 13) Pemisahan dan Penggabungan 397 Unit; 14) Penerbitan SPTK SK Hak Tanggungan 217 Unit; 15) Sertifikat Pengganti 158 Unit; 16) Peralihan Hak 1602 Unit; 17) Pembuatan S.U / G.U 5715 Unit; 18) Penerbitan SPTK PRONA 300 Unit.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Mewujudkan Tertib Administrasi dan meningkatkan pelayanan pertanahan serta penertiban pemanfaatan tanah di Bidang Pertanahan secara optimal bagi kemakmuran masyarakat dan menjunjung keamanan.

2. Sasaran

- a. Meningkatkan dan mempercepat penertiban Surat Keputusan pemberian hak termasuk pula dalam rangka pelaksanaan retribusi tanah obyek Landreform ;
- b. Meningkatkan tertib Sistem Administrasi Pertanahan, seperti pelayanan pendaftaran dan sertifikasi tanah, Sistem penertiban administrasi Landreform, Sistem konsolidasi tanah dan sistem pendayagunaan tanah ;
- c. Tersedianya data pertanahan yang cukup bagi perencanaan dan kegiatan pembangunan baik perkotaan dan perdesaan, sehingga dapat memberikan data Pertanahan secara cepat dan akurat ;
- d. Peningkatan pembinaan dan penertiban terhadap penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah baik di Perkotaan dan Perdesaan ;
- e. Meningkatkan penyelesaian sertifikat Hak Atas Tanah dan pendaftaran bidang – bidang tanah ;
- f. Melaksanakan pendataan / inventarisasi dan sertifikasi terhadap tanah – tanah aset Pemkab. Lamongan.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PRIORITAS TAHUN 2006

Pembangunan Bidang Pertanahan memiliki Arah kebijakan umum antara lain meliputi **1. Penataan dan Pengelolaan Bidang Pertanahan** dengan strategi dan prioritas a) Penataan optimalisasi personal teknis bidang pertanahan, b) Penataan aset-aset dan inventarisasi dokumen agraria. **2. Inventarisasi dan Sertifikasi Aset Tanah Milik Daerah** dengan strategi dan prioritas a) Penginventarisasi tanah-tanah aset milik daerah, b) Pensertifikatan tanah-tanah milik daerah. **3. Pengadaan dan Peningkatan Pelayanan Pertanahan** dengan strategi dan prioritas a) Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah, b) Peningkatan Kualitas Pelayanan Hak Atas Tanah kepada masyarakat, c) Peningkatan tertib administrasi Pertanahan.

E. PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

Program dan Pembiayaan diimplementasikan dalam Usulan Proyek Prioritas Tahun Anggaran 2006 Bidang Pertanahan sebagaimana terlampir :

**USULAN RENCANA BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBAYAI DARI APBD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

BIDANG : PERTANAHAN

NO.	PRIORITAS DAERAH	KODE PROGRAM	KEGIATAN/PROYEK	LOKASI	VOLUME	PENGHARGAAN BIAYA	KETERANGAN (B.C.)	USULAN BERTAMBAH
1.	Penelitian operasional personal selain bidang pertanahan	U.3.a	1. Pengadaan tanah dan sertifikasi tanah bagi masyarakat petani	Kecamatan Lamongan	PM	Rp. 7.500.000.000,00	Lanjutan	Bag. Pem.
Jumlah Total						Rp. 7.500.000.000,00		

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan yang di dalamnya memuat kebijakan pembangunan yang terkait dengan APBD Kabupaten Lamongan, maupun dari partisipasi masyarakat dan swasta, berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD.

Dinas/Badan/Kantor dan Satuan Kerja di jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

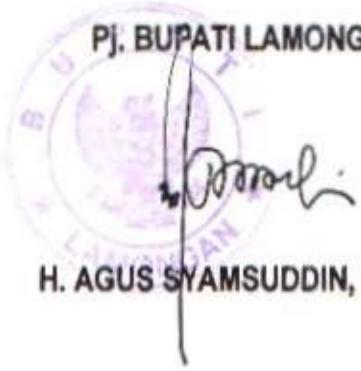
Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga mampu untuk menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keharmonisan segenap pelaku pembangunan memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan dan pemahaman terhadap tugas masing-masing, untuk itu dalam menyongsong tahun 2006 perlu terus dikembangkan secara profesional agar anggaran tahun 2006 dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Disadari bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini bukan suatu dokumen yang sempurna melainkan masih banyak memiliki kelemahan, karena memang belum mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat Lamongan yang

sedang berkembang. Meskipun memiliki keterbatasan dan kelemahan namun diyakini dapat memberikan landasan berpijak dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan Lamongan kedepan.

Pj. BUPATI LAMONGAN



H. AGUS SYAMSUDDIN, SH, MS